

**PENDAPATAN USAHATANI PADI DENGAN MENERAPKAN SISTEM
RESI GUDANG DI KECAMATAN PULAU PANGGUNG KABUPATEN
TANGGAMUS**

(SKRIPSI)

Oleh

MUTIARA INDIRA PUTRI



**JURUSAN AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2016**

ABSTRACT

THE INCOME OF RICE FARMING BY JOINING THE WAREHOUSE RECEIPT SYSTEM IN PULAU PANGGUNG SUB DISTRICT OF TANGGAMUS REGENCY

By

Mutiara Indira Putri

This study aims to analyze the implementation of the warehouse receipt system, the income level and the efficiency of rice farming that joining the warehouse receipt system, in addition to identify the economic benefits and non-economic benefits implementation of warehouse receipt system, and identify contributing factors and inhibiting factors to the implementation of warehouse receipt system for rice farmers in Pulau Panggung District, Tanggamus Regency. The samples were selected by census technique method for the farmer who are joining the warehouse receipt system and simple random sampling method for the farmer who are not joining the warehouse receipt system. The data was analyzed by scoring techniques analysis, farm income analysis, Decision Matrix Analysis, and Objective Value Tree analysis. The results of this research showed that the implementation of the warehouse receipt system less than the maximum because there were weaknesses in the socialization for farmers and there was a shortage on the specifics of the warehouse receipt system. Income of farmers who were joining the warehouse receipt system was higher than farmers who were not joining the warehouse receipt system. The farmer influencing factor on joining the warehouse receipt system was the cost was cheap, while influencing factor on unjoining the warehouse receipt system was the low socialization to farmers. The economic benefits of joining the warehouse receipt system for farmers was that they got benefit (financially), while the non-economic benefits was that they got good storage and definite system. Perception of the economic cost was the small margin of difference, while of the non-economy was the production of farmers that did not reach the quality and quantity.

Keywords: farm income, rice, warehouse receipt system.

ABSTRAK

PENDAPATAN USAHATANI PADI DENGAN MENERAPKAN SISTEM RESI GUDANG DI KECAMATAN PULAU PANGGUNG KABUPATEN TANGGAMUS

Oleh

Mutiara Indira Putri

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pelaksanaan Sistem Resi Gudang, mengetahui tingkat pendapatan dan efisiensi usahatani padi dengan menerapkan Sistem Resi Gudang, mengidentifikasi manfaat ekonomi dan non ekonomi penerapan Sistem Resi Gudang bagi petani padi, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat penerapan Sistem Resi Gudang bagi petani padi di Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus. Responden penelitian dipilih menggunakan metode teknik sensus untuk petani SRG dan metode acak sederhana untuk petani non SRG. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis teknik *scoring*, analisis pendapatan usahatani, analisis *Decision Matrix Analysis*, dan analisis *Value Tree Objective*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan SRG Kabupaten Tanggamus kurang maksimal karena terdapat kelemahan pada sosialisasi SRG untuk petani dan terdapat kekurangan pada spesifikasi gudang. Pendapatan petani yang menerapkan SRG lebih tinggi dibandingkan petani non SRG. Faktor petani dalam menerapkan SRG adalah biaya SRG yang ringan, sedangkan faktor petani tidak menerapkan SRG yaitu sosialisasi yang rendah. Manfaat ekonomi petani dari SRG yaitu keuntungan petani (finansial), sedangkan dari sisi manfaat non ekonomi yaitu sistem penyimpanan yang baik dan pasti. Persepsi biaya dari sisi ekonomi yaitu selisih margin yang kecil, sedangkan dari sisi non ekonomi yaitu hasil produksi petani yang tidak memenuhi kualitas dan kuantitas.

Kata kunci: padi, pendapatan usahatani, sistem resi gudang.

**PENDAPATAN USAHATANI PADI DENGAN MENERAPKAN SISTEM
RESI GUDANG DI KECAMATAN PULAU PANGGUNG KABUPATEN
TANGGAMUS**

Oleh

MUTIARA INDIRA PUTRI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA PERTANIAN

pada

Jurusan Agribisnis
Fakultas Pertanian Universitas Lampung



**JURUSAN AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2016**

**Judul Skripsi : PENDAPATAN USAHATANI PADI DENGAN
MENERAPKAN SISTEM RESI GUDANG DI
KECAMATAN PULAU PANGGUNG
KABUPATEN TANGGAMUS**

Nama Mahasiswa : Mutiara Indira Putri

No. Pokok Mahasiswa : 1214131070

Jurusan/Program Studi : Agribisnis

Fakultas : Pertanian



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Ir. R. Hanung Ismono, M.P.
NIP 19620623 198603 1 003

Dr. Ir. Yaktiworo Indriani, M.Sc.
NIP 19610622 198503 2 004

2. Ketua Jurusan/Program Studi

Dr. Ir. Fembriarti Erry Prasmatiwi, M.P.
NIP 19630203 198902 2 001

MENGESAHKAN

1. Tim Pengujji

Ketua : Dr. Ir. R. Hanung Ismono, M.P.

Sekretaris : Dr. Ir. Yaktiworo Indriani, M.Sc.

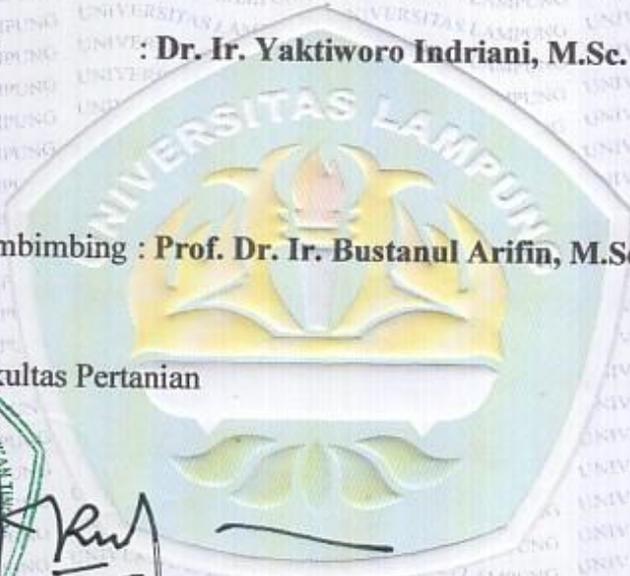
**Pengujji
Bukan Pembimbing : Prof. Dr. Ir. Bustanul Arifin, M.Sc.**

2. Dekan Fakultas Pertanian

Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.Si.

NIP. 19611020 198603 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 30 November 2016



(Handwritten signatures of Dr. Ir. R. Hanung Ismono, M.P., Dr. Ir. Yaktiworo Indriani, M.Sc., and Prof. Dr. Ir. Bustanul Arifin, M.Sc.)

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 29 Desember 1993. Penulis merupakan putri kedua dari pasangan Bapak Agus Darwis (Alm) dan Ibu Asna Dewi. Riwayat pendidikan yang telah penulis tempuh adalah Taman Kanak-kanak (TK) Al-Azhar 2 Bandar Lampung

tahun 2000, Sekolah Dasar (SD) Al-Azhar 1 Bandar Lampung tahun 2006, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Bandar Lampung tahun 2009, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Bandar Lampung tahun 2012. Pada tahun 2012, penulis melanjutkan studi ke jenjang Perguruan Tinggi di Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung.

Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Air Abang, Kecamatan Ulubelu, Kabupaten Tanggamus selama 40 hari. Penulis melaksanakan Praktik Umum (PU) selama 30 hari di PT. Indokom Samudra Persada, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif pada berbagai organisasi baik internal maupun eksternal kampus. Penulis pernah menjadi anggota Bidang III Himpunan Sosial Ekonomi Pertanian

(HIMASEPERTA) pada tahun 2012-2013, menjadi Duta Mahasiswa Fakultas
Pertanian Universitas Lampung periode 2014-2015. Selain itu, penulis aktif di

organisasi eksternal kampus yaitu menjadi pengurus Muli Mekhanai Provinsi Lampung Tahun 2014-2015.

Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah menjadi asisten dosen di beberapa mata kuliah seperti Dasar-Dasar Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian pada semester genap tahun 2014-2015 serta mata kuliah Koperasi pada semester genap tahun 2014-2015. Penulis pernah mendapat Juara 2 lomba proposal kewirausahaan yang dilaksanakan oleh Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Selain itu, penulis pernah menjadi salah satu bagian tim pencacah atau *surveyor* konsumen Bank Indonesia pada bulan April-Juni 2016.

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillahillabill'alamin. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pendapatan Usahatani dengan Menerapkan Sistem Resi Gudang di Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus”**. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tidak akan terealisasi dengan baik tanpa adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Raden Hanung Ismono, M.P., selaku Dosen Pembimbing Pertama yang telah memberikan bimbingan, saran, arahan dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Ir. Yaktiworo Indriani, M.Sc., selaku Dosen Pembimbing Ke dua dan selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi dan nasehat pada penulis sampai skripsi ini selesai.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. Bustanul Arifin, M.Sc., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran, kritik dan nasehatnya.

4. Kedua orangtua tercinta yang selalu penulis banggakan, Ayahanda Agus Darwis (Alm), Ibunda Asna Dewi, dan Kakakku Bunga Aneke Putri, M. Ferry Syukri yang selalu ada, membimbing penulis, memberikan do'a yang tak pernah terputus, memberikan semangat dan motivasi.
5. Seluruh Dosen Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian atas semua ilmu yang telah diberikan selama penulis menjadi mahasiswa di Universitas Lampung.
6. Karyawan-karyawan di Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian, Mba Aie, Mba Iin, Mba Fitri, Mas Boim, dan Mas Bukhari atas semua bantuan yang telah diberikan.
7. M. Farrel Bob Akmal atas segala doa, motivasi dan bantuan hingga terselesaikannya skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat Ririn Aristiyani, S.P., Octa Primanda Mukti, S.P., Diah Septiana Anggreini, S.Ds., Ratna Hidayati, S.T., Sinta Martha Bastari, A.Md., Tiara Shinta Anggraini, Clara Yolandika, S.P.,M.Si., Iqbal Lazuardi terima kasih atas persahabatan dan kasih sayang kepada penulis selama ini.
9. Saudara-saudara Khalisha Almahyra Syukri, Nabila, Terry Denisa Syukri.
10. Teman-teman Jurusan Agribisnis angkatan 2012: Mulia, Macipa, Puspa, Yohana, Ni Made, Rizka, Nadia, Desi, Ririn, Mita, Vani, Ega, Tiara, Cherli, Parastri, Sheila, Febi, Delia, Muher, Tri, Dolly, Rendi, Imam, Riki M, yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih atas bantuannya selama ini.
11. Rekan-rekan mahasiswa/i Jurusan Agribisnis angkatan 2009, 2010, 2011, 2013, 2014 terima kasih atas kebersamaanya.

12. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Agribisnis Pertanian
(HIMASEPERTA) Fakultas Pertanian Periode 2014/2015 yang telah
memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka
semua dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak serta almamater tercinta.

Bandar Lampung, 30 Novemeber 2016

Mutiara Indira Putri

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	vii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Tinjauan Pustaka	12
1. Gambaran Umum Komoditas	12
2. Konsep Usahatani.....	13
3. Biaya Usahatani	15
4. Penerimaan Usahatani.....	16
5. Pendapatan Usahatani	17
6. R/C Rasio	17
7. Konsep Permintaan dan Penawaran	18
8. Konsep Pembentukan Harga	26
9. Sistem Resi Gudang	28
10. Hasil Penelitian Terdahulu	37
B. Kerangka Pemikiran	44
III. METODOLOGI PENELITIAN	
A. Konsep Dasar dan Definisi Operasional	48
B. Lokasi Penelitian, Responden dan Waktu Penelitian.....	52
C. Teknik Pengumpulan dan Jenis Data	56
D. Metode Analisis Data.....	56
1. Metode Analisis Data Tingkat Penerapan Pelaksanaan SRG	57

2. Metode Analisis Data Pendapatan dan Efisiensi Usahatani.....	61
3. Metode Analisis Data Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat .	63
4. Metode Analisis Data Manfaat Ekonomi dan Non Ekonomi.....	66
IV. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Daerah Penelitian	68
1. Kabupaten Tanggamus.....	68
2. Kecamatan Pulau Panggung.....	70
B. Sistem Resi Gudang	75
V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Keadaan umum responden	82
B. Penerapan pelaksanaan SRG Kabupaten Tanggamus.....	88
1. Sosialisasi SRG Kabupaten Tanggamus	89
2. Kelembagaan gudang SRG Kabupaten Tanggamus	91
3. Prosedur pelaksanaan SRG Kabupaten Tanggamus	96
4. Spesifikasi gudang SRG Kabupaten Tanggamus.....	100
5. Persyaratan SRG Kabupaten Tanggamus	103
C. Analisis pendapatan usahatani.....	105
1. Keragaan usahatani padi	105
2. Input produksi	106
3. Teknik budidaya.....	111
4. Analisis biaya usahatani padi	114
5. Analisis penerimaan usahatani padi	120
6. Analisis pendapatan usahatani padi	121
7. Analisis R/C	123
D. Faktor pendukung dan faktor penghambat penerapan SRG	125
E. Manfaat ekonomi dan non ekonomi penerapan SRG.....	128
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	137
B. Saran.....	138
DAFTAR PUSTAKA	139
LAMPIRAN	142

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Luas panen, produktivitas dan produksi padi di Indonesia Tahun 2016-2015	2
2. Produksi tanaman padi sawah per kabupaten/kota di Provinsi Lampung Tahun 2006-2015 (dalam ton).....	3
3. Kondisi Sistem Resi Gudang di Provinsi Lampung.....	7
4. Jumlah resi gudang yang diterbitkan pada gudang SRG Kabupaten Tanggamus Tahun 2015	8
5. Daftar pengelola gudang SRG yang mendapat persetujuan Bappebti	30
6. Daftar Lembaga Penilaian Kesesuaian yang mendapat persetujuan Bappebti.....	31
7. Jumlah gudang yang mengimplementasikan Sistem Resi Gudang Tahun 2009-2014.....	35
8. Hasil penelitian terdahulu	39
9. Responden petani yang menerapkan SRG di Kabupaten Tanggamus	55
10. <i>Decision Matrix Analysis</i> (DMA)	64
11. Perspektif manfaat dan biaya terhadap Sistem Resi Gudang	67
12. Statistik tanaman pangan dan perkebunan kabupaten tanggamus Tahun 2012 – 2014	70
13. Luas panen, produksi dan produktifitas pada komoditas usahatani di Desa Sri Menganten pada Tahun 2015.....	72
14. Kelembagaan petani, jumlah anggota dan jenis usahatani di Desa Sri Menganten	73

15. Luas panen, produksi, produktifitas tanaman pangan hortikultura dan perkebunan di Desa Gunung Meraksa pada Tahun 2015.....	74
16. Kelembagaan petani, jumlah anggota dan jenis usahatani di Desa Gunung Meraksa	75
17. Jumlah resi gudang yang diterbitkan pada gudang SRG Kabupaten Tanggamus Tahun 2015	78
18. Sebaran responden petani padi berdasarkan karakteristik umur, pendidikan dan jumlah tanggungan keluarga di Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus	83
19. Sebaran responden petani padi berdasarkan luas lahan, pengalaman berusahatani dan jenis pekerjaan sampingan di Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus	86
20. Standar mutu komoditi gabah.....	104
21. Rata-rata penggunaan input usahatani padi petani SRG dan non SRG per hektar	106
22. Rata-rata penggunaan tenaga kerja petani padi SRG dan non SRG per hektar	109
23. Rata-rata biaya usahatani padi petani SRG per hektar di Kecamatan Pulau Panggung pada MT 1	115
24. Rata-rata biaya usahatani padi petani SRG per hektar di Kecamatan Pulau Panggung pada MT 2	116
25. Rata-rata biaya usahatani padi petani non SRG per hektar di Kecamatan Pulau Panggung pada MT 1	117
26. Rata-rata biaya usahatani padi petani non SRG per hektar di Kecamatan Pulau Panggung pada MT 2	119
27. Total penerimaan rata-rata usahatani padi petani SRG dan non SRG per hektar di Kecamatan Pulau Panggung.....	120
28. Perhitungan penerimaan dan pendapatan rata-rata usahatani padi petani per hektar di Kecamatan Pulau Panggung.....	122
29. Hasil analisa faktor penentu (<i>Decision Matrix Analysis</i>) penerapan SRG Kabupaten Tanggamus	125

30. Identitas responden petani non SRG di Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus	153
31. Biaya benih padi petani non SRG	155
32. Biaya pupuk petani non SRG	157
33. Biaya pestisida petani non SRG	161
34. Biaya penyusutan peralatan usahatani padi petani non SRG	165
35. Tenaga kerja usahatani padi petani non SRG MT 1	169
36. Tenaga kerja usahatani padi petani non SRG MT 2.....	175
37. Biaya lain-lain petani non SRG MT 1	181
38. Biaya lain-lain petani non SRG MT 2.....	183
39. Penerimaan petani non SRG.....	185
40. Pendapatan petani non SRG MT 1	187
41. Pendapatan petani non SRG MT 2	189
42. Identitas responden petani SRG di Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus	191
43. Biaya benih padi petani SRG	192
44. Biaya pupuk petani SRG	193
45. Biaya pestisida petani SRG	195
46. Biaya penyusutan peralatan usahatani padi petani SRG	197
47. Tenaga kerja usahatani padi petani SRG MT 1	199
48. Tenaga kerja usahatani padi petani SRG MT 2.....	202
49. Biaya bunga petani SRG	205
50. Biaya lain-lain petani SRG MT 1	206

51. Biaya lain-lain petani SRG MT 2.....	207
52. Penerimaan petani SRG.....	208
53. Pendapatan petani SRG MT 1	209
54. Pendapatan petani SRG MT 2	210
55. Analisis faktor penentu (<i>Decision Matrix Analysis</i>) penerapan SRG Kabupaten Tanggamus	213
56. Analisis <i>Value Tree Objective Benefit and Cost</i> Persepsi Petani SRG	216

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Pertumbuhan transaksi Sistem Resi Gudang	6
2. Kurva permintaan.....	19
3. Kurva penawaran	22
4. Keseimbangan pasar pada saat panen raya	26
5. Kerangka pemikiran analisis perbandingan pendapatan usahatani petani padi yang menerapkan Sistem Resi Gudang dan non Sistem Resi Gudang di Kecamatan Pulau Pangung, Kabupaten Tanggamus.....	47
6. Struktur organisasi Sistem Resi Gudang Kabupaten Tanggamus.....	80
7. Pemanfaatan jasa Sistem Resi Gudang	81
8. Persentase realisasi implementasi SRG di Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus	89
9. Persentase realisasi sosialisasi SRG di Kabupaten Tanggamus.....	91
10. Bagan koordinasi kelembagaan SRG	95
11. Prosedur penyimpanan barang dan penerimaan barang SRG	96
12. Prosedur penyimpanan barang dan penerimaan barang SRG	98
13. <i>Value Tree Objective Benefit and Cost</i> Persepsi Petani SRG	128
14. Penentuan sample responden petani	143
15. Wawancara bersama salah satu petani non SRG.....	143
16. Wawancara bersama salah satu petani SRG.....	143

17. Kegiatan pengeluaran barang dari gudang SRG Kabupaten Tanggamus ..	144
18. Kegiatan pengeluaran barang dari gudang SRG Kabupaten Tanggamus ..	144
19. Wawancara bersama pengelola gudang PT BGR.....	144

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertanian merupakan salah satu sektor yang memegang peranan penting, terutama dalam perekonomian. Hal ini tercatat di tahun 2007, pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 6,5 persen dengan kontribusi terbesar berasal dari sektor pertanian sebesar 1,3 persen (Deptan, 2007). Sektor pertanian juga berkontribusi dalam penyumbang devisa negara yang cukup besar, penyediaan pangan, penyediaan tenaga kerja, kontribusi pasar dan produk dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Dari berbagai jenis pangan, beras telah menjadi komoditas strategis dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Selain sebagai sumber pangan, beras juga menjadi sumber penghasilan bagi para petani.

Beras merupakan bahan makanan pokok yang memiliki peran dalam meningkatkan ketahanan pangan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Kebutuhan konsumsi beras yang ada di Indonesia disebabkan anggapan sebagian besar masyarakat Indonesia bahwa beras merupakan bahan makanan yang belum dapat digantikan. Di sisi lain luas areal untuk menanam padi menurun akibat dialihfungsikan lahan tersebut menjadi pemukiman penduduk,

tanaman perkebunan dan lain – lain. Tetapi Indonesia masih dapat meningkatkan produksi beras meskipun luas areal menurun. Berikut luas panen, produktivitas dan produksi padi di Indonesia tahun 2006-2015 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Luas panen, produktivitas dan produksi padi di Indonesia tahun 2006–2015.

Tahun	Luas Panen (ha)	Produktivitas (Ku/ha)	Produksi (ton)
2006	11.786.430	46,20	54.454.937
2007	12.147.637	47,05	57.157.435
2008	12.327.425	48,94	60.325.925
2009	12.883.576	49,99	64.398.890
2010	13.253.450	50,15	66.469.394
2011	13.203.643	49,80	65.756.904
2012	13.445.524	51,36	69.056.126
2013	13.835.252	51,52	71.279.709
2014	13.797.307	51,35	70.846.465
2015	14.309.364	52,80	75.550.895

Sumber: Badan Pusat Statistik (2015a)

Pada Tabel 1 terlihat produksi padi sawah di Indonesia pada tahun 2015 meningkat sebesar 75.550.895 ton dibandingkan 2014. Produktivitas padi yang meningkat setiap tahunnya juga disertai dengan tingginya konsumsi beras yang dihasilkan dari usahatani padi.

Di Indonesia terdapat beberapa sentra produksi padi yang tersebar di beberapa wilayah nusantara. Lampung merupakan salah satu provinsi sentra produksi pangan yang telah mampu memanfaatkan lahan kering dalam menunjang produksi pangan nasional dan merupakan daerah yang kontribusinya meningkat pesat. Perkembangan produksi tanaman padi sawah per

kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2009 – 2013 dapat dilihat pada

Tabel 2.

Tabel 2. Produksi tanaman padi sawah per kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2009-2013 (dalam ton).

Kabupaten/ Kota	2009	2010	2011	2012	2013
Lampung Barat	153.144	160.080	165.342	177.810	116.607
Tanggamus	306.716	208.553	201.067	212.317	226.628
Lampung Selatan	338.988	370.060	395.437	399.900	441.113
Lampung Timur	417.521	431.981	443.552	492.315	509.949
Lampung Tengah	550.253	570.968	654.546	660.443	673.564
Lampung Utara	108.471	117.088	131.155	139.319	150.339
Way Kanan	135.751	120.487	145.472	137.161	151.674
Tulang Bawang	324.412	187.412	186.728	185.674	186.781
Pesawaran	119.971	139.159	146.317	150.526	153.472
Pringsewu	0	111.239	113.284	113.342	120.275
Mesuji	0	113.822	87.195	144.304	129.791
Tulang Bawang Barat	0	60.245	49.155	66.182	73.473
Pesisir Barat	0	0	0	0	72.506
Bandar Lampung	9.039	9.336	8.631	6.752	9.220
Metro	23.048	23.443	24.988	22.555	27.027
Provinsi Lampung	2.487.314	2.623.873	2.752.869	2.908.600	3.042.419

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung (2015b)

Pada Tabel 2 terlihat produksi padi sawah di Provinsi Lampung setiap tahun selalu meningkat. Tahun 2013 produksi padi sawah di Provinsi Lampung sebesar 3.042.419 ton. Peningkatan produksi padi dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan (beras) nasional dan merupakan salah satu upaya untuk menaikkan pendapatan atau kesejahteraan petani. Namun peningkatan produksi yang dicapai petani dalam kenyataannya belum membawa petani pada peningkatan pendapatan atau kesejahteraan petani dikarenakan harga jual rendah pada saat panen raya. Dalam proses meningkatkan pendapatan petani melalui upaya peningkatan harga jual salah satu alternatif yang dilakukan adalah melalui penyimpanan komoditi, hal ini

dimaksudkan untuk menunda penjualan pada saat panen raya. Peningkatan harga jual komoditi terjadi akibat mekanisme permintaan dan penawaran pasar, di mana pada jangka waktu tertentu setelah panen raya akan terjadi peningkatan permintaan. Pada fase tersebut harga jual akan meningkat dan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani padi.

Selama ini, di saat panen petani dihadapkan pada masalah yaitu menjual komoditinya segera setelah panen kepada tengkulak di mana harga cenderung rendah. Pendapatan yang diperoleh petani seringkali tidak memadai, baik untuk mendukung kehidupan yang layak bagi petani dan keluarganya atau lebih jauh lagi menjadi modal produksi musim tanam selanjutnya. Untuk memperoleh harga terbaik, petani dituntut untuk menahan atau menyimpan hasil panen dan menjualnya kelak ketika harga sudah membaik. Namun hal ini membebani petani dengan himpitan hidup yang harus segera terpenuhi, seperti mengembalikan pinjaman atas kegiatan produksi sebelumnya, membiayai kehidupan ataupun menyiapkan modal untuk produksi selanjutnya (Nugraha, 2014).

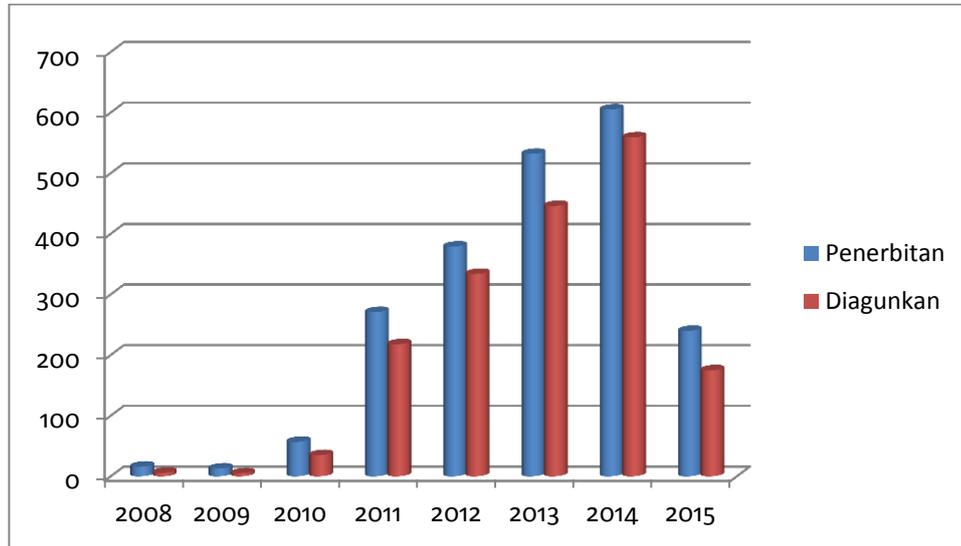
Untuk mengatasi hal tersebut maka pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menerapkan Sistem Resi Gudang (SRG) dengan mengeluarkan Undang – Undang No.9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang (SRG) dan telah diamandemen dengan Undang – Undang No.9 Tahun 2011. Sistem Resi Gudang merupakan salah satu instrumen yang dapat dimanfaatkan petani, kelompok tani, gapoktan, koperasi tani, maupun pelaku usaha (pedagang, prosesor, pabrikan) sebagai suatu instrumen pembiayaan perdagangan. Hal ini

dikarenakan SRG dapat menyediakan akses kredit bagi dunia usaha dengan jaminan barang (komoditas) yang disimpan di gudang. SRG juga dapat menjadi strategi memperoleh harga terbaik dengan cara menunda penjualan komoditas pada musim panen raya di mana harga komoditas cenderung rendah melalui penyimpanan komoditasnya di gudang. Sementara waktu menunggu harga membaik, petani dapat mengagunkan resi gudangnya untuk memperoleh pembiayaan dari perbankan atau lembaga keuangan nonbank.

Pengelolaan Sistem Resi Gudang diawasi oleh Badan Pengawas Berjangka Komoditi (Bappebti) yang berada di bawah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. SRG dibangun dengan misi utama untuk meningkatkan kualitas komoditi dan yang terpenting meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan petani. Selain itu sistem ini mendorong petani untuk lebih profesional sehingga dapat menghasilkan komoditi terbaik bahkan berkualitas ekspor. Bagi para pelaku usaha sektor agrobisnis dan agroindustri hadirnya SRG ini akan memberikan kemudahan dalam memperoleh komoditi yang berkualitas karena komoditi yang disimpan di gudang SRG telah melalui uji mutu yang dilakukan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK).

Kementerian Perdagangan telah menerbitkan 1.943 resi gudang dengan total volume komoditas sebanyak 74.517,13 ton yang diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan terhadap kualitas komoditas pertanian yang diperdagangkan. Jumlah tersebut didominasi komoditas gabah sebanyak 63.985,59 ton, disusul beras 5.417,72 ton, jagung 4.670,03 ton, rumput laut 420 ton dan kopi 77,79 ton. Total nilai resi gudang yang telah diterbitkan sebesar

Rp 382,13 miliar dengan pembiayaan dari bank dan nonbank mencapai Rp 238,69 miliar (Bappebti, 2015d). Berikut rekapitulasi transaksi resi gudang dalam Sistem Resi Gudang tahun 2008 – 31 Oktober 2015.



Gambar 1. Pertumbuhan transaksi Sistem Resi Gudang (Bappebti, 2015f)

Sistem Resi Gudang (SRG) telah dilaksanakan di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk Provinsi Lampung. Di Provinsi Lampung, SRG telah dilaksanakan di beberapa kabupaten. Sistem Resi Gudang yang berada di daerah tersebut telah dilengkapi dengan kelengkapan gudang berupa *dryer*. Pembangunannya sendiri didanai dari Dana Alokasi Khusus Kementerian Perdagangan. Berikut kondisi Sistem Resi Gudang di Provinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Kondisi Sistem Resi Gudang di Provinsi Lampung

No.	Lokasi	Tahun Berdiri	Operasional	Komoditi	Kapasitas Gudang
1	Kab. Lampung Selatan Kec. Candi puro Desa Titiwangi	2011	14 Oktober 2014	Gabah/Beras	1.800 ton
2	Kab. Lampung Timur Kec. Sribawono Desa Sribawono	2011	Belum Beroperasi	Gabah/Beras	1.200 ton
3	Kab. Lampung Tengah Kec. Anak Tuha Desa Tanjung Harapan	2011	Belum Beroperasi	Gabah/Beras	1.200 ton
4	Kab. Tulang Bawang Kec. Rawapitu Desa Sumber Agung	2011	7 Mei 2015	Gabah/Beras	3.000 ton
5	Kab. Tanggamus Kec. Pulau Panggung Desa Tekad	2011	29 Mei 2015	Gabah/Beras	850 ton
6	Kab. Pesisir Barat Kec. Pesisir Selatan Desa Marang	2012	30 September 2015	Gabah/Beras	2.000 ton
7	Kab. Lampung Selatan Kec. Natar Desa Bandar Rejo	2014	Belum Beroperasi	Gabah/Beras	1.800 ton

Sumber: Dinas Perdagangan Provinsi Lampung (2015)

Kabupaten Tanggamus merupakan kabupaten ke-3 yang telah menerbitkan resi gudang di Provinsi Lampung. Gudang SRG di Kabupaten Tanggamus adalah gudang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus yang dibangun melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Kemendag Tahun Anggaran 2011 dan telah diresmikan pada bulan Mei 2015. Kapasitas Gudang SRG di Kabupaten Tanggamus yaitu sebesar 850 ton dengan komoditas gabah dan beras. Gudang penyimpanannya berada di Desa Tekad, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus. Berikut jumlah resi gudang yang telah diterbitkan di gudang SRG Kabupaten Tanggamus dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Jumlah resi gudang yang diterbitkan pada gudang SRG Kabupaten Tanggamus tahun 2015

No	Bulan	Jumlah Resi Gudang	Volume (Kg)
1	Mei	3	34.949
2	Juni	3	39.265
3	Juli	1	8.021
4	Agustus	3	60.080
5	September	2	40.033
6	Oktober	-	-
7	November	-	-
8	Desember	-	-
Total		12	182.348

Sumber: PT Bhandha Ghara Reksa (2015a)

Dapat dilihat pada Tabel 4 penerbitan resi gudang yang ada di SRG Kabupaten Tanggamus berjumlah 12 resi gudang. Hingga September 2015 telah diterbitkan resi gudang pada SRG Kabupaten Tanggamus yang berjumlah 12 resi gudang dengan total volume sebesar 182.348 kg atau 182,348 ton, sedangkan pada bulan oktober sampai bulan desember tidak ada barang yang masuk ke SRG Kabupaten Tanggamus, hanya ada pengeluaran untuk komoditi gabah.

Tingkat pendapatan petani padi di Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus secara umum masih rendah. Tingkat pendapatan petani dipengaruhi oleh beberapa komponen yaitu jumlah produksi, harga jual dan biaya – biaya yang dikeluarkan petani dalam usahatani. Melalui mekanisme Sistem Resi Gudang di Kabupaten Tanggamus diharapkan dapat membantu meningkatkan pendapatan petani padi dengan cara mendapatkan harga jual yang lebih baik.

B. Perumusan Masalah

Salah satu kecamatan di Kabupaten Tanggamus yang menerapkan Sistem Resi Gudang adalah Kecamatan Pulau Panggung. Bertani di daerah tersebut merupakan mata pencaharian utama penduduk di Kecamatan Pulau Panggung. Meskipun demikian, pendapatan yang diterima petani belum cukup untuk memenuhi kehidupan mereka. Salah satu alternatif dalam proses meningkatkan pendapatan petani adalah melalui penyimpanan komoditi (gabah atau beras). Peningkatan harga jual gabah atau beras terjadi akibat mekanisme permintaan dan penawaran pasar, di mana pada jangka tertentu setelah panen raya akan terjadi peningkatan permintaan. Pada fase tersebut harga jual akan meningkat dan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani padi.

Salah satu alternatif penyimpanan gabah yang dilakukan pemerintah yaitu melalui penerapan Sistem Resi Gudang. Sistem ini dilaksanakan untuk meningkatkan harga jual komoditas dan untuk memperoleh kredit dengan komoditas hasil pertanian sebagai agunannya. Penerapan resi gudang di Indonesia diharapkan mampu untuk menggerakkan perekonomian nasional dan mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kerakyatan, meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup petani serta memperkuat perananan komoditas nasional.

Sistem Resi Gudang (SRG) diharapkan dapat diterapkan di berbagai daerah di Indonesia. Pada kenyataannya, di Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus sebagai salah satu daerah pengembangan SRG, tidak seluruh

masyarakat petani padi ikut menerapkan SRG. Menurut petani yang belum memanfaatkan SRG mereka tidak melihat perbedaan yang signifikan dari petani yang telah memanfaatkan SRG dan juga para petani berfikir prosedur dalam mendapatkan resi gudang cukup sulit.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

- 1) Bagaimana tingkat pelaksanaan Sistem Resi Gudang di Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus?
- 2) Bagaimana pendapatan dan efisiensi usahatani padi dengan menerapkan Sistem Resi Gudang di Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus?
- 3) Apakah faktor pendukung dan faktor penghambat penerapan Sistem Resi Gudang bagi petani padi di Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus?
- 4) Apakah manfaat ekonomi dan non ekonomi dalam penerapan Sistem Resi Gudang bagi petani padi di Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) mengetahui tingkat pelaksanaan Sistem Resi Gudang di Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus.

- 2) mengetahui pendapatan dan efisiensi usahatani padi dengan menerapkan Sistem Resi Gudang di Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus.
- 3) mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat penerapan Sistem Resi Gudang bagi petani padi di Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, serta
- 4) mengidentifikasi manfaat ekonomi dan non ekonomi dalam penerapan Sistem Resi Gudang bagi petani padi di Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi beberapa lapisan masyarakat, diantaranya:

- 1) penulis, untuk menambah kemampuan menganalisa pengetahuan dan wawasan mengenai Sistem Resi Gudang oleh petani di daerah penelitian
- 2) pengelola gudang, sebagai bahan masukan untuk pengembangan Sistem Resi Gudang
- 3) petani padi di seluruh Provinsi Lampung khususnya Kabupaten Tanggamus, sebagai masukan untuk pengembangan Sistem Resi Gudang
- 4) pemerintah, sebagai masukan untuk implementasi Sistem Resi Gudang yang lebih baik
- 5) akademisi dan peneliti, khususnya di dalam pengembangan penelitian mengenai Sistem Resi Gudang

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Tinjauan Pustaka

1. Gambaran Umum Komoditas

Padi merupakan tanaman pangan berupa rumput berumpun. Tanaman pertanian kuno ini berasal dari dua benua, yaitu Asia dan Afrika Barat tropis dan subtropis. Tanaman padi (*Oryza sativa* L.) termasuk golongan tumbuhan *Gramineae* yang ditandai dengan batang yang tersusun dari beberapa ruas. Tanaman padi terdiri dari ribuan varietas yang masing – masing memiliki karakteristik sama dan terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan *Indica* dan golongan *Yaponica*. Golongan tanaman padi yang terdapat di Indonesia merupakan padi golongan *Indica*.

Tanaman padi dapat hidup dengan baik di daerah yang berhawa panas dan banyak mengandung uap air. Dengan kata lain padi dapat hidup baik di daerah beriklim panas yang lembab. Pulau Jawa, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur merupakan sentra produksi padi. Selain itu, daerah sentra produksi padi lainnya adalah Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan (Purwono dan Purnawati, 2007). Tanaman padi yang dipanen akan menghasilkan Gabah Kering Panen (GKP) dengan kadar air antara 18

hingga 25 persen, yang setelah dikeringkan atau dijemur hingga kadar air berkurang sampai pada batas maksimal 14 persen dan menjadi Gabah Kering Giling (GKG).

2. Konsep Usahatani

Ilmu usahatani adalah ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang mengusahakan dan mengkoordinir faktor – faktor produksi berupa lahan dan alam sekitarnya sebagai modal sehingga memberikan manfaat yang sebaik – baiknya. Ilmu usahatani merupakan ilmu yang mempelajari cara – cara petani menentukan, mengorganisasikan dan mengkoordinasikan penggunaan faktor – faktor produksi seefektif dan seefisien mungkin sehingga usaha tersebut memberikan pendapatan semaksimal mungkin (Suratiyah, 2015).

Menurut Suratiyah (2015) faktor – faktor yang bekerja didalam suatu usahatani adalah faktor alam, faktor tenaga kerja dan faktor modal. Faktor alam dapat dibedakan menjadi dua yaitu faktor tanah dan lingkungan alam sekitarnya. Berikut ketiga faktor didalam usahatani.

a. Modal

Modal adalah barang ekonomi yang dapat dipergunakan untuk memproduksi kembali atau barang ekonomi yang dapat dipergunakan untuk mempertahankan dan meningkatkan pendapatan. Modal dikatakan *land saving capital* jika dengan modal tersebut dapat menghemat penggunaan lahan, tetapi produksi dapat dilipatgandakan tanpa harus memperluas areal.

Contoh pemakaian pupuk, bibit unggul, pestisida dan intensifikasi. Modal dikatakan *labour saving capital* jika dengan modal tersebut dapat menghemat penggunaan tenaga kerja. Contohnya pemakaian traktor untuk membajak, mesin penggiling padi dan sebagainya.

b. Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan salah satu unsur penentu terutama bagi usahatani yang sangat bergantung pada musim. Tenaga kerja merupakan faktor penting dalam usahatani keluarga, khususnya tenaga kerja petani beserta anggota keluarganya.

c. Faktor Tanah

Tanah merupakan faktor produksi yang penting karena tanah merupakan tempat tumbuhnya tanaman, ternak dan usahatani keseluruhannya. Tentu saja faktor tanah tidak terlepas dari pengaruh alam sekitarnya yaitu sinar matahari, curah hujan, angin dan sebagainya. Tanah mempunyai sifat istimewa antara lain bukan merupakan barang produksi, tidak dapat diperbanyak dan tidak dapat dipindah – pindah.

d. Faktor Iklim

Iklim sangat menentukan komoditas yang diusahakan, baik tanaman maupun ternak. Komoditas yang diusahakan harus cocok dengan iklim setempat agar produktivitasnya tinggi dan memberikan manfaat yang lebih baik bagi manusia. Iklim juga mempengaruhi dalam penentuan teknologi mana yang cocok untuk digunakan pada saat usahatani tersebut berlangsung.

Kegiatan usahatani berdasarkan coraknya dapat dibagi menjadi dua, yaitu usahatani subsisten dan usahatani komersial. Usahatani subsisten bertujuan memenuhi konsumsi keluarga, sedangkan usahatani komersial adalah usahatani dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Ciri – ciri petani komersial adalah cepat dalam mengadopsi inovasi pertanian, cepat tanggap dalam mencari informasi, lebih berani dalam mengambil resiko dalam berusaha dan memiliki sumber daya yang cukup.

3. Biaya Usahatani

Dalam usahatani dikenal dua macam biaya, yaitu biaya tunai atau biaya yang dibayarkan dan biaya tidak tunai atau biaya yang tidak dibayarkan. Biaya yang dibayarkan adalah biaya yang dikeluarkan untuk membayar upah tenaga kerja keluarga, biaya untuk pembelian input produksi seperti pupuk, obat – obatan dan bawon panen. Biaya seringkali jadi masalah bagi petani terutama dalam pengadaan input atau sarana produksi karena kurangnya biaya yang tersedia, tidak jarang petani mengalami kerugian dalam usahatannya.

Menurut Soekartawi (1995) Biaya usahatani dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu biaya tetap (*fixed cost*) dan biaya tidak tetap (*variable cost*).

- a. Biaya tetap atau *fixed cost* umumnya diartikan sebagai biaya yang relatif tetap jumlahnya dan terus dikeluarkan walaupun produksi yang diperoleh banyak atau sedikit. Jadi besarnya biaya tetap ini tidak tergantung pada besar kecilnya produksi yang diperoleh. Contohnya pajak, biaya untuk pajak akan tetap dibayar meskipun hasil usahatani itu besar atau gagal.

- b. Biaya tidak tetap atau *variable cost* merupakan biaya yang besar kecilnya dipengaruhi oleh produksi yang diperoleh. Contohnya biaya untuk sarana produksi. Jika menginginkan produksi yang tinggi, maka tenaga kerja perlu ditambah, pupuk juga perlu ditambah dan sebagainya.

Biaya total adalah penjumlahan dari biaya tetap total (*total fixed cost*) dengan biaya tidak tetap total (*total variable cost*) dan dapat ditulis dengan rumus sebagai berikut:

$$TC = FC + VC$$

Keterangan:

TC = *Total Cost* (Biaya total)

FC = *Fixed Cost* (Biaya tetap)

VC = *Variable Cost* (Biaya variabel)

4. Penerimaan Usahatani

Menurut Soekartawi (1995) penerimaan usahatani adalah perkalian antara produksi yang diperoleh dengan harga jual. Pada setiap akhir panen petani akan menghitung berapa hasil bruto yang diperolehnya. Semuanya kemudian dinilai dengan uang. Tetapi tidak semua hasil ini diterima petani, hasil itu harus dikurangi biaya – biaya yang dikeluarkan untuk biaya usahatani seperti bibit, pupuk, obat – obatan, biaya pengolahan tanah, upah menanam, upah membersihkan rumput dan biaya panen yang biasanya berupa bagi hasil. Penerimaan usahatani adalah perkalian antara produksi yang diperoleh dengan harga jual. Pernyataan ini dapat ditulis sebagai berikut:

$$TR = Y \cdot P_y$$

Keterangan:

TR = *Total Revenue* (Total penerimaan)

Y = Produksi yang diperoleh dalam suatu usahatani

Py = Harga Y

5. Pendapatan Usahatani

Pendapatan usahatani adalah selisih antara penerimaan dengan semua biaya (Soekartawi, 1995). Berusahatani sebagai suatu kegiatan untuk memperoleh produksi di lahan pertanian, pada akhirnya akan dinilai dari biaya yang dikeluarkan dan penerimaan yang diperoleh. Selisih keduanya merupakan pendapatan dari kegiatan usahatani. Pernyataan ini dapat ditulis sebagai berikut:

$$Pd = TR - TC$$

Keterangan:

Pd = Pendapatan Usahatani

TR = Total Penerimaan

TC = Total Biaya

6. R/C

Analisis pendapatan selalu diikuti dengan pengukuran efisiensi. Efisiensi dari pendapatan ini dapat diukur dengan memakai perbandingan antara besar penerimaan dengan biaya yang dikeluarkan atau disebut R/C. R/C adalah singkatan dari *Return Cost Ratio*, atau dikenal sebagai perbandingan (nisbah) antara penerimaan dan biaya (Soekartawi, 1995). Apabila nilai $R/C > 1$ berarti penerimaan yang diperoleh lebih besar dari tiap unit biaya yang dikeluarkan,

artinya usahatani memperoleh keuntungan dan layak diusahakan, sedangkan bila nilai $R/C < 1$ maka tiap unit biaya yang dikeluarkan akan lebih besar dari penerimaan yang diperoleh.

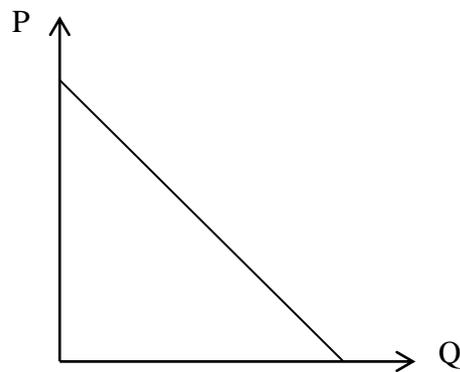
7. Konsep Permintaan dan Penawaran

Permintaan dan penawaran atas barang – barang atau komoditas produk pertanian berkaitan erat dengan perkembangan harga. Apabila harga naik maka permintaan akan turun dan apabila harga turun maka permintaan akan naik. Sebaliknya, apabila penawaran naik maka harga akan turun dan apabila penawaran turun maka harga akan naik.

a. Pengertian Permintaan

Permintaan didefinisikan sebagai banyaknya suatu komoditi yang ingin dibeli dan dapat dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga pada suatu saat tertentu. Hukum permintaan menjelaskan hubungan antara permintaan suatu barang terhadap harga barang tersebut, hukum permintaan menyatakan bahwa “*semakin rendah harga suatu barang maka akan semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut, sebaliknya semakin tinggi harga suatu barang maka akan semakin sedikit permintaan terhadap barang tersebut*”. Hukum permintaan membentuk kurva permintaan karena hanya menghubungkan variabel harga barang dan jumlah barang yang diminta. Kurva permintaan berbentuk garis lurus miring dari kiri atas ke kanan bawah, miringnya kurva permintaan tersebut menunjukkan adanya anggapan bahwa yang berpengaruh terhadap jumlah yang diminta hanyalah

tingkat harga (Suparmoko, 1990).



Gambar 2. Kurva permintaan

Keterangan:

P = *Price* (harga)

Q = *Quantity* (jumlah)

Hukum permintaan hanya menekankan perhatian pada hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta, sedangkan pada kenyataannya jumlah barang yang diminta tidak hanya dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri. Berikut faktor – faktor yang mempengaruhi permintaan selain harga.

1) Harga barang itu sendiri

Harga akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Jika harga naik, jumlah permintaan tersebut akan meningkat, sedangkan jika harga turun maka jumlah permintaan akan menurun.

2) Harga barang lain

Permintaan konsumen terhadap suatu barang juga bergantung pada harga barang lain. Berdasarkan fungsinya terhadap barang lain maka

barang ekonomi dapat digolongkan kedalam tiga bagian, yaitu barang substitusi, komplementer dan barang lain yang tidak mempunyai kaitan sama sekali dengan barang tersebut. Barang substitusi adalah barang yang fungsinya dapat saling mengganti, sedangkan barang komplementer adalah barang yang fungsinya saling melengkapi.

3) Pendapatan

Besar kecilnya pendapatan yang diperoleh seseorang turut menentukan besarnya permintaan akan barang dan jasa. Apabila pendapatan yang diperoleh tinggi maka permintaan akan barang dan jasa juga semakin tinggi. Sebaliknya jika pendapatannya turun, maka kemampuan untuk membeli barang juga akan turun.

4) Selera konsumen

Selera konsumen terhadap barang dan jasa dapat mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Jika selera konsumen terhadap barang tertentu meningkat maka permintaan terhadap barang tersebut akan meningkat pula.

5) Intensitas kebutuhan konsumen

Intensitas kebutuhan konsumen berpengaruh terhadap jumlah barang yang diminta. Kebutuhan terhadap suatu barang atau jasa yang tidak mendesak akan menyebabkan permintaan masyarakat terhadap barang sangat mendesak maka permintaan masyarakat terhadap barang tersebut menjadi meningkat.

6) Perkiraan harga dimasa depan

Apabila konsumen memperkirakan bahwa harga akan naik maka konsumen cenderung menambah jumlah barang yang dibeli karena adanya kekhawatiran harga akan semakin mahal. Sebaliknya apabila konsumen memperkirakan bahwa harga akan turun, maka konsumen cenderung mengurangi jumlah barang yang dibeli.

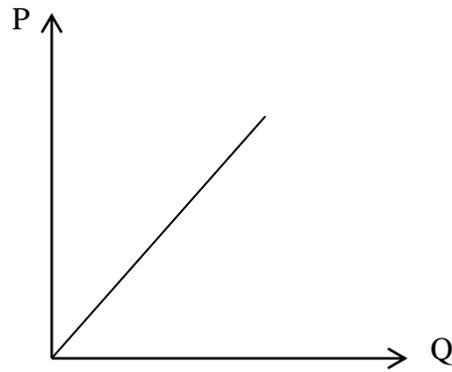
7) Jumlah penduduk

Pertambahan penduduk akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Jika jumlah penduduk dalam suatu wilayah bertambah banyak, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat.

b. Pengertian Penawaran

Penawaran didefinisikan sebagai banyaknya suatu barang yang ingin ditawarkan oleh suatu produsen di pasar pada berbagai tingkat harga tertentu. Hukum penawaran menyatakan bahwa “*apabila harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat*”.

Hukum penawaran ini akan menurunkan kurva penawaran yaitu kurva yang menunjukkan hubungan antara jumlah yang ditawarkan dan tingkat harga barang yang bersangkutan. Kurva suatu barang menunjukkan hubungan antara harga barang tersebut di pasar dengan jumlah yang ingin diproduksi dan dijual oleh produsen. Hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah yang ditawarkan akan membentuk suatu kurva penawaran (Suparmoko, 1990).



Gambar 3. Kurva penawaran

Keterangan:

P = *Price* (harga)

Q = *Quantity* (jumlah)

Selain harga barang itu sendiri, penawaran juga dipengaruhi oleh faktor - faktor berikut:

1) Harga barang itu sendiri

Harga yang tinggi akan menguntungkan bagi produsen sehingga produsen akan menambah penawarannya di pasar. Perubahan harga ini hanya menyebabkan pergerakan di sepanjang kurva penawaran.

2) Harga barang lain

Barang dengan posisi yang saling menggantikan akan mengalami perubahan penawaran jika salah satu barang mengalami perubahan harga. Ketika barang substitusi mengalami kenaikan maka permintaan masyarakat terhadap barang yang digantikan akan meningkat. Kenaikan permintaan ini akan memberikan dorongan kepada produsen untuk menaikkan produksi.

3) Harga faktor produksi

Harga faktor produksi adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh produsen dalam kegiatan produksinya. Jika terjadi kenaikan harga faktor produksi maka biaya yang dikeluarkan oleh produsen dalam kegiatan produksinya meningkat sehingga menurunkan tingkat keuntungan produsen. Hal tersebut direspon oleh produsen dengan mengurangi jumlah produksinya untuk menghemat biaya produksinya. Oleh sebab itu, meningkatnya harga faktor produksi akan menurunkan jumlah komoditas yang ditawarkan oleh produsen. Kenaikan harga faktor produksi akan menyebabkan produsen memproduksi outputnya lebih sedikit dengan jumlah anggaran yang tetap yang nantinya akan mengurangi laba produsen sehingga produsen akan pindah ke industri lain dan akan mengakibatkan berkurangnya penawaran.

4) Biaya produksi

Kenaikan harga input juga mempengaruhi biaya produksi. Apabila biaya produksi meningkat, maka produsen akan mengurangi hasil produksinya, berarti penawaran barang dan jasa berkurang.

5) Teknologi produksi

Dengan penggunaan teknologi perusahaan dapat meminimalkan biaya produksi dan memaksimalkan pendapatan yang kemudian akan meningkatkan keuntungan. Perusahaan akan meresponnya dengan peningkatan volume produksinya sehingga dapat dikatakan bahwa penggunaan teknologi akan meningkatkan penawaran suatu komoditas.

6) Jumlah pedagang

Apabila jumlah penjual suatu produk tertentu semakin banyak, maka penawaran produk tersebut akan bertambah.

7) Tujuan perusahaan

Beberapa perusahaan bertujuan untuk memaksimalkan volume produksi, sehingga selalu berusaha menghasilkan dan menjual lebih banyak untuk meningkatkan penawarannya serta dapat memaksimumkan laba.

8) Kebijakan pemerintah

Kebijakan pemerintah untuk mengurangi komoditas impor menyebabkan *supply* dan keperluan tersebut harus dipenuhi sendiri sehingga dapat meningkatkan penawaran.

c. Hubungan Permintaan dan Penawaran Komoditas Pertanian

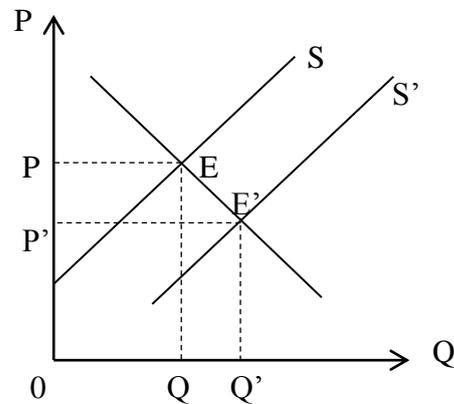
Secara umum apabila persediaan atau jumlah barang yang ditawarkan produsen melimpah maka harga pasar akan turun dan apabila persediaan barang terbatas, maka harga pasar akan naik. Permintaan terhadap barang dan jasa merupakan jumlah total permintaan konsumen terhadap barang dan jasa pada tingkat harga dan periode waktu tertentu. Teori permintaan menerangkan hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Dalam menganalisa permintaan perlu dibedakan perbedaan antara permintaan dan jumlah barang yang diminta. Permintaan merupakan keadaan keseluruhan hubungan diantara harga dan jumlah permintaan, sedangkan jumlah barang yang diminta merupakan banyaknya permintaan pada tingkat harga tertentu.

Hubungan antara jumlah permintaan dan harga ini menimbulkan adanya hukum permintaan. Hukum permintaan merupakan hipotesis yang menyatakan bahwa semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak permintaan atas barang tersebut, begitupun sebaliknya (Nicholson, 1999).

Teori penawaran menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah penawaran dan harga. Hubungan jumlah penawaran dan harga ini menimbulkan adanya hukum penawaran yang menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang tersebut yang akan ditawarkan oleh penjual. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang tersebut yang ditawarkan oleh penjual (Nicholson, 1999).

Namun di sisi lain, kondisi penawaran komoditas pertanian yang melimpah mengakibatkan harga komoditas tersebut turun karena para petani tidak memiliki pilihan lain selain menjual hasil panen raya saat itu juga, hal tersebut dapat dilihat lebih jelas dalam Gambar 4. Pada saat panen raya, kuantitas penawaran komoditas pertanian yang meningkat mengakibatkan kurva supply bergeser dari kurva S menuju kurva S' dan pada kurva permintaan yang tidak berubah menyebabkan harga bergerak turun dari harga P menuju harga P' . Berbeda dengan pada saat panen raya, dengan adanya program SRG, petani melakukan tunda jual dengan cara menyimpan penawaran yang ada di dalam gudang SRG, sehingga tidak adanya *over*

supply. Hal ini menyebabkan kurva S yang tidak bergeser dan harga P tetap.



Gambar 4. Keseimbangan pasar pada saat panen raya

8. Konsep Pembentukan Harga

a. Pengertian Harga

Harga adalah nilai suatu barang yang dapat dinyatakan dengan uang. Harga juga merupakan sejumlah nilai yang ditukarkan konsumen dengan manfaat memiliki atau menggunakan produk yang nilainya ditetapkan oleh pembeli dan penjual melalui tawar menawar atau ditetapkan oleh penjual melalui satu harga yang sama terhadap semua pembeli. Penetapan harga dan persaingan harga telah dinilai sebagai masalah utama yang dihadapi perusahaan.

b. Peranan Harga Pasar dalam Perekonomian

Berikut beberapa peranan harga pasar didalam perekonomian.

- 1) Menunjukkan perubahan kebutuhan masyarakat.

Jika kebutuhan masyarakat meningkat, maka harga akan meningkat.

- 2) Menggerakkan pengusaha untuk bereaksi terhadap perubahan permintaan.

Jika harga suatu barang dan jasa meningkat, pengusaha akan tergerak untuk mengetahui pola konsumsi masyarakat terhadap barang dan jasa yang bersangkutan.

- 3) Mempengaruhi jenis dan jumlah faktor produksi yang harus disediakan.

Faktor produksi seperti modal dan tenaga kerja akan banyak digunakan untuk bidang usaha yang menghasilkan barang dan jasa berharga tinggi atau yang menghasilkan laba besar.

- 4) Membantu menentukan penawaran.

Berdasarkan besarnya kenaikan harga, dapat diperkirakan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan.

c. Proses Terbentuknya Harga Pasar

Faktor terpenting dalam pembentukan harga adalah kekuatan permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran akan berada dalam keseimbangan harga pasar jika jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Harga pasar dapat dicapai melalui proses kesepakatan dari tawar menawar antara pembeli dan penjual.

- 1) Apabila harga terlalu rendah, maka jumlah yang diminta akan tinggi, sedangkan jumlah yang ditawarkan akan rendah. Akibatnya, muncul dorongan untuk menaikkan harga.

2) Sebaliknya, apabila harga terlalu tinggi, maka jumlah yang diminta akan rendah, sedangkan jumlah yang ditawarkan akan tinggi.

Akibatnya, muncul dorongan untuk menurunkan harga agar barang dan jasa yang ditawarkan dapat diterima pasar.

9. Sistem Resi Gudang

a. Pengertian Sistem Resi Gudang

Menurut Undang – Undang No.9 Tahun 2011, resi gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang SRG yang diterbitkan oleh pengelola gudang. Resi gudang dapat digunakan sebagai agunan atau jaminan untuk memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan (bank atau non bank) karena resi tersebut dijamin dengan komoditas yang selalu dijaga dan dikelola oleh pengelola gudang yang terakreditasi (memiliki izin dari Bappebti). Masa berlaku resi gudang adalah selama masa simpan komoditi yang bersangkutan di gudang. Untuk beras, gabah dan jagung rata – rata selama tiga sampai enam bulan.

Sistem Resi Gudang (SRG) adalah kegiatan – kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan dan penyelesaian transaksi resi gudang. Sistem Resi Gudang merupakan salah satu instrumen penting dan efektif dalam sistem pembiayaan perdagangan karena dapat memfasilitasi pemberian kredit bagi petani dan dunia usaha dengan agunan barang yang disimpan di gudang. Sistem ini telah digunakan secara luas di negara – negara maju atau di negara – negara di mana pemerintah telah mulai

mengurangi perannya dalam menstabilisasi harga komoditi, terutama komoditi agribisnis.

b. Sasaran dan Kelembagaan dalam Sistem Resi Gudang

Sasaran dari resi gudang adalah koperasi, UKM dan kelompok tani yang hidupnya bergantung pada sektor pertanian (agribisnis), di mana karakter pelaku usaha tersebut pada umumnya tidak memiliki agunan, akses pembiayaan yang rendah, terbatasnya informasi harga dan permintaan, posisi tawar yang rendah dan membutuhkan dukungan kemudahan modal kerja. Dalam penerapan Sistem Resi Gudang, terdapat beberapa pihak yang terkait dalam penerbitan resi gudang. Berikut adalah beberapa pihak yang terkait dalam penerbitan resi gudang.

- 1) Pemegang resi, merupakan pemilik komoditas yang telah menerima pengalihan dari pemilik komoditas, sehingga pemegang resi ini merupakan penjual dan pembeli komoditi yang disimpan di gudang.
- 2) Pengelola gudang, merupakan pihak yang melakukan usaha pergudangan baik gudang milik sendiri maupun milik orang lain, yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang serta berhak menerbitkan resi gudang. Pengelola gudang harus berbentuk Perseroan Terbatas yang telah memperoleh persetujuan sebagai penerbit resi gudang dari Badan Pengawas. Sebagai penerbit resi, keberadaan pengelola gudang sangat diperlukan dalam pengembangan Sistem Resi Gudang. Pengelola gudang harus dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat dan pengguna resi gudang

bahwa resi gudang yang diterbitkan sesuai dengan keadaan komoditas yang disimpan di gudang. Berikut daftar pengelola gudang SRG yang telah mendapat persetujuan dari Bappebti dapat dilihat di Tabel 5.

Tabel 5. Daftar pengelola gudang SRG yang mendapat persetujuan Bappebti tahun 2015

No	Perusahaan/Koperasi	Alamat
1	PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)	Jakarta
2	PT Pertani (Persero)	Jakarta
3	PT Sucofindo (Persero)	Jakarta
4	Puskud Aceh	Aceh
5	Koperasi Selaras	Jakarta
6	Kospermindo	Sulawesi Selatan
7	Koperasi Niaga Mukti	Jawa Barat
8	Koperasi Serba Usaha Annisa	Jawa Barat
9	PT Gunung Lintong	Sumatera Utara
10	KUD Tuntung Pandang	Kalimantan Selatan
11	PT Pos Indonesia (Persero)	Jawa Barat
12	PT Food Station Tjipinang Jaya	Jakarta

Sumber: Bappebti (2015a)

- 3) Badan Pengawas Sistem Resi Gudang, merupakan unit organisasi di bawah Kementerian Perdagangan yang diberi wewenang untuk melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan pelaksanaan Sistem Resi Gudang. Saat ini tugas, fungsi dan kewenangan badan pengawas dilaksanakan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).
- 4) Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), merupakan lembaga terakreditasi yang melakukan serangkaian kegiatan untuk menilai atau membuktikan bahwa persyaratan tertentu yang berkaitan dengan produk, proses dan sistem terpenuhi. Lembaga ini akan mengeluarkan sertifikat untuk komoditas yang memuat nomor, jenis dan jumlah komoditas, jangka

waktu mutu komoditas serta bertanggung jawab terhadap kesesuaian antara kondisi komoditas dengan data yang tercantum dalam sertifikat. Berikut daftar Lembaga Penilaian Kesesuaian yang telah mendapat persetujuan dari Bappebti dapat dilihat di Tabel 6.

Tabel 6. Daftar Lembaga Penilaian Kesesuaian yang mendapat persetujuan Bappebti tahun 2015

No	Jenis LPK	No	Nama Lembaga
1	Inspeksi Gudang	1	PT Bhanda Ghara Rekza
		2	PT Sucofindo
		3	PT Sawu Indonesia
2	Manajemen Mutu	1	PT Sucofindo
		2	PT Sawu Indonesia
3	Uji Mutu Barang	1	PT Sucofindo (lada, kopi, kakao)
		2	BPSMB & Tembakau Surabaya (kopi, lada, kakao, karet)
		3	BPSMB Makassar (kopi, lada)
		4	PT Beckjorindo Paryaweksana - Makassar (kopi, kakao) - Bandar Lampung (kopi, lada hitam)
		5	BPSMB Surakarta
		6	BPSMB & Tembakau Surabaya (gabah)
		7	UJASTAMA PROBIS PERUM BULOG SUBDRIVE Kab. Indramayu, Kab. Banyumas, Kab. Pekalongan (gabah)
		8	BPSMB Medan (karet, kopi, kakao, lada)
		9	BPSMB Makassar (gabah, beras, jagung)
		10	BPSMB-LT Surabaya (beras, jagung, rumput laut)
		11	UB Jastasma BULOG
		12	BPSMB Aceh (kopi, kakao)
		13	Universitas Mataram
		14	BPSMB Makassar (rumput laut)
		15	BPSMB Medan (jagung, gabah, beras)
		16	UPT PSMB Palu

Tabel 6. Lanjutan

No	Jenis LPK	No	Nama Lembaga
		17	Lembaga Sertifikasi Produk (LS - PRO CCQC)
		18	UPT BPSMB Bali
		19	UPTD BPSMB Gorontalo
		20	BPSMB Prov. Bengkulu
		21	BPSMB Prov. Lampung
		22	BPSMB Prov. Aceh
		23	UPT PSMB – LT Jember

Sumber: Bappebti (2015b)

- 5) Pusat Registrasi, merupakan badan usaha berbadan hukum yang mendapat persetujuan badan pengawas untuk melakukan penatausahaan resi gudang, yang meliputi pencatatan, penyimpanan, pemindahbukuan kepemilikan, pembebanan, hak jaminan, pelaporan serta penyediaan sistem dan jaringan informasi. Saat ini pusat registrasi dalam Sistem Resi Gudang yang telah disetujui Bappebti yaitu PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI).

- 6) Lembaga Keuangan, merupakan lembaga yang berfungsi menerima resi gudang sebagai jaminan atas pinjaman atau hutang pemilik resi gudang. Pembiayaan resi gudang juga dilakukan oleh lembaga keuangan bank seperti Bank BRI, Bank Jatim, Bank Kalsel, Bank Jateng dan lembaga keuangan non bank seperti Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero), Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil, Mikro, Menengah (KUKM).

c. Bentuk Resi Gudang dan Komoditas

Terdapat dua bentuk resi gudang yaitu resi gudang yang dapat diperdagangkan dan resi gudang yang tidak dapat diperdagangkan. Resi gudang dapat diperdagangkan merupakan suatu resi gudang yang memuat perintah penyerahan komoditas kepada pihak yang memegang resi gudang tersebut atau suatu perintah pihak tertentu yang disebut Resi Atas Perintah, sedangkan resi gudang yang tidak dapat diperdagangkan merupakan resi gudang yang memuat ketentuan bahwa komoditas yang dimaksud hanya

dapat diserahkan kepada pihak yang namanya telah ditetapkan dan disebut sebagai Resi Atas Nama. Resi harus memuat sekurang – kurangnya hal berikut yaitu judul resi, bentuk resi, lokasi gudang, tanggal penerbitan, nomor penerbitan, waktu jatuh tempo, biaya penyimpanan, jumlah komoditas, deskripsi komoditas, spesifikasi awal dan mutu komoditas, tanda tangan pengelola gudang, jumlah pembayaran dimuka dan kewajiban pemegang resi.

Berdasarkan UU No. 9 Tahun 2011 tentang Resi Gudang dan PP No. 36 Tahun 2007 tentang Resi Gudang yang termasuk ke dalam komoditi resi gudang adalah setiap benda bergerak yang dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu dan diperdagangkan secara umum dan paling sedikit memenuhi persyaratan yaitu memiliki daya simpan minimal tiga bulan, memenuhi standar mutu dan jumlah minimum komoditas yang disimpan. Jumlah minimum komoditi yang dapat disimpan di gudang SRG tergantung pada kebijakan pengelola gudang. Berdasarkan Permendag No. 10/M-DAG/PER/2/2013 mengenai penetapan sepuluh komoditi pertanian yang dapat disimpan di gudang dalam penyelenggaraan Sistem Resi Gudang diantaranya gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, rotan dan garam.

d. Perkembangan Pelaksanaan Sistem Resi Gudang di Indonesia

Perkembangan pelaksanaan SRG pada masa – masa awal terbilang sangat lambat. Sejak UU SRG diperkenalkan pada tahun 2007 sebagai sebuah alternatif pembiayaan keuangan bagi para petani, ternyata penerimaannya

masih terbilang rendah. Hal ini dapat dilihat berdasarkan proyek percontohan SRG di empat daerah, yaitu di Indramayu, Banyumas, Jombang untuk komoditas gabah dan di Gowa untuk komoditas jagung. Dari proyek tersebut hanya 305 ton komoditas dikeluarkan sebagai surat berharga (resi) gudang yang mencakup 15 resi gudang dengan nilai kurang lebih Rp 1 miliar (Suhendra, 2008).

Sejak dikeluarkan Undang – Undang No.9 Tahun 2006 tentang SRG dan diimplementasikan pemanfaatan SRG tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 terus mengalami peningkatan. Hal tersebut ditunjukkan dengan penerbitan resi gudang yang mencapai 57 resi gudang untuk komoditas gabah di enam kabupaten (Indramayu, Banyuwangi, Sidrap, Pinrang, Subang dan Barito Kuala) dengan volume 2.299,94 ton dan total nilai Rp 8,7 miliar. Pemanfaatan resi gudang untuk agunan pembiayaan sebanyak 36 resi gudang dengan nilai Rp 4,2 miliar. Walaupun tren perkembangan SRG terbilang positif namun dibandingkan dengan jumlah total komoditas pertanian yang ada serta keikutsertaan petani maka SRG terbilang masih minim. Nampaknya masih ada beberapa kendala yang dihadapi SRG sehingga dalam implementasinya belum dapat optimal (Bappebti, 2011).

Selama periode 2008 – 2014 telah diterbitkan sebanyak 1.873 resi gudang dengan volume barang sebanyak 72.508,25 ton yang terdiri dari 62.616,80 ton gabah, 4.628,15 ton jagung, 5.417,72 ton beras, 25,49 ton kopi dan 420,00 ton rumput laut. Total nilai resi gudang mencapai Rp 369,38 miliar. Dari jumlah resi gudang tersebut telah diagunkan sebanyak 1.584 resi

gudang dengan nilai mencapai Rp 230,16 miliar. Sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 jumlah gudang yang telah mengimplementasikan SRG sebanyak 92 gudang yang tersebar di 65 kabupaten pada 16 provinsi di Indonesia. Berikut gudang yang mengimplementasikan SRG tahun 2009 – 2014 di Indonesia.

Tabel 7. Jumlah gudang yang mengimplementasikan Sistem Resi Gudang Tahun 2009 – 2014

No	Provinsi Kabupaten/Kota	Jumlah Gudang	Keterangan
1	Aceh	5	Gabah, Beras dan Kopi
2	Sumatera Utara	3	Jagung
3	Sumatera Barat	1	Gabah, Beras dan Jagung
4	Sumatera Selatan	1	Gabah dan Beras
5	Lampung	7	Gabah dan Beras
6	Banten	2	Gabah dan Beras
7	DKI Jakarta	2	Gabah dan Beras
8	Jawa Barat	14	Gabah dan Beras
9	Jawa Tengah	16	Gabah dan Beras
10	D.I. Yogyakarta	1	Gabah dan Beras
11	Jawa Timur	24	Gabah, Beras dan Jagung
12	Bali	1	Gabah, Beras dan Jagung
13	Nusa Tenggara Barat	5	Gabah, Beras dan Jagung
14	Kalimantan Selatan	1	Gabah dan Beras
15	Sulawesi Barat	3	Gabah dan Beras
16	Sulawesi Selatan	10	Gabah, Beras, Jagung dan Rumput laut
Total		92	

Sumber: Bappebti (2015c)

e. Manfaat Sistem Resi Gudang dalam Sektor Pertanian

Menurut Bappebti (2015e) Sistem Resi Gudang dapat memberikan manfaat bagi petani dan juga bagi pelaku usaha. Berikut manfaat Sistem Resi Gudang bagi petani.

- 1) Mendapatkan harga jual yang lebih baik, dengan cara menyimpan komoditi di gudang terlebih dahulu saat panen raya di mana harga umumnya rendah, kemudian menjualnya ketika harga tinggi

- 2) Mendapatkan kepastian mutu dan jumlah, karena tes uji mutu dilakukan oleh Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK) yang telah terakreditasi
- 3) Mendapatkan pinjaman dari bank untuk pembiayaan modal kerja pada musim tanam berikutnya dengan jaminan resi gudang
- 4) Mempermudah jual beli komoditi secara langsung maupun melalui pasar lelang karena tidak perlu membawa komoditinya sebagai contoh, tetapi cukup membawa resi
- 5) Mendorong petani untuk berusaha secara berkelompok dengan meningkatkan efisiensi biaya dan posisi tawar petani

Bagi pelaku usaha dengan adanya Sistem Resi Gudang akan memberikan manfaat diantaranya:

- 1) Mendapatkan jaminan kepastian mutu dan jumlah atas komoditas yang diperdagangkan
- 2) Mendapatkan suplai komoditas yang lebih pasti, karena dapat diketahui secara pasti jumlah komoditas yang tersimpan di gudang.
- 3) Mendapatkan pinjaman berulang dari bank untuk modal kerja. Dengan jumlah modal kerja yang sama, akan dapat diperoleh omzet perdagangan yang lebih besar dengan cara meminjam dari bank atas jaminan resi gudang

Manfaat yang diperoleh dengan implementasi SRG relatif cukup besar.

Misalnya, dalam peningkatan kapasitas sektor pertanian untuk mendukung perekonomian nasional, SRG dapat memainkan peranan yang signifikan.

Menurut Bank Rakyat Indonesia, dengan dilaksanakan SRG berpeluang

untuk meningkatkan produksi, menambah perputaran ekonomi dan menyerap tenaga kerja atau mengurangi pengangguran (BRI, 2008). Penerapan SRG sangat prospektif untuk meningkatkan pendapatan usahatani. Melalui SRG akan diperoleh beberapa manfaat melalui tunda jual, yaitu saat panen raya petani menyimpan hasil pertanian di gudang dan penjualan dilakukan pada saat harga komoditas pertanian telah tinggi serta meminimalisir penimbunan barang oleh pedagang pengumpul. Dengan resi gudang yang dapat diagunkan petani akan mendapatkan dana tunai untuk kebutuhan modal usaha maupun untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya (BRI, 2011).

10. Hasil Penelitian Terdahulu

Penulis harus mempelajari penelitian sejenis di masa lalu untuk mendukung penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu ini menjadi suatu acuan dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Kajian penelitian terdahulu diperlukan sebagai bahan referensi dalam penentuan metode analisis data penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran kepada penulis tentang penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan.

Penelitian terdahulu mengenai perbandingan pendapatan telah banyak dilakukan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini menganalisis pendapatan usahatani padi, di mana petani yang dijadikan sampel yaitu petani padi yang menerapkan Sistem Resi Gudang dan

non Sistem Resi Gudang. Selain itu juga penelitian ini mengidentifikasi faktor – faktor pendukung dan faktor – faktor penghambat bagi petani yang menerapkan Sistem Resi Gudang. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya dalam hal komoditi yang diteliti dan lokasi penelitian. Berikut ini adalah informasi penelitian tentang perbandingan pendapatan yang dilakukan oleh peneliti – peneliti terdahulu dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Hasil penelitian terdahulu

No	Pengarang dan Tahun	Tema Penelitian	Metodologi	Hasil
1	Hakim, 1997.	Kajian Ekonomi Tataniaga Kopi Kasus Pasar Lelang Kopi di Provinsi Lampung	Penelitian ini menggunakan metode analisis marjin tataniaga dan analisis regresi Tobyt untuk menduga faktor-faktor yang mempengaruhi petani dalam menerapkan pasar lelang.	<p>Sebagian besar kopi yang dihasilkan petani dijual kepada pedagang pengumpul 1, yaitu 48,49% di Kec. Pagelaran dan 61,01% di Kec. Pulau Panggung. Sedangkan volume kopi yang dijual ke pasar lelang adalah 12,18% di Kec. Pagelaran dan 8,49% di Kec. Pulau Panggung. Harga kopi di pasar lelang lebih tinggi dibanding di pasar non lelang, tetapi biaya yang dikeluarkan di pasar lelang lebih besar maka besarnya marjin yang diterima petani kopi relatif lebih kecil daripada menjual di pasar non lelang.</p> <p>Faktor-faktor yang mempengaruhi peluang pemanfaatan pasar lelang Kec. Pagelaran dan Pulau Panggung adalah umur petani, tingkat pendidikan, jarak tempat tinggal ke pasar lelang, cara pemetikan kopi dan volume produksi kopi.</p>
2	Kurniawan, 2009.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Sistem Resi Gudang oleh Petani Padi di Kecamatan	Penelitian ini menggunakan metode analisis data menggunakan model regresi linier berganda sedangkan manfaat penerapan Sistem Resi Gudang	Faktor-faktor yang mempengaruhi petani padi dalam menerapkan SRG adalah luas lahan garapan dan status penguasaan lahan.

Tabel 8. Lanjutan

No	Pengarang dan Tahun	Tema Penelitian	Metodologi	Hasil
		Palasah, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.	menggunakan pendekatan struktur usahatani.	Manfaat SRG bagi petani padi adalah memberikan harga jual kepada petani lebih tinggi dan SRG sebagai sumber kredit yang mudah. Pendapatan yang diterima oleh petani padi SRG lebih tinggi dibandingkan petani yang tidak menerapkan SRG.
3	Febrian, 2011.	Analisis Pendapatan Petani Padi dengan Memanfaatkan Sistem Resi Gudang Studi Kasus Gapoktan Jaya Tani Indramayu	Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara dan pengisian kusioner. Penentuan sampel menggunakan metode teknik sensus dan metode pengambilan secara acak. Teknik analisa data menggunakan analisis kualitatif untuk menganalisis keragaan usahatani dan analisis kuantitatif untuk menghitung pendapatan, penerimaan serta R/C rasio.	Petani yang memanfaatkan SRG memperoleh harga jual yang lebih baik dibandingkan petani yang tidak memanfaatkan SRG. Nilai R/C rasio atas biaya tunai petani yang memanfaatkan SRG yaitu 2,31 sedangkan rasio R/C atas biaya tunai petani konvensional yaitu 2,01. Nilai R/C rasio atas biaya total petani yang memanfaatkan SRG yaitu 2,08 sedangkan rasio R/C atas biaya total petani konvensional yaitu 1,83.
4	Ashari, 2011.	Potensi dan Kendala Sistem Resi Gudang untuk Mendukung Pembiayaan Usaha Pertanian di Indonesia	Analisa data yang digunakan yaitu analisis deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari penelitian – penelitian terdahulu.	Potensi Sistem Resi Gudang diantaranya sebagai alternatif pembiayaan, meningkatkan produktivitas dan kualitas produk yang dihasilkan petani serta manajemen usahatani tertata. Sedangkan kendala pada SRG yaitu sosialisasi yang kurang, sikap petani yang tidak sabar dengan tunda jual, biaya yang cukup besar, kuantitas hasil panen yang kecil.

Tabel 8. Lanjutan

No	Pengarang dan Tahun	Tema Penelitian	Metodologi	Hasil
5	Priyanti, 2011.	Pelaksanaan Lelang Forward Komoditi Agribisnis di Yogyakarta	Penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif yang disusun dalam laporan yang bersifat deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pasar lelang forward komoditi agribisnis di Yogyakarta dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pasar lelang tersebut.	<p>Pelaksanaan lelang didahului melalui pengumuman di media massa serta melalui undangan yang dikirimkan kepada para anggota pasar lelang. Sistem penawaran yang digunakan dalam lelang ini adalah terbuka dengan penawaran naik-naik. Untuk penawaran tertinggi ditunjuk sebagai pemenang dan ditindaklanjuti dengan kontrak jual beli antara penjual dan pembeli.</p> <p>Hambatan yang dihadapi adalah presentasi yang tidak dilakukan sesuai dengan nomor urut daftar hadir sehingga menyebabkan sebagian penjual pulang sebelum mempresentasikan komoditinya, serta kesulitan dalam memonitoring pelaksanaan kontrak jual beli yang telah ditanda tangani karena tidak adanya biaya untuk melakukan monitoring tersebut.</p>
6	Nofialdi, 2012.	Studi Pemasaran Karet dengan Mekanisme Lelang di Desa Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Muaro Bungo	Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan mekanisme pasar lelang karet dan membandingkan manfaat pasar lelang karet dengan pasar konvensional.	Prosedur dan tata cara pelaksanaan lelang dilaksanakan dengan proses pendaftaran, pelaksanaan lelang dan penyerahan barang. Dalam penetapan harga lelang ditetapkan melalui mutu getah karet sedangkan pada pasar konvensional tidak ada standar mutu

Tabel 8. Lanjutan

No	Pengarang dan Tahun	Tema Penelitian	Metodologi	Hasil
				Pasar lelang memberikan manfaat yang positif karena harga yang ditawarkan lebih tinggi yaitu Rp 16.550/kg dibandingkan di pasar konvensional yaitu Rp 12.833/kg
7	Listiani, Nurlia dan Haryotejo, Bagas, 2013.	Implementasi SRG pada Komoditi Jagung: Studi Kasus di Tuban, Jawa Timur.	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yaitu <i>Decision Matrix Analysis</i> (DMA) untuk mengkaji dan menjelaskan faktor-faktor yang menentukan penerapan SRG. Untuk menganalisa keuntungan dan biaya dari penggunaan SRG digunakan metode <i>Value Tree Objective</i> (Metode Pohon Keputusan).	Faktor utama petani ikut SRG yaitu adanya dukungan pemerintah dan sarana prasarana gudang yang memadai. Sedangkan petani tidak ikut menerapkan SRG karena produksi hasil panen petani yang kecil dan ketidaktahuan mengenai SRG. SRG Tuban lebih menggambarkan persepsi keuntungan dibanding biaya karena ada selisih harga jual dan petani memperoleh permodalan.
8	Pontoh, 2014.	Perbandingan Pendapatan Petani Padi Sawah Peserta dan Bukan Peserta Pasar Lelang Komoditi Agro (PLKA) di Kelurahan Kiniar Kecamatan Tondano Timur	Penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel <i>simple random sampling</i> dan secara acak sederhana. Metode analisis data menggunakan analisis kuantitatif yaitu untuk membandingkan rata-rata pendapatan petani padi sawah peserta dan bukan peserta Pasar Lelang Komoditi Agro (PLKA).	Terdapat perbedaan rata-rata pendapatan petani padi sawah peserta PLKA dan bukan peserta PLKA. Rata-rata pendapatan petani padi sawah peserta PLKA adalah Rp 5.168/kg sedangkan rata-rata pendapatan petani padi sawah bukan peserta PLKA adalah Rp 4.629/kg. Penyebab perbedaan pendapatan ini adalah karena harga jual di PLKA lebih

Tabel 8. Lanjutan

No	Pengarang dan Tahun	Tema Penelitian	Metodologi	Hasil
				tinggi dibandingkan harga jual di pedagang pengumpul.
9	Suryani, Erma., Erwidodo dan Setiadjie, Iwan, 2014.	Sistem Resi Gudang di Indonesia: Antara Harapan dan Kenyataan	Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif menggunakan data primer dan sekunder. Data primer dilakukan dengan metode wawancara melibatkan <i>stakeholder</i> SRG sedangkan data sekunder berasal dari penelitian terdahulu.	SRG mampu meningkatkan kesejahteraan petani tetapi masih ditemukan banyak kendala diantaranya pemahaman petani tentang SRG masih kurang, sarana dan prasarana gudang yang belum memadai, beberapa kelembagaan SRG masih kurang.
10	Sugiono, 2014.	Pengaruh Sistem Resi Gudang terhadap Pendapatan Usahatani Padi di Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang	Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui survei, wawancara, observasi dan kuesioner dalam pengumpulan data. Metode analisis data yang digunakan adalah teknik <i>scoring</i> , dan analisis kuantitatif untuk mengetahui pendapatan serta R/C rasio petani padi.	Pelaksanaan SRG di Kecamatan Perak Kabupaten Jombang kurang maksimal. Berdasarkan keragaan SRG, adanya kelemahan pada sosialisasi SRG terhadap petani dan terdapat kekurangan pada spesifikasi gudang. Usahatani padi dengan menerapkan SRG lebih menguntungkan berdasarkan pendapatan, R/C rasio, baik atas biaya tunai dan biaya total.

B. Kerangka Pemikiran

Salah satu masalah yang dihadapi oleh petani padi sekarang ini adalah rendahnya pendapatan yang diperoleh petani dari hasil penjualan produksi. Hal ini dikarenakan harga penjualan hasil produksi menurun pada saat panen raya karena stok yang berlimpah. Penurunan harga jual juga disebabkan oleh sedikitnya petani yang menunda hasil penjualannya. Hal ini dikarenakan tidak adanya tempat penyimpanan gabah sehingga petani terpaksa menjual langsung hasil panennya pada saat panen raya. Petani juga memerlukan modal untuk musim tanam berikutnya yang kerap menjadi alasan untuk menjual cepat hasil panennya. Dalam usahatani, petani berharap adanya peningkatan pendapatan sekaligus peningkatan kesejahteraan untuk petani.

Salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan pendapatan petani yaitu dengan mengeluarkan salah satu kebijakan baru sesuai dengan UU No.9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (SRG). Sistem Resi Gudang (SRG) adalah kegiatan – kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan dan penyelesaian transaksi resi gudang. Sistem Resi Gudang merupakan salah satu instrumen penting dan efektif dalam sistem pembiayaan perdagangan karena dapat memfasilitasi pemberian kredit bagi petani dan dunia usaha dengan agunan barang yang disimpan di gudang (Bappebti, 2015g).

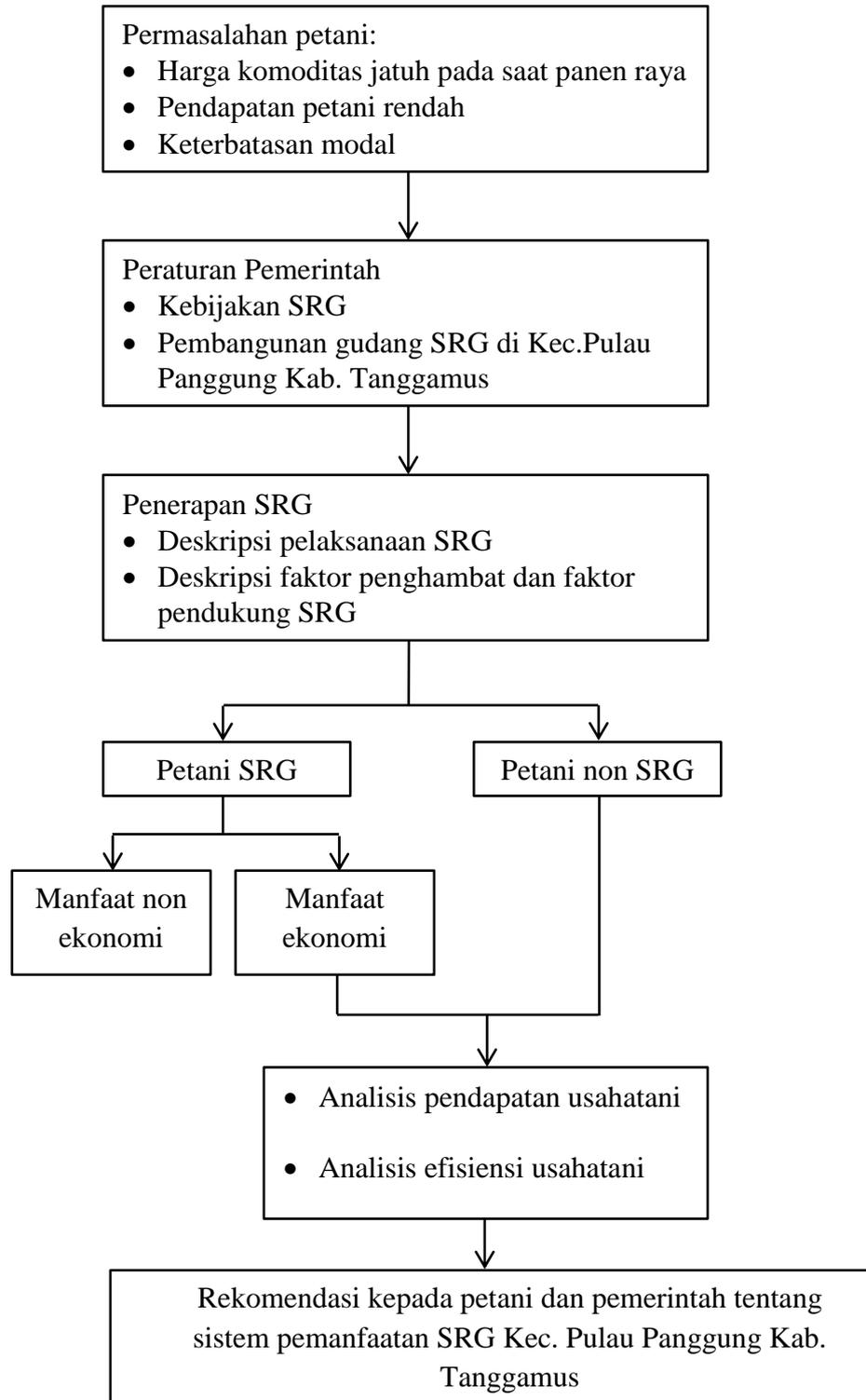
Sistem Resi Gudang dapat membantu petani dalam memperpanjang masa penjualan hasil, menjaga stabilitas harga sehingga dapat meningkatkan posisi tawar petani dalam jual beli suatu komoditas, penyedia fasilitas pergudangan

yang memadai bagi petani maupun pihak – pihak lain yang membutuhkan SRG untuk menyimpan komoditi miliknya, membuka pasar baru untuk menjual komoditas yang disimpan dan membuka akses permodalan ke lembaga perbankan yang tidak membutuhkan agunan tambahan lain.

Salah satu gudang SRG berada di Kecamatan Pulau Pangung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Namun pada kenyataannya penerapan SRG di Kecamatan Pulau Pangung belum optimal. Masih sedikit petani yang berminat dalam menerapkan SRG di daerah tersebut. Perlu diketahui apa penyebab kurang optimalnya SRG di wilayah tersebut, oleh karena itu diperlukan penelitian dengan tujuan mendeskripsikan pelaksanaan SRG, manfaat ekonomi dan non ekonomi SRG dan mendeskripsikan faktor penghambat serta faktor pendukung penerapan SRG.

Selain menganalisis faktor – faktor tersebut, analisis pendapatan dan efisiensi usahatani petani padi di Kecamatan Pulau Pangung yang menerapkan SRG diperlukan untuk menilai seberapa besar pengaruh SRG. Pendapatan usahatani dapat diketahui dari selisih antara penerimaan dan biaya total. Penerimaan usahatani merupakan selisih antara penerimaan dan biaya. Biaya usahatani adalah semua pengeluaran yang dipergunakan dalam usahatani. Biaya usahatani dibedakan menjadi dua yaitu biaya tetap dan biaya tidak tetap. Biaya tetap (*fixed cost*) adalah biaya yang besarnya tidak tergantung kepada besar kecilnya produksi yang akan dihasilkan, biaya tidak tetap (*variabel cost*) adalah biaya yang besar kecilnya produksi yang akan dihasilkan dipengaruhi oleh volume produksi.

Oleh karena itu dengan adanya penelitian yang membandingkan konsep usahatani konvensional dan yang menerapkan SRG ini diharapkan dapat membantu pihak terkait khususnya petani dalam pengambilan keputusan untuk menjalankan atau menerapkan sistem usahatani yang mana lebih menguntungkan bagi petani. Berikut kerangka berfikir pada analisis pendapatan usahatani padi dengan menerapkan Sistem Resi Gudang di Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus.



Gambar 5. Kerangka pemikiran pendapatan usahatani padi dengan menerapkan Sistem Resi Gudang di Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus.

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Konsep Dasar dan Definisi Operasional

Konsep dasar dan definisi operasional ini mencakup pengertian yang digunakan untuk mendapatkan data dan melakukan analisis sehubungan dengan tujuan penelitian.

Usahatani adalah suatu proses atau aktivitas produksi pertanian dengan mengkombinasikan berbagai faktor sumber daya alam, tenaga kerja, modal dan ketrampilan dengan tujuan menghasilkan produksi dan pendapatan di sektor pertanian.

Usahatani padi adalah bentuk usahatani yang dilakukan untuk menghasilkan produksi padi yang bertujuan menghasilkan keuntungan bagi petani.

Petani padi adalah individu atau sekelompok orang yang melakukan usahatani di bidang pangan khususnya tanaman padi guna memenuhi kebutuhan sebagian atau secara keseluruhan dalam hidupnya.

Sawah adalah suatu bentuk pertanian yang dilakukan di lahan basah dan memerlukan banyak air baik sawah irigasi, sawah lebak, sawah tadah hujan

maupun sawah pasang surut, diukur dalam satuan hectar (ha).

Penerimaan adalah nilai hasil yang diperoleh petani yang dihitung dengan mengalikan jumlah produksi dikalikan dengan harga jual diukur dalam satuan rupiah (Rp).

Pendapatan usahatani padi adalah penerimaan yang diperoleh petani dikurangi biaya yang dikeluarkan selama proses produksi, dalam hal ini biaya pembelian pupuk, bibit, upah, tenaga kerja, sewa lahan, pajak lahan dan biaya penyusutan alat – alat pertanian dalam satu kali musim tanam diukur dalam satuan rupiah per tahun (Rp/th).

Pengeluaran adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh seluruh anggota keluarga rumah tangga petani, yang meliputi pengeluaran pangan dan non pangan yang diukur dengan satuan rupiah (Rp/th).

Biaya total adalah jumlah uang yang harus dikeluarkan oleh petani untuk melakukan usahatani meliputi biaya tetap dan biaya variabel yang diukur dalam satuan rupiah (Rp).

Biaya tetap adalah biaya yang besar kecilnya tidak tergantung pada volume produksi. Petani harus membayar biaya ini berapa pun jumlah produksinya.

Biaya variabel adalah biaya yang berhubungan langsung dengan jumlah produksi. Biaya ini merupakan biaya yang dipergunakan untuk membeli faktor – faktor produksi.

Perhitungan R/C adalah perbandingan antara penerimaan yang diterima pelaku usahatani dengan keseluruhan biaya yang dikeluarkan selama berusahatani.

Luas lahan adalah areal/tempat yang digunakan untuk melakukan usahatani di atas sebidang tanah yang diukur dalam satuan hektar (ha).

Status lahan adalah status kepemilikan lahan yang digunakan untuk berusahatani.

Jumlah nilai saprotan adalah banyaknya nilai uang saprotan yang digunakan petani dalam berusahatani yang dinyatakan dalam satuan rupiah (Rp). Cara menghitungnya adalah setiap jenis saprotan yang digunakan oleh petani dikalikan harganya kemudian dijumlah.

Jumlah tenaga kerja adalah banyaknya tenaga kerja yang digunakan dalam proses produksi selama musim tanam. Penggunaan tenaga kerja diukur dalam satuan hari orang kerja (HOK).

Harga panen adalah harga yang diterima oleh petani atas penjualan hasil panen berdasarkan umur tanaman yang diukur dalam satuan rupiah per kilogram (Rp/Kg).

Benih adalah bahan tanam yang digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangbiakkan tanaman yang dapat berupa biji tanaman atau bagiannya.

Produksi adalah jumlah hasil tanaman yang dihasilkan dalam satu musim tanam (satu kali proses produksi) yang diukur dalam satuan kilogram (kg).

Lama berusahatani adalah lamanya petani mengusahakan tanaman sampai dilakukan penelitian, yang diukur dalam satuan tahun (th).

Resi gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang SRG yang diterbitkan oleh pengelola gudang .

Sistem Resi Gudang adalah kegiatan – kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan dan penyelesaian transaksi resi gudang.

Pengelola gudang SRG adalah pihak yang melakukan usaha pergudangan baik gudang milik sendiri maupun milik orang lain, yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang serta berhak menerbitkan resi gudang.

Badan Pengawas Sistem Resi Gudang adalah unit organisasi di bawah Kementerian Perdagangan yang diberi wewenang untuk melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan pelaksanaan Sistem Resi Gudang.

Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) adalah lembaga terakreditasi yang melakukan serangkaian kegiatan untuk menilai atau membuktikan bahwa persyaratan tertentu yang berkaitan dengan produk, proses dan sistem terpenuhi.

Pusat Registrasi adalah badan usaha berbadan hukum yang mendapat persetujuan badan pengawas untuk melakukan penatausahaan resi gudang, yang meliputi pencatatan, penyimpanan, pemindahbukuan kepemilikan,

pembebanan, hak jaminan, pelaporan serta penyediaan sistem dan jaringan informasi.

B. Lokasi Penelitian, Responden dan Waktu Penelitian

Penentuan lokasi dilakukan secara *purposive* (sengaja) karena didasarkan pada pertimbangan – pertimbangan tertentu disesuaikan dengan tujuan penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Lokasi ini dipilih dengan pertimbangan bahwa daerah tersebut dekat dengan letak gudang Sistem Resi Gudang yang beralamat di Desa Tekad, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus.

Responden yang dipilih dalam penelitian ini adalah lembaga – lembaga yang terkait dengan Sistem Resi Gudang seperti pengelola gudang (PT Bhandha Ghara Reksa, Lembaga Penilaian Kesesuaian (PT BPSMB Provinsi Lampung), Badan Pengawas, Bank, Dinas Perdagangan Provinsi Lampung serta petani padi yang menerapkan Sistem Resi Gudang dan petani padi yang tidak menerapkan Sistem Resi Gudang. Penentuan petani responden dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu pengambilan sampel secara acak sederhana (*simple random sampling*) untuk petani padi yang tidak menerapkan SRG dan metode teknik sensus untuk petani padi yang menerapkan SRG.

1. Responden Petani Padi non SRG

Petani responden yang tidak menerapkan SRG berada di Desa Gunung Meraksa dan Desa Sri Menganten. Desa ini dipilih secara *purposive* karena

desa ini mewakili daerah di mana kelompok tani yang paling aktif dan daerah dengan populasi petani padi terbanyak di Kecamatan Pulau Panggung. Pengambilan petani responden didasarkan pada petani yang tergabung didalam suatu gabungan kelompok tani. Populasi kelompok tani padi di Desa Gunung Meraksa berjumlah 115 petani dan populasi kelompok tani padi di Desa Sri Menganten berjumlah 116 petani. Jumlah populasi secara keseluruhan yaitu 231 petani. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode acak sederhana menggunakan rumus perhitungan sampel menurut Sugiarto (2003) diperoleh hasil sebagai berikut:

$$n = \frac{NZ^2S}{Nd^2 + Z^2S^2}$$

Keterangan:

- n : Jumlah sampel
 N : Jumlah populasi 231 (orang)
 Z : Tingkat kepercayaan 95% (1,96)
 S : Varian sampel (5%)
 d : Derajat penyimpangan (5%)

Dengan Perhitungan:

$$n = \frac{231 \times (1,96)^2 \times (0,05)}{231 \times (0,05)^2 + (1,96)^2(0,05)^2}$$

$$n = 76$$

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus di atas diperoleh jumlah sampel sebanyak 76 petani. Kemudian dari jumlah sampel yang didapat, ditentukan alokasi proporsi sampel dengan rumus:

$$n = \frac{Na}{Nab} \cdot nab$$

Keterangan:

n : Jumlah sampel kelompok tani
 nab : Jumlah sampel keseluruhan
 Na : Jumlah populasi kelompok tani
 Nab : Jumlah populasi keseluruhan

Sampel petani padi di Desa Gunung Meraksa:

$$n = \frac{115}{231} \cdot 76$$

$$n = 38$$

Sampel petani padi di Desa Sri Menganten:

$$n = \frac{116}{231} \cdot 76$$

$$n = 38$$

Berdasarkan alokasi proporsional diperoleh hasil sampel untuk petani padi yang tidak menerapkan SRG sebanyak 38 petani di Desa Gunung Meraksa dan 38 petani di Desa Sri Menganten.

2. Responden Petani Padi SRG

Sementara itu pemilihan responden petani yang menerapkan SRG diperoleh menggunakan metode teknik sensus. Berdasarkan data yang diperoleh dari pengelola gudang SRG Kabupaten Tanggamus bahwa petani yang menerapkan SRG di Kecamatan Pulau Panggung yaitu sebanyak enam orang. Berikut daftar petani padi yang menerapkan SRG di Kabupaten Tanggamus dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Responden petani yang menerapkan SRG di Kabupaten Tanggamus

No	Nama	Jumlah Resi	Masa Berlaku	Volume (Kg)	Harga (Rp)	Penerbitan (Rp)
1	Ramdani	3	28 Mei- 27 Juli 2015	16.370	3.800	62.206.000
			10 Juni- 27 Ags 2015	16.079	4.700	75.571.300
			02 Sept- 01 Des 2015	20.017	5.200	104.088.400
2	Masyani	1	26 Ags- 25 Nov 2015	20.030	5.200	104.156.000
3	Seli Sahrudin	2	30 Juni- 30 Juli 2015	15.020	4.700	70.594.000
			10 Ags- 09 Nov 2015	20.050	5.000	100.250.000
4	Murlelah	2	09 Juli- 08 Sept 2015	8.021	4.800	38.500.800
			14 Sept- 13 Des 2015	20.016	5.200	104.083.200
5	Thoharoni	3	28 Mei- 27 Juli 2015	16.079	3.800	61.100.200
			04 Juni- 03 Sept 2015	8.166	4.700	38.380.200
			25 Ags- 24 Nov 2015	20.000	5.300	106.000.000
6	Mat Aini	1	26 Mei- 25 Juli 2015	2.500	3.800	9.500.000
TOTAL		12		182,348		874.430.100

Sumber: PT Bhandha Ghara Reksha Provinsi Lampung (2015b)

Penelitian lapang dilakukan selama dua bulan, dimulai pada bulan April 2016 sampai bulan Mei 2016. Komoditas yang ada di gudang SRG Kecamatan Pulau Panggung ini adalah komoditas gabah, salah satu komoditas pertanian pangan unggulan di Kabupaten Tanggamus.

C. Teknik Pengumpulan dan Jenis Data

Penelitian dilaksanakan menggunakan metode survei, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara langsung. Observasi dilakukan untuk mendapatkan informasi sebanyak – banyaknya dengan pengamatan secara langsung terhadap pelaksanaan program SRG, sedangkan wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan dalam bentuk kuesioner terdiri dari kuesioner untuk pengelola gudang mengenai pelaksanaan SRG dan kuesioner untuk petani padi mengenai pendapatan usahatani, manfaat SRG dan faktor pendukung serta faktor penghambat SRG. Wawancara dilakukan kepada pihak petani dan kepada salah satu karyawan PT Bhandha Ghara Reksa selaku pengelola gudang SRG Kabupaten Tanggamus. Petani yang dimaksud adalah petani yang menerapkan dan tidak menerapkan Sistem Resi Gudang.

Data sekunder merupakan data pendukung data primer yang diperoleh melalui laporan – laporan tertulis dari media massa, lembaga dan instansi yang terkait dengan penelitian ini seperti Dinas Perdagangan, Bappebti, Biro Pusat Statistik, Departemen Pertanian, PT Bhandha Ghara Reksa dan lain – lain.

D. Metode Analisis Data

Untuk menjawab tujuan pertama penelitian ini yaitu menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis tingkat

penerapan pelaksanaan Sistem Resi Gudang dan untuk menjawab tujuan ke dua, ke tiga dan ke empat menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif.

Untuk menganalisis pendapatan petani padi yang menerapkan dan tidak menerapkan Sistem Resi Gudang dapat dilihat berdasarkan penerimaan dan biaya usahatani yang dikeluarkan, analisis R/C digunakan untuk mengetahui tingkat efisiensi usahatani dan analisis uji beda pendapatan digunakan untuk mengetahui perbedaan rata-rata pendapatan usahatani. Untuk menganalisis faktor – faktor petani dalam menerapkan atau tidak menerapkan SRG serta menganalisis manfaat ekonomi dan non ekonomi SRG digunakan metode *Decision Matrix Analysis (DMA)* dan *Value Tree Objective* yang merupakan bagian dari *Decision Matrix Analysis (DMA)*.

Metode pengolahan data kuantitatif dilakukan dengan metode tabulasi dan komputerisasi yaitu menggunakan *software Microsoft Excel 2007*.

1. Metode Analisis Data Tingkat Penerapan Pelaksanaan SRG

Untuk menjawab tujuan pertama yaitu menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis tingkat pelaksanaan Sistem Resi Gudang pada Sistem Resi Gudang di Kabupaten Tanggamus. Data yang digunakan dalam analisis ini merupakan data kualitatif dari hasil wawancara langsung dengan lembaga – lembaga terkait dengan SRG yang dikuantitatifkan dengan metode skor dengan daftar komponen faktor penentu (*impact point*). Komponen dalam penerapan pelaksanaan SRG dibagi dalam lima komponen yaitu sosialisasi SRG kepada petani, kelembagaan SRG, prosedur pelaksanaan SRG, persyaratan

SRG dan spesifikasi gudang SRG. Dalam melakukan analisis deskriptif komponen sosialisasi dipisahkan dengan komponen lainnya. Hal ini dikarenakan perbedaan bobot penilaian antara komponen sosialisasi dengan komponen lainnya.

Penilaian sosialisasi dilakukan dengan teknik *scoring*, di mana penilaian terdiri dari 4 rentang nilai. Nilai tertinggi sebesar 4 diperoleh apabila pelaksanaan sosialisasi SRG kepada petani dilaksanakan sesuai atau mendekati anjuran, nilai 2 dan 3 diperoleh apabila pelaksanaan sosialisasi SRG kepada petani dilaksanakan tidak sesuai anjuran dan nilai 1 diberikan jika pelaksanaan sosialisasi SRG kepada petani tidak dilakukan. Hal tersebut digunakan karena terdapat jumlah frekuensi tertentu yang ditetapkan berdasarkan SOP. Pengukuran pelaksanaan sosialisasi dilakukan dengan cara perbandingan antara SOP yang ada dengan pelaksanaan sebenarnya. Bobot pelaksanaan komponen sosialisasi maksimum adalah sebesar 4. Indikator pelaksanaan komponen sosialisasi dapat dilihat pada kuesioner.

Penilaian komponen kelembagaan SRG, prosedur pelaksanaan SRG, persyaratan pelaksanaan SRG dan spesifikasi gudang SRG dilakukan dengan menggunakan teknik *scoring*. Bobot nilai yang digunakan adalah 0 dan 1. Di mana 0 adalah tidak terpenuhinya SOP dan 1 adalah terpenuhinya SOP. Hal tersebut dilakukan karena pada komponen – komponen tersebut tidak terdapat frekuensi atau selang pelaksanaan yang ditentukan. Bobot pelaksanaan komponen prosedur maksimum adalah sebesar 38, bobot

spesifikasi gudang maksimum adalah sebesar 48. Untuk bobot persyaratan pelaksanaan SRG terbagi menjadi tiga komponen, yaitu komponen persyaratan barang SRG dengan bobot maksimum sebesar 1, komponen persyaratan petani atau kelompok tani dengan bobot maksimum sebesar 5 dan komponen persyaratan mutu barang sebesar 7. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada kuesioner.

Dari perhitungan tingkat penerapan pelaksanaan SRG di Kecamatan Pulau Pangung yang dilakukan oleh responden dilakukan dengan menjumlahkan nilai dari masing – masing faktor penentu yang telah disebutkan. Adapun cara perhitungan persentase (%) tingkat penerapan dari masing – masing komponen penerapan pelaksanaan SRG di Kecamatan Pulau Pangung oleh responden adalah sebagai berikut:

$$\% TPT = \frac{\text{Bobot Aktual}}{\text{Bobot Maksimum}} \times 100\%$$

Keterangan:

% TPT	= Persentase (%) tingkat penerapan teknologi dari komponen teknologi tertentu
Bobot Aktual	= Penjumlahan bobot dan masing – masing sampel untuk komponen teknologi TPT tertentu
Bobot Maksimum	= Bobot maksimum yang dapat diperoleh keseluruhan sampel untuk komponen teknologi TPT tertentu

Selanjutnya, tingkat penerapan pelaksanaan SRG di Kecamatan Pulau Pangung oleh responden diklasifikasikan ke dalam tiga golongan yaitu rendah, sedang dan tinggi, di mana pembagian interval kelas dilakukan

dengan rumus *Sturges*. Rumus *Sturges* merupakan sebuah rumus untuk menentukan jumlah kelas interval kelas yang sebaiknya digunakan dalam pengelompokan data (Supranto, 2008). Rumus *Sturges* dapat dituliskan sebagai berikut:

$$I = \frac{r}{K}$$

Keterangan:

I = Interval kelas
 r = Rentang (selisih nilai terbesar dengan terkecil)
 k = Jumlah interval kelas

Dari rumus tersebut, didapatkan pembagian kelas tingkat penerapan pelaksanaan SRG di Kecamatan Pulau Pangung untuk komponen sosialisasi sebagai berikut:

Rendah = 1.00 – 2.00
 Sedang = 2.01 – 3.00
 Tinggi = 3.01 – 4.00

Dari rumus tersebut, didapatkan pula pembagian kelas tingkat penerapan pelaksanaan SRG di Kecamatan Pulau Pangung untuk komponen kelembagaan SRG, prosedur pelaksanaan SRG, persyaratan pelaksanaan SRG dan spesifikasi gudang SRG sebagai berikut:

Rendah = 0.00 – 0.33
 Sedang = 0.34 – 0.66
 Tinggi = 0.67 – 1.00

2. Metode Analisis Data Pendapatan dan Efisiensi Usahatani

Untuk menjawab tujuan ke dua yaitu menggunakan metode analisis data deskriptif kuantitatif. Pada tujuan ke dua akan dilakukan analisis pendapatan, analisis efisiensi usahatani dan analisis uji beda pendapatan.

a. Analisis Pendapatan Usahatani

Analisis pendapatan bertujuan untuk menganalisis pendapatan petani yang melaksanakan SRG dan pendapatan petani yang tidak melaksanakan SRG. Penerimaan usahatani adalah perkalian antara produksi yang diperoleh dengan harga jual. Total biaya atau pengeluaran adalah semua nilai faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk dalam periode tertentu, baik yang berupa biaya tunai maupun biaya diperhitungkan. Pendapatan atas biaya tunai merupakan selisih antara penerimaan total dengan biaya tunai. Pendapatan atas biaya total merupakan selisih antara penerimaan total dengan biaya total. Rumus perhitungan penerimaan, total biaya dan pendapatan adalah:

$$\begin{aligned} TR &= P \times Q \\ TC &= \text{biaya tunai} + \text{biaya diperhitungkan} \\ \pi \text{ atas biaya tunai} &= TR - \text{biaya tunai} \\ \pi \text{ atas biaya total} &= TR - TC \end{aligned}$$

Keterangan

π	= Pendapatan atau keuntungan (Rp)
TR	= Total penerimaan usahatani (Rp)
TC	= Total biaya usahatani (Rp)
P	= Harga output (Rp/Kg)
Q	= Jumlah output (Kg)

Pendapatan dianalisis berdasarkan biaya tunai dan biaya tidak tunai atau biaya yang diperhitungkan. Biaya tunai digunakan untuk melihat seberapa besar likuiditas tunai yang dibutuhkan petani untuk menjalankan kegiatan usahatani. Biaya tidak tunai digunakan untuk menghitung berapa sebenarnya pendapatan kerja petani jika penyusutan, sewa lahan dan nilai kerja keluarga diperhitungkan.

b. Analisis Efisiensi Usahatani

Pendapatan selain dapat diukur dengan nilai mutlak juga dapat diukur analisis efisiensinya. Salah satu cara mengukur efisiensi suatu usahatani yaitu dengan menggunakan perhitungan imbalan penerimaan dan biaya (R/C). R/C digunakan untuk mengetahui tingkat efisiensi usahatani. Nilai R/C atas biaya tunai dihitung dengan membandingkan antara penerimaan total dengan biaya tunai dalam satu periode tertentu, sedangkan R/C atas biaya total dihitung dengan membandingkan antara penerimaan total dengan biaya total dalam satu periode. Secara matematis perhitungan R/C dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{R}{C} \text{ atas biaya tunai} = \frac{TR}{\text{biaya tunai}}$$

$$\frac{R}{C} \text{ atas biaya total} = \frac{TR}{TC}$$

Keterangan:

R/C = Nisbah antara penerimaan dengan biaya

TR = Total penerimaan usahatani (Rp)

TC = Total biaya usahatani (Rp)

Kriteria penilaiannya adalah:

- a. Jika $R/C > 1$, maka usahatani tersebut menguntungkan karena penerimaan lebih besar daripada biaya total yang dikeluarkan
- b. Jika $R/C = 1$, maka usahatani tersebut berada pada titik impas (*break even point*) yaitu keadaan di mana penerimaan sama dengan biaya total yang dikeluarkan
- c. Jika $R/C < 1$, maka usahatani tersebut tidak menguntungkan (rugi) karena penerimaan lebih kecil daripada biaya total yang dikeluarkan.

3. Metode Analisis Data Faktor Pendukung dan Penghambat Petani dalam Menerapkan atau Tidak Menerapkan SRG

Untuk menjawab tujuan ke tiga dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif kuantitatif didasarkan pada penggunaan model *Decision Matrix Analysis* (DMA). *Decision Matrix Analysis* (DMA) atau disebut juga sebagai *Grid Analysis* merupakan teknik kuantitatif yang dipakai dalam proses pengambilan keputusan. Di mana keputusan tersebut (yang berupa opsi/pilihan) harus diambil berdasarkan beberapa pertimbangan/faktor yang menentukan (ASQ, 2012). Faktor – faktor tersebut dengan nilai tertentu akan menentukan apakah pengambil keputusan harus mengambil suatu pilihan kebijakan.

Tabel 10. *Decision Matrix Analysis* (DMA)

		Faktor yang memengaruhi					
		X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅	Total
Weight (penimbang)							
Pilihan	Menerapkan SRG						
	Tidak Menerapkan SRG						

Berdasarkan Kajian Pemanfaatan Resi Gudang Dalam Perdagangan tahun 2008, yang dilakukan oleh Puslitbang Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan bekerja sama dengan Konsultan PT. ACG, menetapkan faktor – faktor seperti harga komoditi, sarana dan prasarana gudang, biaya terkait SRG, dukungan pemerintah dan pemanfaatan resi gudang mempengaruhi perilaku petani/pedagang dalam menerapkan SRG untuk suatu komoditi. Berdasarkan hal tersebut dalam analisis ini, keputusan untuk menerapkan/tidak menerapkan SRG dipengaruhi oleh berbagai faktor utama sebagai berikut:

- X_1 = Harga komoditi. Di mana kondisi harga suatu komoditi berupa fluktuasi, harga pada saat panen, informasi harga pasar suatu daerah dan penyusutan harga suatu komoditi pada saat panen dan pasca panen.
- X_2 = Sarana dan Prasarana Gudang. Kondisi kelayakan dari sisi kapasitas penyimpanan, jarak gudang ke sentra – sentra petani/pedagang penghasil komoditi, fasilitas penunjang seperti *blower*, *dryer* dan mesin pengayak dan pelayanan operasional dan manajemen gudang.
- X_3 = Biaya Terkait Sistem Resi Gudang. Komponen biaya yang dibebankan kepada pengguna gudang dalam rangka resi gudang antara lain biaya penyimpanan, administrasi, angkut dan bongkar muat dan biaya penyusutan komoditi yang disimpan di gudang.

X_4 = Dukungan Pemerintah. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan untuk mendorong pemanfaatan SRG, berupa kemudahan akses terhadap kredit dari sektor perbankan, sosialisasi penyuluhan kepada petani, bantuan pembangunan fisik gudang dan pendampingan bagi petani dalam menerapkan SRG.

X_5 = Pemanfaatan Resi Gudang. Penggunaan resi gudang oleh petani/pedagang baik untuk jaminan/agunan di bank, dijual/dipindahtangankan ke pihak lain, dijual di pasar lelang maupun disimpan dalam rangka mengharapkan harga yang lebih baik dibandingkan dengan kondisi saat ini.

Pada Tabel 10 sisi baris berisi pilihan yang diambil oleh petani padi apakah mengambil keputusan untuk menerapkan SRG atau tidak menerapkan SRG. Sementara itu, sisi baris berisi faktor – faktor yang mempengaruhi petani dalam mengambil keputusan yang berupa X_1 , X_2 , X_3 , X_4 , X_5 .

Berikut diuraikan langkah – langkah dalam menerapkan *Decision Matrix Analysis* (DMA) atau *Grid Analysis*:

1. Mengisi baris dengan berbagai pilihan yang ada (menerapkan/tidak menerapkan SRG)
2. Mengisi kolom dengan faktor – faktor yang mempengaruhi petani dalam mengambil keputusan terkait dengan penerapan SRG
3. Mengisi kolom isian dengan nilai skala tertentu, mulai dari 1 (tidak berpengaruh) sampai 5 (sangat berpengaruh)

4. Menggunakan angka penimbang (*weight*) dari 1 sampai 5 yang menunjukkan tingkat kepentingan (secara relatif) antara satu faktor dengan faktor lainnya
5. Mengalikan nilai masing – masing faktor dengan angka penimbang
6. Menjumlahkan semua nilai yang ada dalam satu baris, untuk menentukan keputusan yang diambil

4. Metode Analisis Data Manfaat Ekonomi dan Non Ekonomi

Untuk menjawab tujuan ke empat dalam penelitian ini digunakan metode *Value Tree Objective* (Metode Pohon Keputusan). Metode ini merupakan bagian dari *Decision Matrix Analysis* (DMA) untuk mengetahui perspektif petani dalam melihat Sistem Resi Gudang. Apakah SRG dilihat lebih sebagai keuntungan (*benefit*) atau biaya (*cost*). Suatu keputusan bisa dilihat dari berbagai perspektif oleh pengambil keputusan, yang terkait dengan tujuan (*objective*) yang paling tinggi, seringkali terjadi *trade-off* antara berbagai kepentingan/penilaian. Penilaian yang paling atas (*top hierarchy*) adalah nilai keseluruhan dari faktor pembentuk di bawahnya (Department for Communities and Local Government, 2009).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, seluruh keputusan yang diberikan oleh responden dalam penelitian ini diberi penilaian. Skala penilaian dimulai dari 5 (sangat berpengaruh) sampai 1 (tidak berpengaruh). Perspektif manfaat dan biaya dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Perspektif manfaat dan biaya terhadap Sistem Resi Gudang

Perspektif		Variabel	Nilai (1-5)
Manfaat (Benefit)	Manfaat Ekonomis	1. Keuntungan petani 2. Bentuk pembiayaan lainnya yang cepat dan mudah 3. Dapat diagunkan/jaminan	
	Manfaat Non Ekonomis	1. Kekuatan tawar 2. Kepastian kualitas dan kuantitas atas barang yang disimpan 3. Dapat dijadikan alat tukar barang	
Perspektif		Variabel	Nilai (1-5)
Biaya (Cost)	Biaya Ekonomis	1. Biaya Adm dan Penyimpanan 2. Margin yang kecil 3. Jaminan stok gudang tidak layak karena biaya suku bunga lebih tinggi	
	Biaya Non Ekonomis	1. Waktu pengurusan dan prosedur yang berbelit 2. Fasilitas gudang belum Memadai 3. Hasil produksi tidak memenuhi kualitas dan kuantitas yang dapat digudangkan	

Sumber: Hasil berbagai studi literatur

IV. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian

1. Kabupaten Tanggamus

Kabupaten Tanggamus adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Agung Pusat. Kabupaten Tanggamus terbentuk atas dasar Undang – Undang Nomor 2 tanggal 3 Januari 1997 dan pada tanggal 21 Maret 1997 resmi menjadi salah satu dari 11 kabupaten di Provinsi Lampung. Kabupaten Tanggamus terdiri dari wilayah daratan dan wilayah laut dengan luas masing – masing 2.855,46 km² dan 1.799,50 km² di sekitar Teluk Semangka. Topografi wilayah darat merupakan daerah berbukit sampai bergunung, sekitar 40% dari keseluruhan wilayah tersebut memiliki ketinggian dari permukaan laut hingga 2.115 mdpl. Secara geografis, letak Kabupaten Tanggamus berada pada 104°18' hingga 105° 12' BT dan 5°05' hingga 5°56' LS.

Berdasarkan data BPS tahun 2015, penduduk di Kabupaten Tanggamus yang memiliki 20 kecamatan dan 302 pekon ini mencapai 567.172 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 109,13 dan tingkat kepadatan penduduk 198,63 jiwa/km².

Secara administratif, Kabupaten Tanggamus memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Lampung Tengah
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pringsewu
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat

Sektor pertanian khususnya tanaman bahan makanan merupakan penunjang perekonomian terbesar penduduk Kabupaten Tanggamus. Oleh karena itu produktivitas tanaman bahan makanan khususnya padi perlu terus ditingkatkan karena apabila dilihat dari data produksi dan luas panen tanaman padi pada tahun 2014 sedikit mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2013. Berbeda halnya dengan tanaman jagung dan kedelai yang menunjukkan peningkatan.

Selain tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan juga merupakan penunjang perekonomian Kabupaten Tanggamus. Kopi merupakan komoditi utama di Kabupaten Tanggamus. Pada tahun 2014 produksi kopi mengalami penurunan dari 173.745 ton pada tahun 2013 menjadi 27.581 ton pada tahun 2014. Sementara itu, untuk tanaman kakao kondisinya mengalami peningkatan terhadap luas panen tetapi mengalami penurunan produksi pada tahun 2014. Berikut statistik tanaman pangan dan perkebunan Kabupaten Tanggamus tahun 2012 – 2014 dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Statistik tanaman pangan dan perkebunan Kabupaten Tanggamus Tahun 2012 – 2014

Uraian	Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014	
	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)
Tanaman Pangan						
Padi	45.194	241.262	45.967	241.733	39.697	211.148
Jagung	5.643	29.328	2.051	10.338	2.746	13.892
Kedelai	653	762	204	233	1.572	1.810
Tanaman Perkebunan						
Kopi	40.380	24.252	40.827	173.745	43.916	27.581
Lada	8.923	2.180	9.553	7.613	5.844	2.154
Kakao	16.207	5.453	14.875	9.040	14.915	6.947

Sumber: BPS Tanggamus dalam Angka (2015c)

2. Kecamatan Pulau Panggung

Berdasarkan data BPS tahun 2015, Kecamatan Pulau Panggung memiliki luas wilayah sebesar 49.617 ha. Kecamatan Pulau Panggung memiliki 21 desa diantaranya Talang Beringin, Talang Jawa, Gunung Megang, Tanjung Rejo, Tanjung Begelung, Sinar Mulyo, Gunung Meraksa, Pulau Panggung, Tanjung Gunung, Way Ilahan, Sinar Mancak, Batu Bedil, Sumber Mulya, Air Bakoman, Sri Menganten, Tekad, Kemuning, Gedung Agung, Penantian, Muara Dua dan Sindang Marga.

Berdasarkan hasil pengolahan data jumlah penduduk di Kecamatan Pulau Panggung mencapai 39.442 jiwa, terdiri dari penduduk laki – laki sebanyak 19.778 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 19.644 jiwa. Penduduk terbanyak berada di Desa Tekad dengan jumlah penduduk sebanyak 6.846 jiwa, kemudian disusul Desa Gunung Meraksa dengan jumlah penduduk sebanyak 2.600 jiwa dan desa berpenduduk terbanyak ke tiga adalah Desa

Pulau Panggung dengan jumlah penduduk 2.500 jiwa, sedangkan desa dengan penduduk terkecil adalah Desa Sinar Mulyo yang hanya berpenduduk sebanyak 864 jiwa. Kecamatan Pulau Panggung mempunyai batas wilayah administratif sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ulu Belu
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Talang Padang
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sumberejo
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Air Nanningan

Pendapatan penduduk Kecamatan Pulau Panggung sebagian besar dari pertanian dan perkebunan. Untuk lahan sawah terbesar terdapat di Desa Tanjung Begelung dengan luas 148 ha dan untuk luas lahan sawah terkecil terdapat di Desa Tekad dengan luas hanya 35 ha. Luas lahan pekarangan, tegal, ladang maupun perkebunan rakyat Kecamatan Pulau Panggung lebih besar dibandingkan luas sawah karena Kecamatan Pulau Panggung mayoritas lebih banyak mengelola perkebunan dengan hasil kopi dan lada. Kecamatan Pulau Panggung menggunakan lahan sebagai perkebunan rakyat sebesar 56,05%.

a. Desa Sri Menganten

Desa Sri Menganten diresmikan pada tanggal 3 Desember 2011 dan merupakan pemekaran dari Desa Air Bakoman. Jumlah penduduk yang ada di Desa Sri Menganten sebanyak 1.951 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 550 KK dan 90% dari total tersebut berprofesi di sektor pertanian. Desa Sri Menganten memiliki luas lahan sebesar 1.218 ha

meliputi empat dusun yaitu Dusun Tengah, Dusun Babakan Linggar, Dusun Seksi Tujuh dan Dusun Sri Menganten. Mayoritas penduduk di desa ini bermata pencarian petani yang bercocok tanam kopi, lada, coklat dan padi. Keadaan luas panen, produksi dan produktifitas pada komoditas usahatani di Desa Sri Menganten pada tahun 2015 yang dilakukan oleh petani dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Luas panen, produksi dan produktifitas pada komoditas usahatani di Desa Sri Menganten pada Tahun 2015

No	Komoditas	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktifitas (ton/ha)
1	Padi Sawah	86	593,4	6,9
2	Jagung	1	6,4	6,4
3	Kakao	62	74,4	1,2
4	Kopi	103	133,9	1,3
5	Lada	18	16,2	0,9
6	Pisang	23	1.145,4	49,8
7	Mentimun	1	14,32	14,32
8	Tomat/Rampai	1	9,72	9,72
9	Cabe	1	1,5	1,5

Sumber: BP3K Kecamatan Pulau Panggung (2015d)

Tabel 13 menunjukkan bahwa Desa Sri Menganten memiliki potensi yang cukup besar pada sektor pertanian, khususnya untuk pengembangan usahatani kopi dan padi sawah dilihat dari luas panen kopi yang mencapai 103 ha dan luas panen padi sawah mencapai 86 ha. Selain komoditi kopi dan padi, Desa Sri Menganten juga berpotensi dalam mengembangkan usahatani kakao dan pisang.

Kelembagaan kelompok tani di Desa Sri Menganten terdiri dari delapan kelompok tani dan satu Kelompok Wanita Tani (KWT). Berikut

kelembagaan petani, jumlah anggota dan jenis usahatani dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Kelembagaan petani, jumlah anggota dan jenis usahatani di Desa Sri Menganten

No	Nama Kelompok Tani	Jumlah Anggota	Jenis Usahatani				
			TP	HO	BUN	NAK	KAN
1	Jaya Makmur	29	√	√	√	√	-
2	Mitra Tani	27	√	-	√	√	√
3	Sri Mandiri	31	√	√	√	√	-
4	Tunas Jaya	31	√	-	√	√	√
5	Tunas Maju	30	√	-	√	√	√
6	Maju Tani	29	√	-	√	√	√
7	Guyub Rukun	23	√	-	√	√	√
8	Tani Jaya	31	√	-	√	√	-
9	KWT Sri Lestari	40	-	√	-	√	√

Sumber: BP3K Kecamatan Pulau Panggung (2015b)

Keterangan:

TP = Tanaman Pangan

HO = Hortikultura

BUN = Perkebunan

NAK = Peternakan

KAN = Perikanan

b. Desa Gunung Meraksa

Desa Gunung Meraksa diresmikan pada tahun 1968. Luas Desa Gunung Meraksa sebesar 482 ha yang terdiri dari 50 ha lahan sawah, 38 ha lahan pekarangan/pemukiman, 92 ha tegalan/ladang, 295 ha lahan kebun, kolam 1,5 ha dan lain – lain sebesar 2 ha. Terdapat 3 dusun di Desa Gunung Meraksa diantaranya Dusun Gunung Meraksa Atas, Dusun Gunung Meraksa Bawah dan Dusun Kampung Asem. Jumlah penduduk yang ada di Desa Gunung Meraksa sebanyak 2.600 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 1.013 KK dan 54% dari total tersebut berprofesi di sektor

pertanian dan sisanya berprofesi sebagai pedagang, wiraswasta dan pegawai negeri.

Penduduk di desa ini bermata pencarian petani yang bercocok tanam padi, jagung, kopi dan pisang. Luas panen, produksi, produktifitas tanaman pangan hortikultura dan perkebunan di Desa Gunung Meraksa pada tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15. Luas panen, produksi, produktifitas tanaman pangan hortikultura dan perkebunan di Desa Gunung Meraksa pada Tahun 2015

No	Komoditas	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktifitas (ton/ha)
1	Padi Sawah	154	939,4	6,1
2	Jagung	32	176	5,5
3	Kakao	48	384	8
4	Kopi	376	564	1,5
5	Lada	28	196	7
6	Pisang	94	1.692	18
7	Terong	0,5	1,35	2,7
8	Tomat/Rampai	0,5	1,4	2,8
9	Cabe	2	4,8	2,4
10	Ubi Kayu	6	10,8	1,8
11	Ubi Jalar	3	5,1	1,7

Sumber: BP3K Kecamatan Pulau Panggung (2015c)

Tabel 15 menunjukkan bahwa Desa Gunung Meraksa memiliki potensi yang cukup besar pada sektor pertanian, khususnya untuk pengembangan usahatani kopi dan padi sawah dilihat dari luas panen kopi yang mencapai 376 ha dan luas panen padi sawah mencapai 154 ha.

Kelembagaan kelompok tani di Desa Gunung Meraksa terdiri dari tujuh kelompok tani dan satu Kelompok Wanita Tani (KWT). Berikut

kelembagaan petani, jumlah anggota dan jenis usahatani dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 16. Kelembagaan petani, jumlah anggota dan jenis usahatani di Desa Gunung Meraksa

No	Nama Kelompok Tani	Jumlah Anggota	Jenis Usahatani				
			TP	HO	BUN	NAK	KAN
1	Sehati Sejahtera	26	√	-	√	√	√
2	Bina Sejahtera	25	√	√	√	√	√
3	Rukun Damai	24	√	-	√	√	√
4	Makmur	32	√	-	√	√	√
5	Harapan Jaya	22	-	-	√	√	√
6	Makmur I	15	√	-	√	√	√
7	Jaya Abadi	29	√	-	√	√	√
8	KWT Sepakat	25	-	√	-	√	√

Sumber: BP3K Kecamatan Pulau Panggung (2015a)

Keterangan:

- TP = Tanaman Pangan
- HO = Hortikultura
- BUN = Perkebunan
- NAK = Peternakan
- KAN = Perikanan

B. Sistem Resi Gudang

1. Dasar Hukum Sistem Resi Gudang

Pelaksanaan SRG di Indonesia diatur berdasarkan UU No. 9 Tahun 2006.

Pelaksanaan amanat UU No. 9 Tahun 2006 selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2007. Pasal-pasal dan ayat yang termuat dalam PP No. 36/2007 lebih mengarah pada penjelasan teknis sehingga diharapkan dapat mempermudah pengoperasian di lapangan.

Beberapa peraturan pendukung UU No. 9 Tahun 2006 antara lain Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 26/M-DAG/PER/6/2007 yang

menjelaskan jenis komoditas yang dapat disimpan di gudang SRG, yaitu gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, dan rumput laut. Pada tahun 2011, Permendag No. 26/M-DAG/PER/6/2007 dinyatakan tidak berlaku ketika diterbitkan Permendag No.37/M-DAG/Per/11/2011 yang menambahkan komoditas rotan dapat disimpan di gudang SRG. Pada tahun 2013 diterbitkan Permendag No.08/M-DAG/Per/2/2013 dengan tambahan komoditas garam dapat disimpan di gudang SRG. Pada tahun 2016 diterbitkan lagi Permendag No.35/M-DAG/Per/5/2016 yang menambahkan 4 komoditas yang dapat disimpan di gudang SRG yaitu gambir, teh, kopra dan timah.

Untuk pengaturan teknis penyelenggaraan SRG selanjutnya diatur oleh Peraturan Kepala Bappebti. Pada tahun 2007 telah dikeluarkan empat peraturan Bappebti No. 03, 04, 05, 06/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2007 yang mengatur (i) Persyaratan umum dan persyaratan teknis gudang, (ii) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh persetujuan sebagai lembaga penilaian kesesuaian dalam SRG, (iii) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh persetujuan sebagai Pusat Registrasi, dan (iv) Penetapan hari dalam SRG. Pada tahun 2008 dikeluarkan tiga peraturan Bappebti No. 08, 09, 10/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008 yang mengatur tentang (i) Pedoman teknis pengalihan resi gudang, (ii) Pedoman teknis penjaminan resi gudang, dan (iii) Pedoman teknis penyelesaian transaksi resi gudang.

Pada tahun 2009, telah dikeluarkan tiga peraturan Bappebti No. 11, 12, dan 13/ BAPPEBTI/PER-SRG/5/2009 yang mengatur tentang (i) Persyaratan

keuangan bagi Pengelola Gudang, (ii) Tata cara penyampaian laporan Pengelola Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian dan Pusat Registrasi, dan (3) Tata cara pemeriksaan teknis kelembagaan dalam SRG.

Untuk penilaian kualitas aktiva bank umum berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 9/6/PBI/2007. Dalam perjalanannya UU No. 9 Tahun 2006 mengalami beberapa perubahan pada beberapa pasal dan ayat, selanjutnya dilakukan amandemen dengan UU No. 9 Tahun 2011.

2. Sistem Resi Gudang Kabupaten Tanggamus

Gudang SRG Kabupaten Tanggamus terletak di Desa Tekad, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus. Gudang SRG di Kabupaten Tanggamus adalah gudang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus yang dibangun melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Kemendag Tahun Anggaran 2011 dan telah diresmikan pada tanggal 29 Mei 2015. Dalam pelaksanaannya gudang SRG ini dijadikan gudang untuk menyimpan komoditi gabah dan beras yang dikelola oleh pengelola gudang PT Bhanda Ghara Reksa. Kapasitas Gudang SRG di Kabupaten Tanggamus yaitu sebesar 850 ton. Berikut jumlah resi gudang yang telah diterbitkan di gudang SRG Kabupaten Tanggamus dapat dilihat pada Tabel 17.

Tabel 17. Jumlah resi gudang yang diterbitkan pada gudang SRG Kabupaten Tanggamus tahun 2015

No	Bulan	Jumlah Resi Gudang	Volume (Kg)
1	Mei	3	34.949
2	Juni	3	39.265
3	Juli	1	8.021
4	Agustus	3	60.080
5	September	2	40.033
6	Oktober	-	-
7	November	-	-
8	Desember	-	-
Total		12	182.348

Sumber: PT Bhandha Ghara Reksa (2015a)

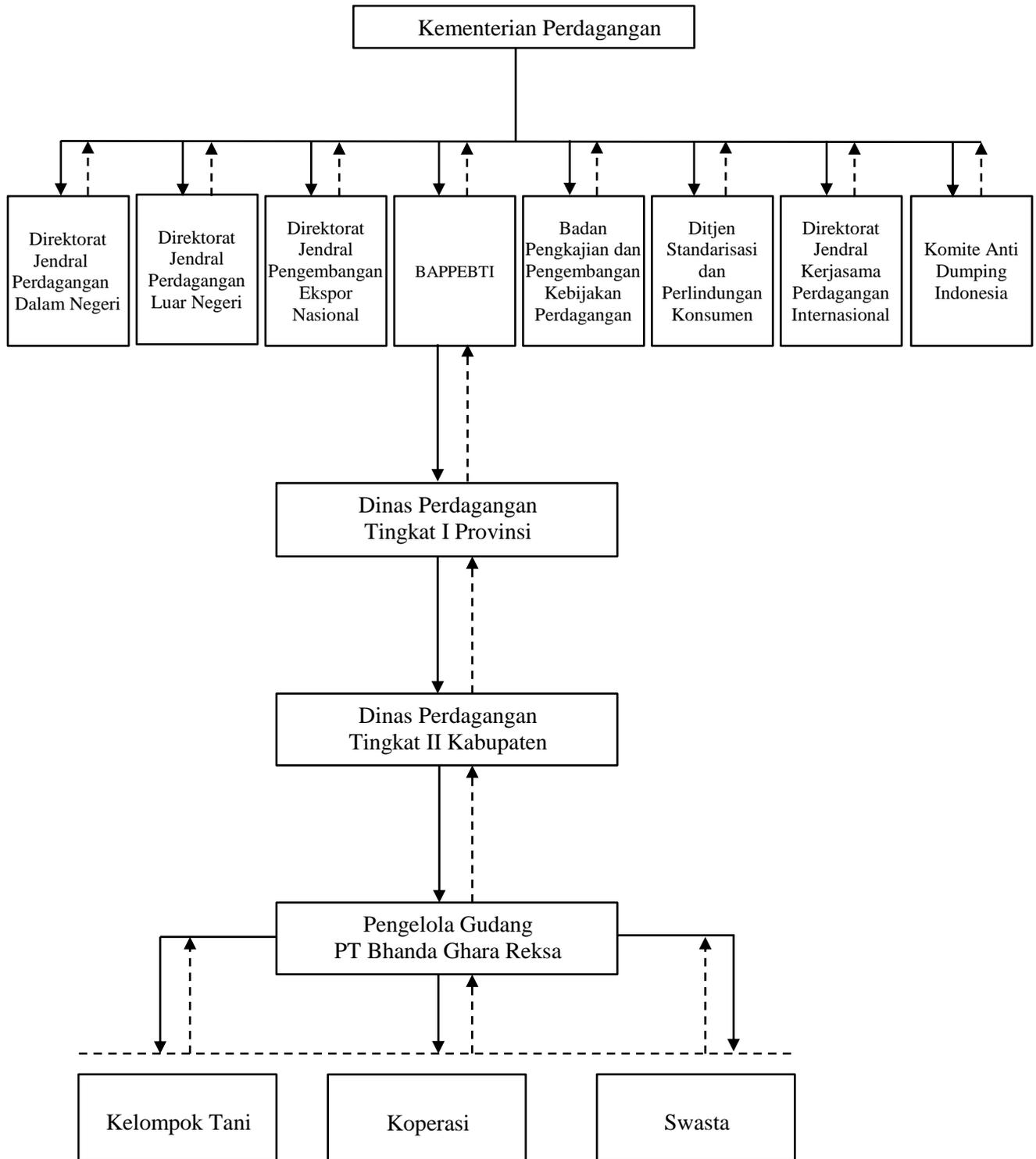
Dapat dilihat pada Tabel 17 penerbitan resi gudang yang ada di SRG Kabupaten Tanggamus berjumlah 12 resi gudang. Hingga September 2015 telah diterbitkan resi gudang pada SRG Kabupaten Tanggamus yang berjumlah 12 resi gudang dengan total volume sebesar 182.348 kg atau 182,348 ton, sedangkan pada bulan oktober sampai bulan desember tidak ada barang yang masuk ke SRG Kabupaten Tanggamus, hanya ada pengeluaran untuk komoditi gabah.

Untuk bisa menjadi gudang SRG suatu gudang harus memiliki persyaratan umum seperti adanya akses jalan, bebas banjir dan longsor. Adapun berdasarkan peraturan Kepala BAPPEBTI 03/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2007, suatu gudang harus memiliki persyaratan teknis sebagai berikut:

1. Konstruksi : Kerangka, atap, dinding, talang air, pintu dan lantai.
2. Fasilitas : Lorong – lorong air, listrik, *hydrant*, penangkal petir dan kantor.
3. Peralatan : Timbangan, palet, hygrometer, thermometer, tangga staple dan pemadam.

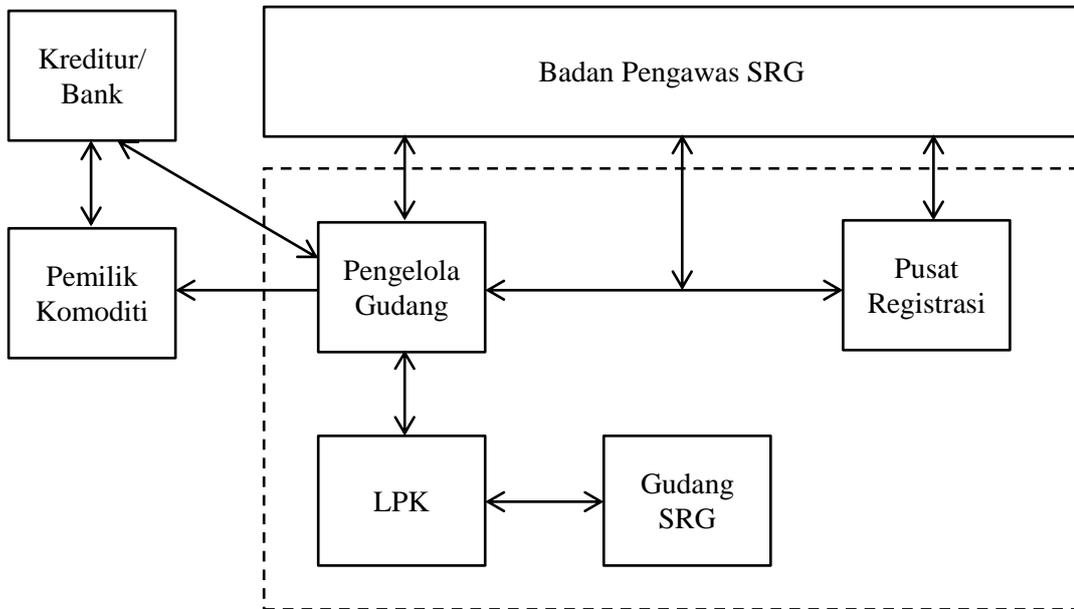
Dalam penerapan SRG, pengelola gudang bertugas untuk menjaga barang yang dititipkan baik dari segi keamanan dan kualitas. Dalam upaya menjaga kualitas barang, pengelola gudang melakukan perawatan dengan fumigasi dan *spraying* untuk mencegah munculnya kutu pada beras atau gabah yang dilakukan sebulan sekali. Gabah dan beras di gudang diletakkan di atas palet atau alas dari kayu. Hal ini dilakukan agar gabah dan beras tidak bersentuhan langsung dengan lantai yang menyebabkan gabah dan beras menjadi lembab. Perawatan yang dilakukan oleh pengelola gudang dilakukan untuk menjaga mutu barang yang dititipkan.

Struktur organisasi SRG adalah sebuah tingkatan koordinasi yang dilakukan dari atas ke bawah, yang dimulai dari Kementerian Perdagangan, BAPPEBTI, Dinas Perdagangan Tingkat I Provinsi, Dinas Perdagangan Tingkat II Kabupaten hingga pengelola gudang. Selanjutnya terdapat jalur koordinasi khusus yang terjadi antara pengelola gudang dengan pelaksana SRG yang terdiri dari kelompok tani, koperasi dan swasta. Adapun jalur laporan yang dilakukan dari bawah ke atas yang terjadi antara pengelola gudang hingga Kementerian Perdagangan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6. Struktur organisasi Sistem Resi Gudang Kabupaten Tanggamus

Sistem Resi Gudang merupakan lembaga yang keberadaannya dapat dimanfaatkan petani dalam melakukan usahatani yang dilakukan. Pemanfaatan jasa SRG ini sangatlah mudah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat seperti skema sebagai berikut:



Gambar 7. Pemanfaatan jasa Sistem Resi Gudang

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui semua transaksi yang ada di SRG semua di bawah pengawasan oleh Badan Pengawas SRG. Alur pemanfaatan SRG dimulai dari pemilik komoditi memasukkan komoditinya kepada pengelola gudang SRG. Kemudian dari pengelola gudang memeriksakan komoditi yang ada untuk dinilai mutunya oleh LPK, setelah mutunya dinilai komoditi yang ada dimasukkan ke dalam gudang dan juga didaftarkan ke Pusat Registrasi. Setelah itu pemilik komoditi memperoleh resi gudang atau semacam surat berharga yang dapat dijadikan agunan kepada pihak bank yang sudah ditunjuk.

V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keadaan Umum Responden

Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 76 petani padi yang tidak menerapkan SRG dan 6 petani padi yang menerapkan SRG di Kecamatan Pulau Pangung, Kabupaten Tanggamus. Pembagian karakteristik tersebut dilihat berdasarkan umur, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, luas lahan, pengalaman usahatani dan jenis pekerjaan sampingan.

Umur adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan petani dalam berusahatani karena mempengaruhi fisik dan pola pikir petani. Pada umumnya petani yang berusia muda memiliki kemampuan fisik yang lebih baik dibanding dengan petani yang berumur relatif tua. Demikian pula dengan pola pikirnya dalam mengadopsi inovasi biasanya petani yang tergolong muda lebih fleksibel dalam usahatannya serta berani mengambil resiko yang akan terjadi untuk meningkatkan usahanya.

Pendidikan senantiasa dijadikan ukuran untuk menilai kemampuan seseorang karena perilakunya sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikannya. Tingkat pendidikan petani umumnya dapat mempengaruhi pola pikir petani dalam penerapan ide-ide baru yang didapat. Petani yang berpendidikan

umumnya lebih mudah menerima inovasi dibanding dengan petani yang tidak berpendidikan atau berpendidikan rendah. Petani yang berpendidikan lebih cepat mengerti dan dapat memahami penggunaan teknologi baru.

Jumlah tanggungan keluarga adalah semua anggota keluarga yang tinggal serumah maupun tidak dengan petani atau siapa saja yang biaya hidup dan kebutuhan lainnya ditanggung oleh petani responden sebagai kepala keluarga. Jumlah tanggungan yang besar menyebabkan besarnya pula beban biaya hidup yang ditanggung petani. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, jumlah tanggungan keluarga petani bervariasi mulai dari 1 hingga 7 orang. Berikut sebaran responden petani padi berdasarkan karakteristik umur, pendidikan dan jumlah tanggungan keluarga di Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus dapat dilihat pada Tabel 18.

Tabel 18. Sebaran responden petani padi berdasarkan karakteristik umur, pendidikan dan jumlah tanggungan keluarga di Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus

No	Uraian	Petani Non SRG		Petani SRG	
		Jumlah (Orang)	Persentase (%)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	Umur (tahun)				
	a. 22-33	6	7,90	0	0,00
	b. 34-45	31	40,79	2	33,33
	c. 46-57	39	51,31	4	66,67
2.	Pendidikan terakhir				
	a. Tidak Tamat SD	8	10,54	0	0,00
	b. SD	11	14,47	0	0,00
	c. SMP	37	48,68	1	16,67
	d. SMA	20	26,31	4	66,66
	e. Sarjana	0	0,00	1	16,67
3.	Tanggungan keluarga (orang)				
	a. 1-2	21	27,63	2	33,33
	b. 3-4	37	48,69	4	66,67
	c. 5-6	16	21,05	0	0,00
	d. >6	2	2,63	0	0,00

Sumber: Data primer, diolah, 2016.

Berdasarkan Tabel 18, diketahui bahwa sebagian besar petani non SRG berada pada karakteristik umur 46–57 tahun dengan jumlah petani 39 orang (51,31%). Pada petani SRG, sebagian besar berada pada kelompok umur 46-57 tahun dengan jumlah petani 4 orang (66,67%). Hal ini menunjukkan bahwa petani di daerah penelitian berada pada usia produktif, di mana petani cukup potensial untuk melakukan kegiatan usahatannya. Kisaran umur produktif adalah antara umur 15–64 tahun (Mantra, 2004). Petani yang berumur produktif pada umumnya mempunyai kemampuan fisik dan kemampuan bekerja yang lebih besar sehingga lebih mudah dalam menerima inovasi baru. Petani yang tidak produktif dalam hal ini petani yang berumur tua, mempunyai kemampuan fisik yang sudah berkurang dan lebih hati – hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan usahatannya.

Berdasarkan pendidikan terakhir, sebagian besar petani non SRG menempuh pendidikan terakhir yaitu SMP dengan jumlah 37 orang (48,68%). Untuk petani SRG, sebagian besar menempuh pendidikan terakhir yaitu SMA dengan jumlah 4 orang (66,66%). Semakin tinggi tingkat pendidikan responden, maka akan mempengaruhi tingkat pengetahuannya serta lebih cepat menguasai dan mampu menerapkan teknologi yang diterima dibandingkan responden yang berpendidikan rendah.

Berdasarkan jumlah tanggungan keluarga, diketahui bahwa jumlah tanggungan keluarga yang ditanggung oleh petani non SRG dominan berada pada kisaran 3–4 orang (48,69%). Begitu juga untuk petani SRG, jumlah tanggungan keluarga yang ditanggung oleh petani SRG dominan berada pada kisaran 3–4

orang (66,67%). Hal ini menunjukkan bahwa jumlah anggota keluarga yang harus ditanggung oleh petani non SRG maupun petani SRG cukup banyak. Besarnya jumlah anggota keluarga tersebut dapat mempengaruhi ketersediaan tenaga kerja dalam keluarga untuk kepentingan usahatani dan untuk kepentingan peningkatan pendapatan rumah tangga. Jika jumlah anggota keluarga banyak berada pada usia produktif, maka ketersediaan tenaga kerja dalam keluarga ini dapat dimanfaatkan untuk menekan biaya penggunaan tenaga kerja luar keluarga, sehingga dapat meningkatkan pendapatan usahatani maupun pendapatan di luar usahatani.

Lahan merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan usahatani. Luas lahan sangat mempengaruhi petani dalam mengambil keputusan dalam hal penggunaan input usahatani. Luas lahan yang besar tentunya dapat menghasilkan produksi yang besar pula jika pemilik lahan memperhatikan faktor – faktor yang ikut berpengaruh terhadap jumlah produksi yang dihasilkan.

Pengalaman usahatani juga merupakan salah satu faktor yang dapat dijadikan penentu dalam keberhasilan usahatani. Semakin banyak pengalaman yang dimiliki petani dalam berusahatani, maka akan semakin terampil melakukan usahatannya.

Responden petani padi di Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus mempunyai pekerjaan sampingan diluar pekerjaan utamanya sebagai petani padi, hal ini agar dapat mencukupi kebutuhan keluarga dan mengisi waktu senggang. Jenis pekerjaan petani padi di Kecamatan Pulau Panggung,

Kabupaten Tanggamus mulai dari pekerjaan tambahan yang masih dalam kegiatan pertanian (*off farm*) maupun di luar kegiatan pertanian (*non farm*). Jumlah produsen yang memiliki pekerjaan sampingan sebanyak 15 petani dari total 76 petani untuk petani non SRG. Untuk petani SRG, yang memiliki pekerjaan sampingan yaitu sebanyak 3 petani dari total 6 petani. Adapun sebaran responden petani padi berdasarkan luas lahan, pengalaman berusahatani dan jenis pekerjaan sampingan di Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus dapat dilihat pada Tabel 19.

Tabel 19. Sebaran responden petani padi berdasarkan luas lahan, pengalaman berusahatani dan jenis pekerjaan sampingan di Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus

No	Luas Lahan (Ha)	Petani Non SRG		Petani SRG	
		Jumlah (Orang)	Persentase (%)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	Luas lahan (hektar)				
	a. < 1	53	69,74	2	33,33
	b. \geq 1	23	30,26	4	66,67
2.	Pengalaman usahatani (tahun)				
	a. 1-10	50	65,79	1	16,67
	b. 11-20	13	17,10	3	50,00
	c. 21-30	10	13,16	2	33,33
	d. 31-40	3	3,95	0	0,00
3.	Jenis pekerjaan sampingan				
	a. Buruh	1	6,66	0	0,00
	b. Pedagang	7	46,67	3	100,00
	c. Peternak	7	46,67	0	0,00

Sumber: Data primer, diolah, 2016.

Berdasarkan Tabel 19 menunjukkan bahwa petani non SRG dengan luas lahan < 1 ha lebih banyak (69,74%) dibandingkan dengan petani non SRG dengan luas lahan \geq 1 ha (30,26%). Untuk petani SRG dengan luas lahan \geq 1 ha (66,67%) lebih banyak dibandingkan dengan petani SRG dengan luas lahan < 1 ha (33,33%). Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas petani

non SRG memiliki luas lahan yang sempit, sedangkan untuk petani SRG, mayoritas memiliki luas lahan yang luas. Luas lahan ini berkaitan erat dengan produksi usahatani.

Berdasarkan pengalaman berusahatani, sebagian besar petani non SRG telah berusahatani selama 1–10 tahun dengan jumlah petani yaitu sebanyak 50 orang (65,79%). Pada petani SRG, sebagian besar telah berusahatani selama 11–20 tahun dengan jumlah petani 3 orang (50,00%). Hal ini menunjukkan bahwa petani padi di Kecamatan Pulau Pangung, Kabupaten Tanggamus memiliki pengalaman yang cukup lama dalam berusahatani padi. Berdasarkan pengalaman tersebut, petani dapat mempertimbangkan bagaimana untung dan rugi dalam berusahatani padi dan mempertimbangkan dalam menerapkan Sistem Resi Gudang.

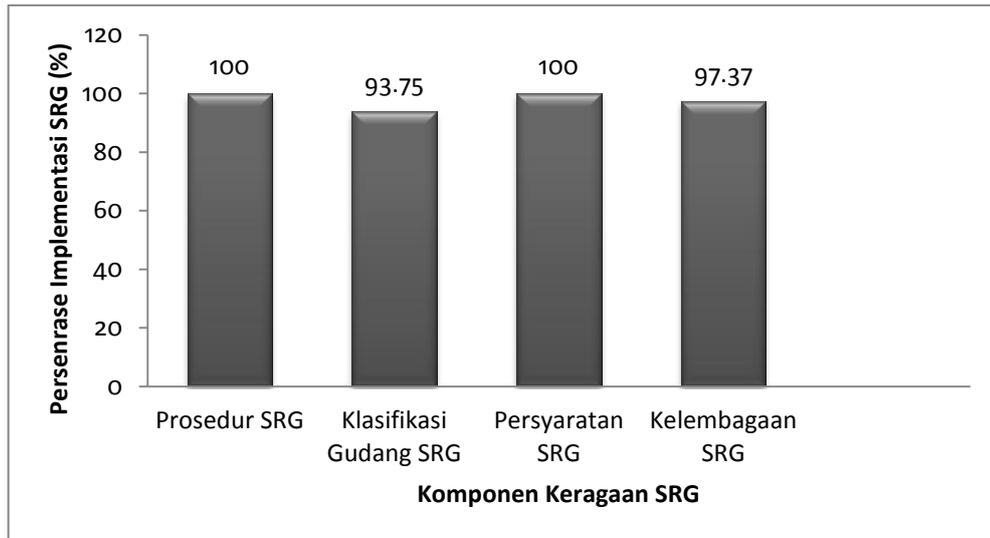
Berdasarkan jenis pekerjaan sampingan, sebanyak 1 petani memilih pekerjaan sampingan sebagai buruh, 7 petani sebagai pedagang, 7 petani sebagai peternak dan sisanya 61 petani memilih berusahatani padi dan kopi sebagai pekerjaan utamanya. Pada petani SRG, terdapat 3 petani yang memilih pekerjaan sampingan sebagai pedagang, dan sisanya bekerja sebagai petani padi dan kopi. Pada umumnya, mayoritas petani non SRG maupun petani SRG memilih pekerjaan sampingan sebagai pedagang untuk menambah penghasilan mereka.

B. Penerapan Pelaksanaan SRG Kabupaten Tanggamus

Pelaksanaan SRG Kabupaten Tanggamus hingga saat ini belum maksimal penggunaannya. Hal ini dikarenakan hambatan sosialisasi kepada petani sehingga kurangnya kesadaran petani untuk memanfaatkan SRG dan masih banyak petani yang menyimpan hasil panen di rumah dibandingkan di gudang SRG. Gudang SRG Kabupaten Tanggamus adalah gudang SRG ke-3 yang telah dibangun di Provinsi Lampung melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Kemendag Tahun Anggaran 2011 dengan kapasitas sebesar 850 ton.

Sejak diresmikan pada tanggal 29 Mei 2015, hanya ada enam petani yang memanfaatkan SRG ini. Padahal sesuai amandemen UU No. 9 tahun 2009 tentang Sistem Resi Gudang, harapannya dapat meningkatkan kesejahteraan petani karena hasil panen dapat disimpan lalu diberikan resi yang dapat dijadikan agunan sehingga petani tidak perlu terburu-buru menjual hasil panen dengan harga rendah. Penggunaan resi gudang oleh enam petani selama tahun 2015 berjumlah 13 resi gudang dengan total volume sebesar 190.478 kilogram dan nilai resi sejumlah Rp905.324.100,00.

Selain sosialisasi, hambatan lainnya dikarenakan sejumlah kondisi gudang yang belum memenuhi syarat. Menurut Bappebti (2015) keragaan pelaksanaan SRG dapat dinilai berdasarkan beberapa komponen yaitu sosialisasi SRG, kelembagaan SRG, prosedur SRG, spesifikasi gudang SRG dan persyaratan SRG. Berikut persentase keragaan pelaksanaan SRG di Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus dapat dilihat pada Gambar 8.



Gambar 8. Persentase realisasi implementasi SRG di Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus

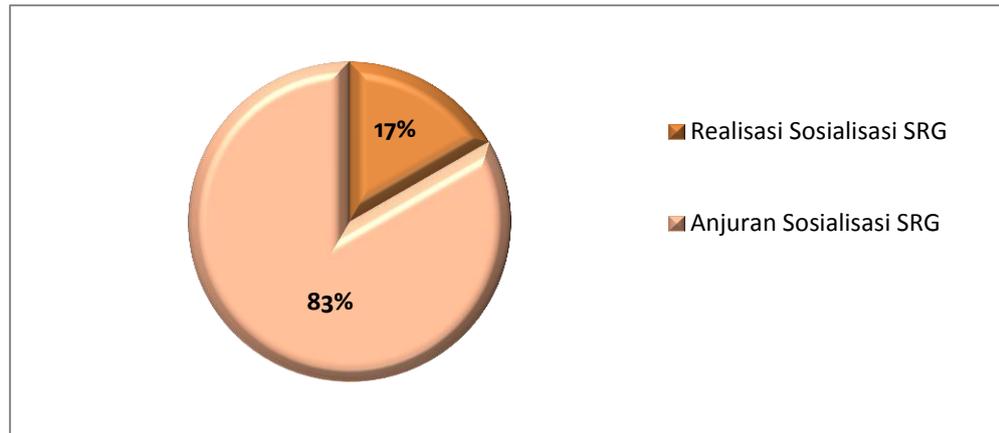
1. Sosialisasi SRG Kabupaten Tanggamus

Pelaksanaan SRG di Kabupaten Tanggamus masih kurang maksimal dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus yang bekerja sama dengan pengelola gudang yaitu PT Bhandha Ghara Reksa. Sosialisasi yang kurang mengakibatkan banyak petani yang tidak menerima informasi mengenai SRG dan masih sedikit petani atau kelompok tani yang menerapkan SRG di Kabupaten Tanggamus.

Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus yang bekerja sama dengan pengelola gudang PT Bhandha Ghara Reksa telah diadakan sebanyak satu kali dalam setahun sejak SRG Kabupaten Tanggamus diresmikan. Sosialisasi dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2015 saat SRG Tanggamus diresmikan. Standar sosialisasi maksimal yang telah ditargetkan dan ditetapkan oleh PT Bhandha Ghara Reksa yaitu sebanyak enam kali dalam setahun.

Petani masih kurang mengerti mengenai pelaksanaan SRG dengan alasan prosedur SRG yang terlalu rumit. Selain itu petani juga tidak dapat memahami manfaat yang didapat dengan mengikuti SRG. Alasan lainnya yaitu petani masih memiliki tradisi pertanian yang turun menurun. Petani lebih memilih menyimpan hasil panennya di rumah masing-masing daripada menyimpannya di gudang SRG. Hal ini menyebabkan petani masih kurang dalam mengadopsi hal-hal yang baru di bidang pertanian meskipun hal tersebut dapat memberikan hasil yang baik untuk petani sendiri.

Permasalahan pendidikan pun menjadi salah satu kendala petani dalam penyampaian SRG. Pola pikir yang masih sederhana menjadikan mereka sulit memahami pelaksanaan SRG. Alur dan proses pelaksanaan SRG yang relatif panjang mengakibatkan SRG sulit dipahami dan dilaksanakan oleh petani. Dari hasil pembagian kelas tingkat penerapan pelaksanaan SRG di Kabupaten Tanggamus untuk komponen sosialisasi dapat dikatakan rendah karena berada pada rentang 1.00 hingga 2.00 di mana sosialisasi hanya dilaksanakan satu kali dalam setahun. Berikut persentase sosialisasi dapat dilihat pada Gambar 9.



Gambar 9. Persentase realisasi sosialisasi SRG di Kabupaten Tanggamus

2. Kelembagaan Gudang SRG Kabupaten Tanggamus

Dalam pelaksanaannya, SRG Kabupaten Tanggamus melibatkan beberapa kelembagaan seperti Kementerian Perdagangan, Pengelola Gudang, Badan Pengawas, Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), Pusat Registrasi, Asuransi dan Perbankan. Kementerian Perdagangan telah menetapkan kebijakan umum mengenai SRG dengan mengeluarkan Undang – Undang No.9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang (SRG) dan telah diamandemen dengan Undang–Undang No.9 Tahun 2011.

Badan Pengawas Sistem Resi Gudang merupakan unit organisasi di bawah Kementerian Perdagangan yang diberi wewenang untuk melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan pelaksanaan Sistem Resi Gudang. Saat ini tugas, fungsi dan kewenangan badan pengawas dilaksanakan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Badan pengawas memberikan persetujuan kepada Pengelola Gudang, LPK dan Pusat Registrasi sekaligus memeriksanya. Selain itu, Badan Pengawas berhak menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan

terhadap semua pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Serta membuat penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis berdasarkan Undang–Undang.

Pengelola gudang merupakan pihak yang melakukan usaha pergudangan baik gudang milik sendiri maupun milik orang lain, yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang serta berhak menerbitkan resi gudang. Sebagai penerbit resi, keberadaan pengelola gudang sangat diperlukan dalam pengembangan Sistem Resi Gudang. Adapun persyaratan pengelola gudang yaitu harus berbentuk badan usaha berbadan hukum, telah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas, dilarang menerbitkan lebih dari satu resi gudang untuk barang yang sama yang disimpan di gudang, wajib membuat perjanjian pengelolaan barang secara tertulis dengan pemilik barang atau kuasanya, memiliki kuasa untuk membuat perjanjian pengelolaan barang yang dibuat dalam bentuk tertulis, wajib menyerahkan bagian barang bercampur kepada pemegang resi gudang sesuai dengan jumlah dan mutu yang tercantum dalam resi gudang, bertanggung jawab atas kesalahan penulisan keterangan dalam resi gudang serta bertanggung jawab atas kehilangan dan kerugian barang yang disebabkan oleh kelalaiannya.

Pengelola gudang di Kabupaten Tanggamus berbentuk Perseroan Terbatas yang telah memperoleh persetujuan sebagai penerbit resi gudang dari Badan Pengawas yaitu PT Bhanda Ghara Reksa (BGR). PT BGR telah mengelola gudang SRG Kabupaten Tanggamus sejak tahun 2015. Sebagai pengelola

gudang, PT BGR telah menjalankan tugasnya dengan cukup baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kinerja PT BGR dirasa kurang aktif dalam menjalankan tugasnya, seperti pengelola gudang yang jarang berada di gudang saat petani hendak menyimpan barang di gudang.

Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) merupakan lembaga terakreditasi yang melakukan serangkaian kegiatan untuk menilai atau membuktikan bahwa persyaratan tertentu yang berkaitan dengan produk, proses dan sistem terpenuhi. LPK bertanggung jawab terhadap kesesuaian antara kondisi komoditas dengan data yang tercantum dalam sertifikat. Kegiatan yang dimaksud mencakup kegiatan sertifikasi, inspeksi dan pengujian yang berkaitan dengan barang, gudang dan pengelola gudang. LPK tidak bertanggung jawab atas perubahan mutu barang yang diakibatkan oleh kelalaian Pengelola Gudang.

Sertifikat yang diterbitkan LPK sekurang–kurangnya memuat nomor dan tanggal penerbitan, identitas pemilik barang, jenis dan jumlah barang, sifat barang, metode pengujian mutu barang, tingkat mutu dan kelas barang, jangka waktu mutu barang dan tanda tangan pihak yang mewakili lembaga. Lembaga Penilaian Kesesuaian untuk SRG Kabupaten Tanggamus yaitu PT BPSMB Provinsi Lampung yang telah sesuai dengan UU No. 9 Tahun 2011.

Pusat Registrasi merupakan badan usaha berbadan hukum yang mendapat persetujuan badan pengawas untuk melakukan penatausahaan resi gudang, yang meliputi pencatatan, penyimpanan, pemindahbukuan kepemilikan, pembebanan hak jaminan, pelaporan serta penyediaan sistem dan jaringan

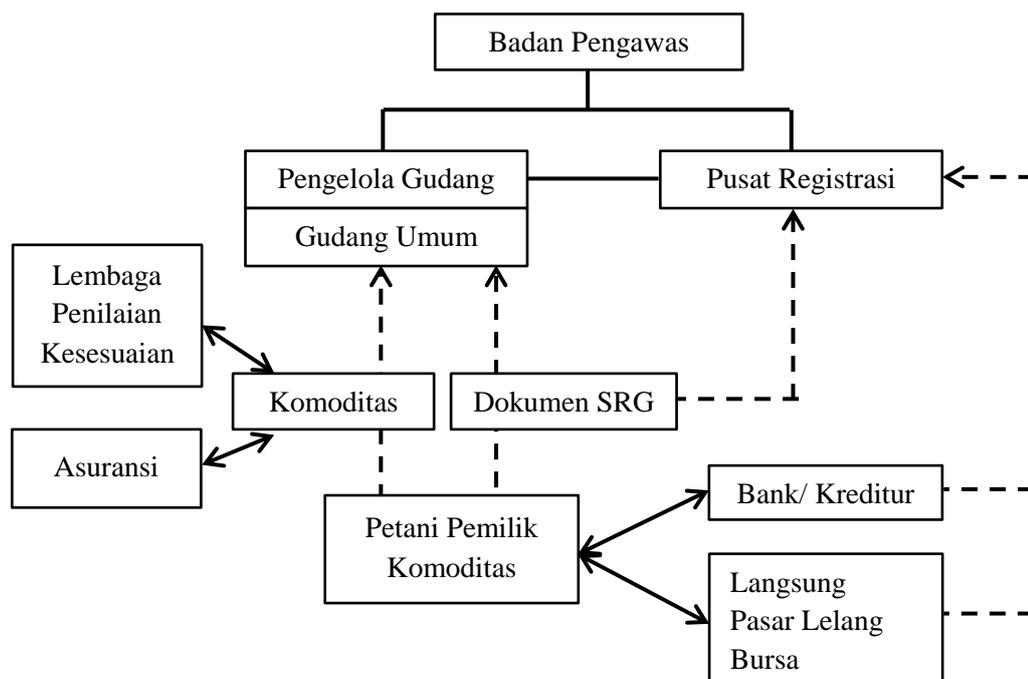
informasi. Penatausahaan dilakukan untuk menjamin keamanan dan keabsahan gudang, karena setiap pihak yang menerbitkan, mengalihkan dan melakukan pembebanan hak jaminan atas resi gudang wajib melaporkan tindakannya kepada pusat registrasi. Saat ini pusat registrasi dalam Sistem Resi Gudang yang telah disetujui Bappebti yaitu PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI).

Lembaga keuangan merupakan lembaga yang berfungsi menerima resi gudang sebagai jaminan atas pinjaman atau hutang pemilik resi gudang. Pembiayaan resi gudang dilakukan oleh bank yang memberikan perkreditan bagi pelaksana SRG jika ingin mengagunkan resinya ke bank. Bank yang memberikan perkreditan untuk SRG Kabupaten Tanggamus adalah Bank Jawa Barat, Bank Lampung dan Bank BRI. Namun, yang menjadi kendala dalam pembiayaan SRG Kabupaten Tanggamus yaitu lokasi Bank BJB yang jauh dari tempat tinggal petani. Kendala lainnya yaitu masih kurangnya kepercayaan perbankan untuk memberikan pembiayaan terhadap SRG Kabupaten Tanggamus.

Hubungan kelembagaan antara pemerintah pusat dan daerah diatur dalam rangka pembinaan dan pengembangan SRG. Urusan pemerintah pusat antara lain mencakup penyusunan kebijakan nasional untuk mempercepat pengembangan SRG, melakukan koordinasi antar sektor pertanian, keuangan, perbankan dan sektor terkait lainnya untuk pengembangan SRG dan memberikan kemudahan bagi sektor usaha kecil dan menengah serta kelompok tani untuk berperan serta di dalam SRG. Urusan pemerintah

daerah antara lain mencakup pengembangan komoditas unggulan daerah, penguatan peran pelaku usaha ekonomi kerakyatan untuk mengembangkan SRG dan memfasilitasi pengembangan pasar lelang komoditas.

Berdasarkan tugasnya, kelembagaan antara pemerintah pusat dan daerah sudah memenuhi tugasnya dengan cukup baik. Namun, pada kenyataannya SRG Kabupaten Tanggamus masih kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah setempat. Seharusnya diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan kelembagaan SRG lainnya agar pelaksanaan SRG Kabupaten Tanggamus dapat berjalan dengan optimal. Dari hasil pembagian kelas tingkat penerapan pelaksanaan SRG di Kabupaten Tanggamus untuk komponen kelembagaan dapat dikatakan tinggi karena berada pada rentang 0.67 hingga 1. Berikut Bagan koordinasi Kelembagaan SRG dapat dilihat pada Gambar 10.

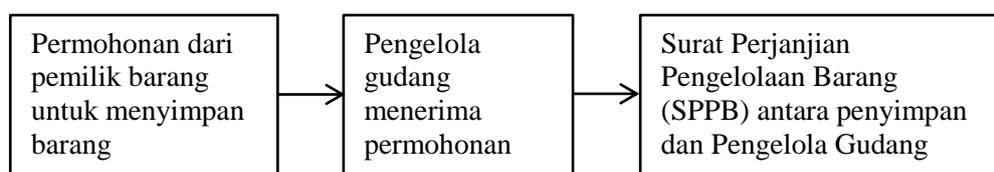


Gambar 10. Bagan koordinasi kelembagaan SRG (PT BGR, 2016).

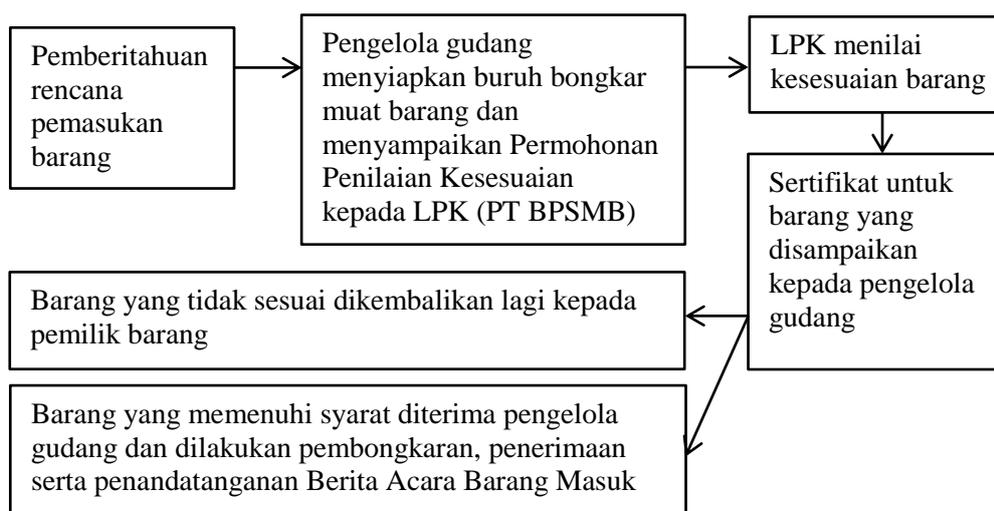
3. Prosedur Pelaksanaan SRG Kabupaten Tanggamus

Prosedur pelaksanaan SRG yang ditetapkan oleh SRG Kabupaten Tanggamus dimulai dari pemilik barang membuat permohonan barang ke gudang, kemudian pengelola gudang (PT BGR) menerima permohonan dan menyiapkan tempat kosong untuk barang tersebut. Selanjutnya pengelola gudang membuat permohonan ke Lembaga Penilaian Kesesuaian (PT BPSMB) untuk melakukan penilaian kesesuaian barang yang akan disimpan. Dalam hal ini PT BPSMB selaku LPK memberikan sertifikat uji mutu barang jika barang tersebut telah memenuhi syarat untuk penyimpanan ke gudang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 11.

1. Penyimpanan Barang



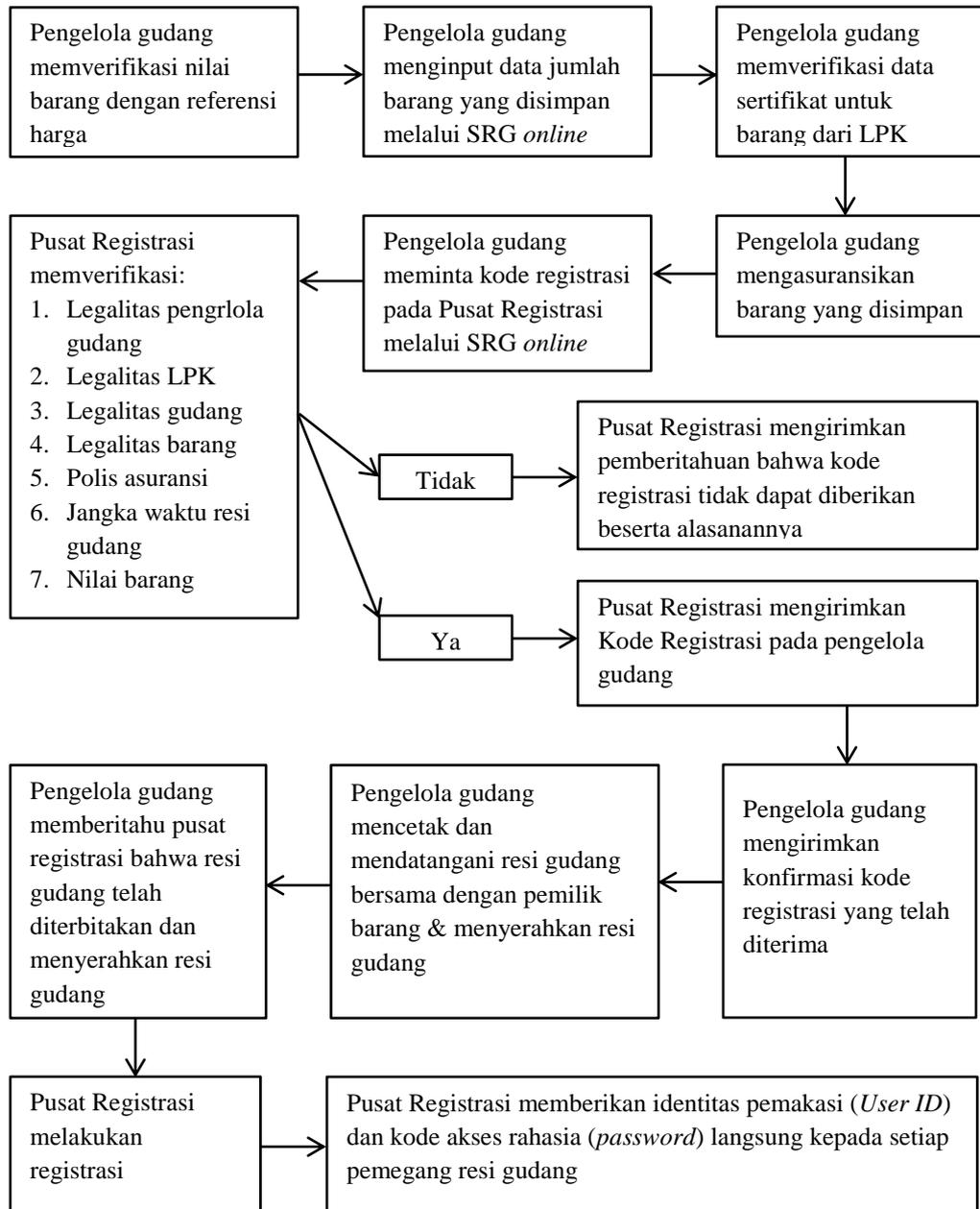
2. Penerimaan Barang



Gambar 11. Prosedur penyimpanan dan penerimaan barang SRG (PT BGR, 2016)

Setelah barang memenuhi syarat, pengelola gudang menginput data mengenai jumlah barang yang disimpan melalui SRG *online*. Pengelola gudang kemudian meminta polis asuransi gudang SRG Kabupaten Tanggamus. Setelah itu pengelola gudang meminta kode registrasi ke Pusat Registrasi (PT KBI) untuk penerbitan resi melalui SRG *online*. Saat itu pengelola gudang mendapatkan nomor token dari pusat registrasi mengenai kode registrasi yang telah disetujui oleh pusat registrasi.

Setelah sekitar satu sampai dua jam, resi gudang tersebut terbit dan diserahkan kepada pemilik barang. Selanjutnya pemilik barang dan pengelola gudang menandatangani resi tersebut. Setelah resi gudang dipegang oleh pemilik barang, pemilik barang berhak memilih apakah resi tersebut diagunkan ke bank untuk memperoleh modal atau resi tersebut disimpan saja untuk surat berharga. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 12.



Gambar 12. Prosedur penyimpanan dan penerimaan barang SRG (PT BGR, 2016).

Selanjutnya pemilik barang dapat memilih untuk mengajukan kredit kepada bank yang akan dipilih dengan cara mengagunkan resi gudangnya.

Pertama-tama pemilik barang membuat surat pengajuan kredit kepada pihak bank dengan menyertakan resi gudang dan bank melakukan proses permohonan tersebut dengan melakukan survei barang ke gudang untuk

membuktikan kebenaran dari resi gudang tersebut dan melakukan verifikasi ke pusat registrasi bahwa resi gudang tersebut belum dibebani hak jaminan. Setelah akad kredit pengikatan jaminan serta pencatatan pembebanan hak jaminan dilakukan ke pusat registrasi, maka kredit dapat direalisasikan. Perjanjian kredit berisikan apabila harga komoditas baik dan pemilik barang ingin menjual barang, maka dapat berhubungan langsung dengan pedagang atau pembeli dan dibuat kontrak jual beli.

Setelah tiga bulan kemudian saat harga membaik, pengelola gudang memberitahukan pemilik barang untuk segera mengeluarkan barangnya. Begitu pembeli atau pedagang sudah ada dan melihat barang tersebut, pembeli atau pedagang tersebut langsung membayarkan barang tersebut kepada pemilik barang sesuai dengan harga yang dinegosiasikan di gudang dan pengelola gudang dapat mengeluarkan barang tersebut. Setelah itu, pemilik barang membawa uang hasil penjualan barang ke bank untuk menebus resi dan mengembalikan dana kredit sebesar 70% yang diberikan bank. Bank memberikan surat pengeluaran barang kepada pengelola gudang dengan persetujuan debitur. Pemilik barang kemudian memberikan surat tersebut kepada pengelola gudang dan pengelola gudang melakukan input berita acara barang keluar ke pusat registrasi. Dari hasil pembagian kelas tingkat penerapan pelaksanaan SRG di Kabupaten Tanggamus untuk komponen prosedur dapat dikatakan tinggi karena berada pada rentang 0.67 hingga 1.

4. Spesifikasi Gudang SRG Kabupaten Tanggamus

Gudang SRG di Kabupaten Tanggamus adalah gudang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus yang dibangun melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Kemendag Tahun Anggaran 2011 dan telah diresmikan pada bulan Mei 2015. Kapasitas Gudang SRG di Kabupaten Tanggamus yaitu sebesar 850 ton. Gudang yang digunakan adalah untuk penyimpanan komoditi pertanian yaitu gabah. Gudang dengan alamat di Desa Tekad, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus adalah gudang dengan status kerjasama dengan pengelolaan gudang yaitu PT Bhandha Ghara Reksa. Gudang SRG Kabupaten Tanggamus telah memenuhi standar dengan persentase 93,75%.

Kondisi gudang yang telah memenuhi standar dengan cukup baik tetap memiliki beberapa kelemahan dan kekurangan yang cukup berpengaruh terhadap pelaksanaan SRG di Kabupaten Tanggamus yaitu tidak dirawatnya gudang dengan baik mengakibatkan barang yang disimpan menjadi rusak dan mengalami banyak penyusutan, ventilasi tidak ditutup dengan jaring kawat penghalang yang dapat menyebabkan gangguan burung, tikus dan lainnya yang mengakibatkan komoditas gabah yang disimpan mengalami penyusutan. Selain itu, tidak adanya beberapa fasilitas kantor seperti fasilitas telepon dan P3K. Hal ini dapat menghambat pengelola gudang dalam melakukan pekerjaannya.

Spesifikasi gudang tersebut kurang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Peraturan Kepala Bappebti Nomor 03/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2007.

Sejumlah persyaratan teknis harus dipenuhi gudang sebagai tempat penyimpanan komoditi yang baik. Gudang yang dimaksud dalam SRG adalah semua ruangan yang tidak bergerak dan tidak dapat dipindahkan dengan tujuan tidak dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan secara umum. Sejumlah persyaratan umum gudang meliputi lokasinya harus memenuhi persyaratan diantaranya sebagai berikut:

1. Di dekat atau di pinggir jalan kelas I, II, IIIA, IIIB, IIIC atau akses lain melalui perairan untuk memudahkan keluar masuk area gudang sehingga menjamin kelancaran bongkar muat dan distribusi
2. Di daerah yang aman dari banjir dan longsor
3. Jauh dari pabrik atau gudang bahan kimia berbahaya, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan tempat pembuangan sampah atau bahan kimia
4. Terpisahnya dengan bangunan lain di sekitarnya sehingga keamanan dan keselamatan barang yang disimpan lebih terjamin dan tidak mengganggu keselamatan penduduk di sekitarnya
5. Tidak terletak pada tempat bekas pembuangan sampah dan bekas pabrik bahan kimia

Secara teknis konstruksi bangunan gudang harus kokoh demi menjaga mutu dan keselamatan manusia. Kerangka gudang harus terbuat dari besi baja.

Atap gudang dilengkapi atap pencahayaan yang terbuat dari bahan yang cukup kuat seperti seng atau aluminium sehingga tidak mudah bocor.

Dinding bangunannya harus kokoh, lantai terbuat dari beton atau bahan lain

yang kuat dalam menahan beban berat, talang–talang yang menjamin air mengalir lancar, pintunya terbuat dari bahan plat besi atau kayu dilengkapi dengan kunci yang kuat berkanopi untuk menjamin kelancaran keluar masuk barang. Ventilasinya harus ditutup dengan jaring kawat penghalang untuk menghindari gangguan burung, tikus dan lainnya. Bangunan gudang juga mempunyai teralis dengan lebar yang memadai sehingga air hujan tidak mengenai dinding gudang. Disarankan gudang membujur dari timur-barat sehingga sesedikit terkena sinar matahari secara langsung.

Gudang harus memiliki fasilitas seperti pengaturan lorong untuk memberi celah antar barang dan menunjang kelancaran penyimpanan barang maupun akses keluar-masuk barang, instalasi air dan listrik dengan pasokan terjamin sehingga menunjang operasional gudang, instalasi hydrant untuk pencegahan kebakaran, serta alat penangkal petir. Gudang juga dilengkapi dengan ruangan kantor atau ruang administrasi yang dilengkapi sarana komunikasi, sistem keamanan, ruang jaga dan pagar kokoh disekelilingnya, kamar mandi dan WC, fasilitas sandar dan bongkar muat yang memadai bagi gudang yang berlokasi di dekat atau di pinggir akses lain melalui perairan. Tangga stapel juga diperlukan untuk memudahkan penumpukan barang di gudang. Gudang juga harus dilengkapi dengan peralatan alat timbang yang terasah, palet yang kuat untuk menopang tumpukan barang sehingga mutu barang terjaga, hygrometer dan termometer untuk mengukur kelembaban dan suhu udara dalam gudang.

Meski dinilai belum memenuhi standar gudang yang telah ditetapkan, gudang SRG Kabupaten Tanggamus sudah mencapai tingkat kesesuaian fasilitas gudang hingga 93,75%. Permasalahan berupa kurangnya kesesuaian spesifikasi gudang dinilai karena kurangnya perhatian dan kepedulian dari pihak pemerintah daerah dan pengelola gudang serta kondisi manajemen gudang yang kurang baik. Dari hasil pembagian kelas tingkat penerapan pelaksanaan SRG Kabupaten Tanggamus untuk komponen spesifikasi gudang dapat dikatakan tinggi karena berada pada rentang 0,67 hingga 1.

5. Persyaratan SRG Kabupaten Tanggamus

Persyaratan pelaksanaan SRG di Kabupaten Tanggamus sudah sesuai 100% dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bappebti. Hal ini dikarenakan persyaratan merupakan syarat mutlak dalam pelaksanaan SRG, sehingga pelaksana SRG harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Persyaratan pelaksana SRG dibagi menjadi empat, yaitu persyaratan komoditas yang disimpan di gudang, persyaratan mutu barang, persyaratan bagi kelompok tani atau petani dan persyaratan umum permohonan kredit.

Persyaratan komoditas yang disimpan di gudang telah berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 10/M-DAG/PER/02/2013 tentang Barang yang Dapat Disimpan di Gudang dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang. Hingga saat ini terdapat 10 komoditi yang dapat disimpan dalam gudang SRG yaitu gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, rotan dan garam. SRG di Kabupaten Tanggamus adalah

gudang dengan penyimpanan gabah. Komoditi yang disimpan harus memiliki daya simpan paling sedikit tiga bulan serta memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Jumlah minimum komoditi yang diresigudangkan tergantung pada kebijakan Pengelola Gudang. Untuk SRG Kabupaten Tanggamus jumlah minimum komoditi yang disimpan paling sedikit satu kilogram. Setiap komoditi yang akan disimpan di gudang harus memenuhi persyaratan standar mutu SNI yang berlaku. Untuk komoditi gabah harus memenuhi persyaratan SNI 01-0224-1987 dapat dilihat pada Tabel 20.

Tabel 20. Standar mutu komoditi gabah

Komponen Mutu	Kualitas		
	Mutu 1	Mutu 2	Mutu 3
Kadar air (maksimum)*	12.5	14.0	14.0
Gabah hampa (maksimum)*	1.0	2.0	3.0
Butir rusak+butir kuning (maksimum)*	2.0	5.0	7.0
Butir mengapung+gabah muda (maksimum)*	1.0	5.0	10.0
Butir merah (maksimum)*	1.0	2.0	4.0
Benda asing (maksimum)*	-	0.5	1.0
Gabah varietas lain (maksimum)*	2.0	5.0	10.0

Sumber: Bappebti (2012)

*Keterangan: Toleransi maksimum sebesar 2% pada kondisi kelembaban *relative humidity* (RH) sebesar 90%

PT Bhanda Ghara Reksa selaku pengelola gudang telah menetapkan persyaratan bagi kelompok tani atau gapoktan yang ingin melaksanakan SRG. Persyaratan tersebut berupa data kelompok tani atau gapoktan seperti berita acara pembentukan kelompok tani atau gapoktan, susunan anggota pengurus dan surat pernyataan bermaterai sebagai kelompok tani atau gapoktan. Selain itu adanya persyaratan umum dalam permohonan mengajukan kredit kepada bank seperti foto ketua, fotokopi identitas diri dan lain-lain. Dari hasil pembagian kelas tingkat penerapan pelaksanaan

SRG di Kabupaten Tanggamus untuk komponen persyaratan dapat dikatakan tinggi karena berada pada rentang 0,67 hingga 1.

C. Analisis Pendapatan Usahatani

1. Keragaan Usahatani Padi

Usahatani merupakan ilmu yang mempelajari cara-cara petani menentukan, mengorganisasikan dan mengkoordinasikan penggunaan faktor-faktor produksi seefektif dan seefisien mungkin sehingga usaha tersebut memberikan pendapatan semaksimal mungkin (Suratiyah, 2015). Keragaan usahatani padi menjelaskan tentang kegiatan usahatani padi di Kecamatan Pulau Pangung, Kabupaten Tanggamus. Usahatani merupakan usaha yang telah lama diusahakan oleh warga di Kecamatan Pulau Pangung. Hal ini terlihat dari tingkat pengalaman petani yang rata-rata telah mengusahakan padi lebih dari 10 tahun.

Keragaan usahatani dilakukan dengan mengidentifikasi penggunaan input produksi, teknik budidaya dan output yang dihasilkan dari usahatani padi. Padi merupakan produk utama yang diusahakan oleh petani di Kecamatan Pulau Pangung. Usahatani yang dilakukan oleh petani Kecamatan Pulau Pangung dilakukan dalam dua periode setiap tahunnya, yaitu pada MT 1 periode Desember - Maret dan pada MT 2 periode Mei – Agustus.

2. Input Produksi

Sarana produksi atau input yang digunakan pada usahatani padi terdiri dari bibit, pupuk, pestisida dan tenaga kerja. Perincian penggunaan input produksi per hektar pada MT 1 usahatani padi di Kecamatan Pulau Pangung antara petani SRG dan non SRG dapat dilihat pada Tabel 21.

Tabel 21. Rata-rata penggunaan input usahatani padi petani SRG dan non SRG per hektar

No	Komponen Input	Satuan	MT 1		MT 2	
			Jumlah (SRG)	Jumlah (non SRG)	Jumlah (SRG)	Jumlah (non SRG)
1	Bibit	Kg	38,67	30,26	38,00	29,74
2	Pupuk					
	1. Urea	Kg	213,33	203,11	213,33	214,08
	2. NPK	Kg	160,00	135,76	166,67	148,29
	3. SP36	Kg	106,67	87,72	113,33	87,72
	4. KCL	Kg	40,00	41,77	40,00	41,77
3	Pestisida					
	1. Regen	Liter	0,67	1,34	0,93	1,27
	2. Lindomin	Liter	0,80	0,69	0,80	0,71
	3. Sidolaris	Liter	0,40	0,71	0,40	0,75
	4. Starban	Liter	0,67	0,71	0,80	0,71
	5. Fungisida	Liter	0,53	0,46	0,53	0,44
	6. Sidametrin	Liter	-	0,19	-	0,19
	7. Ally	Liter	0,27	-	0,27	-
4	Tenaga Kerja					
	1. TKDK	HKP	7,97	9,14	6,28	9,25
	2. TKLK	HKP	34,65	38,71	32,98	33,89

Sumber: Data primer, diolah, 2016.

a. Bibit

Bibit yang digunakan oleh petani baik petani SRG maupun non SRG adalah bibit yang dibeli di kios saprotan yang ada di Desa Pulau Pangung. Varietas bibit yang digunakan adalah jenis padi ciherang dan mekongga. Pemilihan jenis ini dikarenakan hasil padi tersebut dinilai lebih bagus oleh petani dibandingkan dengan jenis lain. Selain hasil yang bagus, harga jual yang didapat relatif lebih tinggi dibandingkan

varietas padi yang lainnya. Petani juga memilih menanam padi jenis ciherang dan mekongga karena varietas ini merupakan varietas yang cocok untuk ditanam di musim hujan maupun musim kemarau dan lebih tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Berdasarkan Tabel 25, jumlah rata-rata benih per hektar yang digunakan oleh petani non SRG pada MT 1 adalah sebanyak 30,26 kilogram per hektar dan jumlah rata-rata benih per hektar yang digunakan oleh petani SRG pada MT 1 adalah sebanyak 38,67. Pada MT 2, jumlah rata-rata benih per hektar yang digunakan adalah 29,74 kilogram untuk petani non SRG dan 38,00 kilogram untuk petani SRG. Penggunaan jumlah bibit padi akan mempengaruhi total pengeluaran untuk input produksi padi.

b. Pupuk

Pupuk yang digunakan oleh petani responden baik petani SRG dan non SRG cenderung sama. Pupuk yang digunakan terdiri dari dua macam, yaitu pupuk organik (pupuk kandang) dan pupuk anorganik (pupuk urea, NPK, SP36 dan KCL). Pupuk kandang yang digunakan merupakan kotoran sapi yang diperoleh sendiri dari ternak sapi milik petani responden. Pupuk anorganik (pupuk urea, NPK, SP36 dan KCL) diperoleh petani dengan membelinya di kios saprotan yang ada di Desa Pulau Panggung.

Berdasarkan Tabel 25, jumlah rata-rata pupuk per hektar pada MT 1 yang digunakan sebanyak 520 kilogram untuk petani SRG dan 468,36 kilogram untuk petani non SRG. Pada MT 2, jumlah rata-rata pupuk per

hektar yang digunakan sebanyak 533,33 kilogram untuk petani SRG dan 491,86 kilogram untuk petani non SRG. Dengan demikian, rata-rata penggunaan pupuk yang digunakan oleh petani SRG lebih banyak dibandingkan petani non SRG.

c. Pestisida

Pestisida yang digunakan petani tergantung dari petani itu sendiri.

Pestisida yang digunakan petani terdiri dari dua jenis, yaitu pestisida cair dan padat. Penggunaan pestisida dilakukan dengan cara mencampurkan konsentrasi padat ataupun cair, kemudian disemprotkan ke tanaman padi menggunakan *sprayer*. Penyemprotan dilakukan pada pagi hari. Rata-rata penyemprotan pestisida oleh petani dilakukan sesuai dengan keinginan petani tersebut dilihat dari kondisi tanaman padinya. Pada saat penelitian dilakukan banyak lahan sawah petani yang terserang hama dan penyakit. Hama yang banyak menyerang tanaman padi yaitu wereng coklat dan walang sangit. Penyakit yang banyak menyerang tanaman padi adalah penyakit *blas* atau patah leher. Hal ini menyebabkan banyaknya jumlah pestisida yang digunakan oleh petani. Penyemprotan dapat dilakukan tiga hingga empat kali dalam satu masa panen.

d. Tenaga Kerja

Tenaga kerja yang digunakan oleh petani SRG dan petani non SRG terbagi menjadi dua kelompok yaitu tenaga kerja dalam keluarga (TKDK) dan tenaga kerja luar keluarga (TKLK). Penggunaan tenaga kerja baik tenaga kerja dalam keluarga maupun luar keluarga yang

digunakan dalam kegiatan usahatani mulai dari pengolahan lahan, penyemaian bibit, penanaman, pemupukan, penyiangan, penyemprotan pestisida dan pemanenan. Penggunaan tenaga kerja dihitung dengan menggunakan satuan Harian Kerja Pria (HKP). Lama jam kerja tidak ditentukan oleh petani. Petani hanya menginginkan dengan upah yang dibayar suatu jenis pekerjaan bisa selesai dalam satu hari di mana untuk satu HKP adalah delapan jam per hari.

Pada jenis kegiatan penanaman dan pemanenan, sistem pembayaran tenaga kerja dilakukan dengan sistem borongan, yaitu petani akan membayar upah kepada tenaga kerja sesuai dengan luas lahan yang ditanam. Besar upah untuk cara borongan berkisar dari Rp400.000,00 sampai Rp600.000,00 per 0,63 hektar. Untuk kegiatan pemanenan, baik petani SRG maupun non SRG menerapkan cara yang sama dalam pembayaran upah tenaga kerja, yaitu dengan menggunakan cara bawon. Cara pembayaran bawon adalah cara pembayaran bagi hasil di mana tenaga kerja akan mendapatkan satu per enam dari hasil panen petani. Berikut rata-rata penggunaan tenaga kerja petani padi SRG dan non SRG per hektar dapat dilihat pada Tabel 22.

Tabel 22. Rata – rata penggunaan tenaga kerja petani padi SRG dan non SRG per hektar

Jenis Kegiatan	MT 1		MT 2	
	Petani SRG (HKP)	Petani non SRG (HKP)	Petani SRG (HKP)	Petani non SRG (HKP)
TKLK				
a. Pengolahan lahan	3,03	2,97	3,49	3,01
b. Penyemaian bibit	3,60	0,87	2,53	0,94
c. Penanaman	4,96	8,42	4,96	8,67
d. Pemupukan	4,73	3,65	5,20	1,73
e. Penyiangan	8,69	6,38	7,36	3,41

Tabel 22. Lanjutan

Jenis Kegiatan	MT 1		MT 2	
	Petani SRG (HKP)	Petani non SRG (HKP)	Petani SRG (HKP)	Petani non SRG (HKP)
f. Penyemprotan pestisida	2,60	0,96	2,40	0,07
g. Pemanenan	7,04	15,46	7,04	16,06
Jumlah	34,65	38,71	32,98	33,89
TKDK				
a. Pengolahan lahan	0,00	0,13	0,00	0,22
b. Penyemaian bibit	1,28	1,39	0,77	0,95
c. Penanaman	0,00	0,41	0,00	0,19
d. Pupukan	2,12	1,02	1,32	2,35
e. Penyiangan	3,03	3,47	2,95	2,92
f. Penyemprotan pestisida	1,55	2,02	1,24	1,85
g. Pemanenan	0,00	0,71	0,00	0,75
Jumlah	7,97	9,14	6,28	9,25

Sumber: Data primer, diolah, 2016.

Pada Tabel 22 terlihat bahwa pada MT 1 rata – rata penggunaan tenaga kerja luar keluarga untuk petani non SRG (37,55 HKP) lebih besar dibandingkan petani SRG (34,40 HKP). Begitu juga untuk tenaga kerja dalam keluarga petani non SRG (8,78 HKP) lebih besar dibandingkan dengan petani SRG (7,86 HKP). Pada MT 2 rata – rata penggunaan tenaga kerja luar keluarga untuk petani non SRG (32,80 HKP) lebih besar dibandingkan petani SRG (32,79 HKP) dan tenaga kerja dalam keluarga petani non SRG (9,07 HKP) lebih besar dibandingkan dengan petani SRG (6,15 HKP). Dengan demikian, jumlah penggunaan tenaga kerja petani non SRG lebih banyak daripada petani SRG.

e. Alat – Alat Pertanian

Jenis alat pertanian yang digunakan dalam kegiatan usahatani padi adalah cangkul, sabit, golok, gosrok dan sprayer. Cangkul digunakan untuk menggemburkan tanah, arit digunakan untuk menyiangi gulma yang ada di sekitar lahan sawah, sprayer digunakan untuk menyemprotkan

pestisida ke padi, gosrok atau biasa disebut garu yang berfungsi sebagai alat pencabut gulma dan traktor digunakan untuk membajak sawah serta mengemburkan tanah. Peralatan yang digunakan oleh petani responden adalah milik pribadi, kecuali traktor yang didapatkan dari sewa. Metode perhitungan penyusutan alat pertanian yang digunakan adalah metode penyusutan garis lurus. Nilai biaya penyusutan peralatan pertanian yang digunakan dalam kegiatan usahatani padi dihitung ke dalam komponen biaya yang diperhitungkan. Nilai rata – rata penyusutan alat pertanian untuk petani SRG adalah sebesar Rp 124.238,89 dan Rp 126.109,72 untuk petani non SRG.

3. Teknik Budidaya

Teknik budidaya merupakan faktor penting pada usahatani dalam menentukan jumlah output yang diharapkan. Pada usahatani padi, teknik budidaya terdiri dari persiapan lahan, penanaman, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit tanaman (HPT) dan pemanenan.

a. Pengolahan Lahan

Tahap pengolahan lahan dilakukan untuk mengubah sifat fisik tanah agar lapisan yang semula keras menjadi lebih lembut. Hal ini dilakukan juga agar gulma yang ada pada lahan sawah mati dan membusuk menjadi humus. Hal yang dilakukan dalam pengolahan lahan adalah pembajakan, pembajakan dilakukan untuk membuat tanah menjadi gembur dan unsur – unsur hara yang terkandung di dalam tanah bercampur. Setelah pembajakan, lahan dibiarkan sekitar satu hingga dua minggu sambil

menunggu pembersihan besar. Setelah benih siap sekitar dua minggu, bibit dicabut dan lahan diratakan dengan membuat pematang. Pengaturan pematang sawah diupayakan agar tetap baik untuk mempermudah pengaturan irigasi sehingga sawah tidak boros air dan mempermudah dalam perawatan tanaman. Setelah membuat pematang, selanjutnya bibit siap ditanami.

b. Penanaman

Petani di Kecamatan Pulau Panggung menggunakan bibit yang relatif masih muda (12 sampai 20 hari). Penanaman padi yang dilakukan oleh petani ditanam dengan jarak yang teratur. Untuk jarak tanam di Desa Gunung Meraksa serta Desa Sri Menganten jarak tanam antara tanaman padi satu dengan lainnya adalah sekitar 20 atau 25 cm. Sebelum dilakukan penanaman, dua sampai tiga hari sebelumnya lahan sawah telah diberi pupuk dasar terlebih dahulu. Pemberian pupuk dasar dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki struktur dan memberi nutrisi bagi tanah. Pada saat penanaman, bibit padi ditancapkan ke dalam lahan yang sudah digenangi air sedalam 10 sampai 15 cm hingga akar tanaman padi masuk ke bawah permukaan tanah.

c. Pemupukan

Pada kegiatan usahatani padi, pemupukan dilakukan dengan tujuan agar tanaman padi dapat tumbuh optimal dan menghasilkan output yang baik. Pemupukan yang dilakukan oleh petani, baik petani yang menerapkan SRG dan petani non SRG menggunakan pupuk organik (kandang) dan

pupuk anorganik (urea, NPK, SP36 dan KCL). Pemupukan biasanya dilakukan dua hingga tiga kali. Perbedaan pemupukan selama dua atau tiga kali terletak pada pemberian pupuk dasar pada lahan yang sedang diolah pada hari ke 10 hingga 15. Pupuk tersebut berupa pupuk kandang dan pupuk urea. Pemberian pupuk dasar ini tergantung pengalaman petani. Pupuk ke dua diberikan pada tanaman padi berusia 25 sampai 30 hari. Pemberian pupuk ini adalah pupuk berimbang seperti NPK, SP36 dan KCL. Banyaknya pupuk yang diberikan tergantung pada kebiasaan petani masing – masing.

d. Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman

Pengendalian hama dalam kegiatan usahatani padi merupakan salah satu komponen penting yang menentukan keberhasilan usahatani padi.

Pengendalian hama dan penyakit yang dilakukan oleh petani di Kecamatan Pulau Panggung adalah dengan menyemprotkan pestisida menggunakan *sprayer* ke tanaman padi dengan tujuan untuk mencegah dan menanggulangi munculnya hama dan penyakit pada tanaman.

Hama yang menyerang tanaman padi di Kecamatan Pulau Panggung diantaranya hama wereng, walang sangit, tikus, ulat dan keong emas.

Hama wereng adalah hama yang paling banyak menyerang tanaman padi.

Hama wereng menyebabkan tanaman padi menjadi kering dan mati karena wereng menghisap cairan nutrisi yang ada pada tanaman padi.

Penyakit yang menyerang tanaman padi di Kecamatan Pulau Panggung

yaitu penyakit kuning daun yang disebabkan oleh virus dan patah leher pada tanaman padi yang disebabkan oleh jamur.

e. Pemanenan

Kegiatan pemanenan dilakukan pada saat usia padi sudah mencapai 100 hari atau padi dinilai sudah cukup umur dan mencapai kondisi yang diinginkan oleh petani. Cara panen padi yang dilakukan adalah dengan memotong padi menggunakan sabit. Pemotongan padi dilakukan pada bagian atas padi. Hal ini dilakukan karena setelah padi dipotong, padi akan dirontokkan dengan menggunakan mesin perontok. Perontokkan padi dilakukan dengan tujuan untuk melepaskan gabah dari malainya.

4. Analisis Biaya Usahatani Padi

Biaya yang dikeluarkan dalam usahatani terdiri dari dua jenis biaya yaitu biaya tunai dan biaya yang diperhitungkan. Biaya tunai adalah biaya yang dikeluarkan dalam bentuk uang tunai, yang termasuk dalam biaya tunai pada usahatani adalah biaya input usahatani seperti bibit, pupuk, pestisida, biaya sewa alat pertanian, biaya irigasi, biaya TKLK, biaya pajak dan biaya bunga SRG, sedangkan biaya yang diperhitungkan adalah biaya yang dikeluarkan petani tidak dalam bentuk uang tunai seperti biaya penyusutan alat pertanian dan biaya TKDK.

Pada analisis usahatani yang dilakukan terhadap petani responden yang menerapkan SRG, biaya tunai terbesar adalah biaya tenaga kerja luar keluarga (TKLK). Tenaga kerja menjadi komponen terbesar dalam biaya usahatani karena dalam setiap kegiatan usahatani yang dilakukan mulai dari

persiapan lahan hingga pemanenan hampir seluruh petani menggunakan tenaga kerja luar keluarga (TKLK).

Di lokasi penelitian, petani menerapkan pemberian upah dengan sistem harian dan borongan. Sistem pembayaran dengan sistem borongan yaitu petani akan membayar upah kepada tenaga kerja sesuai dengan luas lahan yang ditanam. Upah harian untuk tenaga kerja pria rata – rata sebesar Rp 65.000,00. Besar upah untuk cara borongan berkisar dari Rp 400.000,00 sampai Rp 600.000,00 per 0,63 hektar. Berikut biaya rata –rata usahatani padi petani SRG per hektar dapat dilihat pada Tabel 23 dan Tabel 24.

Tabel 23. Rata – rata biaya usahatani padi petani SRG per hektar di Kecamatan Pulau Pangung pada MT 1

Keterangan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Nilai (Rp)
Biaya Tunai			
Bibit	38,67	12.833,33	439.333,33
Pupuk			
1. Urea	213,33	1.850,00	390.666,67
2. NPK	160,00	2.383,33	375.333,33
3. SP36	106,67	2.316,67	240.666,67
4. KCL	40,00	2.800,00	112.000,00
Pestisida			
1. Regen	0,67	30.000,00	19.333,33
2. Lindomin	0,80	45.000,00	36.000,00
3. Sidolaris	0,40	38.000,00	15.200,00
4. Starban	0,67	35.000,00	23.333,33
5. Fungisida	0,53	48.333,33	25.333,33
6. Sidametrin	-	-	-
7. Ally	0,27	15.000,00	4.000,00
TKLK	34,65	73.333,33	2.517.866,67
Biaya Karung	38,80	2.000,00	77.600,00
Biaya Angkut Panen	38,80	7.500,00	291.000,00
Biaya Angkut Pupuk			10.000,00
Biaya Sewa Alat Tani			
1. Traktor bajak			620.000,00
Biaya Irigasi			43.333,33
Pajak Lahan			16.000,00
Bunga Bank			123.273,33
Total Biaya Tunai			5.356.606,67
Biaya Diperhitungkan			
TKDK	7,97	73,333,33	586.666,67

Tabel 23. Lanjutan

Keterangan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Nilai (Rp)
Penyusutan			
1. Sprayer	1,00		54.844,44
2. Golok	1,00		6.977,78
3. Cangkul	1,00		27.905,56
4. Sabit	1,00		23.200,00
5. Gosrok	1,00		11.311,11
Sewa Lahan			4.500.000
Total Biaya Diperhitungkan			5.210.905,56
Total Biaya			10.567.512,22

Sumber: Data primer, diolah, 2016.

Berdasarkan Tabel 23, terlihat bahwa pada musim tanam satu komponen biaya terbesar untuk petani SRG adalah biaya tenaga kerja luar keluarga (TKLK) yaitu sebesar Rp 2.517.866,67. Biaya terbesar lainnya yaitu biaya pupuk sebesar Rp 1.118.666,67. Komponen biaya lainnya pada analisis usahatani petani yang menerapkan SRG adalah biaya untuk membayar bunga pinjaman dari bank sebesar Rp 123.273,33.

Tabel 24. Rata – rata biaya usahatani padi petani SRG per hektar di Kecamatan Pulau Pangung pada MT 2

Keterangan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Nilai (Rp)
Biaya Tunai			
Bibit	38,00	13.333,33	489.333,33
Pupuk			
1. Urea	213,33	1.850,00	390.666,67
2. NPK	166,67	2.383,33	392.666,67
3. SP36	113,33	2.316,67	256.000,00
4. KCL	40,00	2.800,00	112.000,00
Pestisida			
1. Regen	0,93	31.250,00	28.666,67
2. Lindomin	0,80	45.000,00	36.000,00
3. Sidolaris	0,40	38.000,00	15.200,00
4. Starban	0,80	35.000,00	28.000,00
5. Fungisida	0,53	48.333,33	25.333,33
6. Sidametrin	-	-	-
7. Ally	0,27	15.000,00	4.000,00
TKLK	32,97	73.333,33	2.393.200,00
Biaya Karung	38,86	2.000,00	72.000,00
Biaya Angkut Panen	38,86	7.500,00	270.000,00
Biaya Angkut Pupuk			10.000,00
Biaya Sewa Alat Tani			
1. Traktor bajak			620.000,00

Tabel 24. Lanjutan

Keterangan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Nilai (Rp)
Biaya Irigasi			43.333,33
Pajak Lahan			16.000,00
Bunga Bank			183.953,33
Total Biaya Tunai			5.362.686,67
Biaya Diperhitungkan			
TKDK	7,85	73.333,33	466.933,33
Penyusutan			
1. Sprayer	1,00		54.844,44
2. Golok	1,00		6.977,78
3. Cangkul	1,00		27.905,56
4. Sabit	1,00		23.200,00
5. Gosrok	1,00		11.311,11
Sewa Lahan			4.500.000,00
Total Biaya Diperhitungkan			5.091.172,22
Total Biaya			10.453.858,89

Sumber: Data primer, diolah, 2016.

Pada Tabel 24 menunjukkan bahwa biaya tenaga kerja luar keluarga (TKLK) pada musim tanam ke dua merupakan biaya terbesar yaitu sebesar Rp 2.393.200,00. Biaya terbesar lainnya adalah biaya pupuk sebesar Rp 1.151.333,33. Biaya untuk membayar bunga pinjaman dari bank pada musim tanam ke dua yaitu sebesar Rp 183.953,33. Pada petani yang tidak menerapkan SRG, yang menjadi komponen biaya terbesar pada biaya tunai adalah biaya tenaga kerja luar keluarga (TKLK) dan biaya pembelian pupuk. Berikut biaya rata – rata usahatani padi petani yang tidak menerapkan SRG Kecamatan Pulau Pangung dapat dilihat pada Tabel 25 dan Tabel 26.

Tabel 25. Rata – rata biaya usahatani padi petani non SRG per hektar di Kecamatan Pulau Pangung pada MT 1

Keterangan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Nilai (Rp)
Biaya Tunai			
Bibit	30,26	14.421,05	430.430,24
Pupuk			
1. Urea	203,11	1.900,00	382.518,80
2. NPK	135,76	2.400,00	323.830,41
3. SP36	87,72	2.136,36	186.925,65

Tabel 25. Lanjutan

Keterangan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Nilai (Rp)
4. KCL	41,77	2.800,00	116.959,06
Pestisida			
1. Regen	1,34	28.744,19	37.990,81
2. Lindomin	0,69	44.515,15	30.680,87
3. Sidolaris	0,71	38.000,00	26.984,13
4. Starban	0,71	35.000,00	24.853,80
5. Fungisida	0,46	53.863,64	24.749,37
6. Sidametrin	0,19	35.000,00	6.578,95
7. Ally	-	-	-
TKLK	38,71	68.381,58	2.654.406,85
Biaya Karung	38,47	2.000,00	76.942,36
Biaya Angkut Panen	38,47	7.500,00	288.533,83
Biaya Bagi Hasil/Sakap	114,87	3.510,53	412.489,56
Biaya Angkut Pupuk			10.000,00
Biaya Sewa Alat Tani			
1. Traktor bajak			573.440,64
Biaya Irigasi	1,00		122.100,12
Pajak Lahan	1,00		17.742,27
Bunga Bank	-	-	-
Total Biaya Tunai			5.615.089,81
Biaya Diperhitungkan			
TKDK	9,14	68.381,58	647.940,69
Penyusutan			
1. Sprayer	1,00		73.073,31
2. Golok	1,00		3.842,59
3. Cangkul	1,00		27.751,84
4. Sabit	1,00		17.507,66
5. Gosrok	1,00		3.934,31
Sewa Lahan			3.046.679,20
Total Biaya Diperhitungkan			3.820.729,60
Total Biaya			9.435.819,41

Sumber: Data primer, diolah, 2016.

Berdasarkan Tabel 25, terlihat bahwa pada musim tanam satu komponen biaya terbesar untuk petani non SRG adalah biaya tenaga kerja luar keluarga (TKLK) yaitu sebesar Rp 2.654.406,85. Biaya terbesar lainnya yaitu biaya pupuk sebesar Rp 1.010.233,92

Tabel 26. Rata – rata biaya usahatani padi petani non SRG per hektar di Kecamatan Pulau Pangung pada MT 2

Keterangan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Nilai (Rp)
Biaya Tunai			
Bibit	29,74	14.421,05	424.269,01
Pupuk			
1. Urea	214,08	1.900,00	402.882,21
2. NPK	148,29	2.400,00	354.218,88
3. SP36	87,72	2.136,36	186.299,08
4. KCL	41,77	2.800,00	116.959,06
Pestisida			
1. Regen	1,27	28.744,19	36.424,39
2. Lindomin	0,71	44.515,15	31.620,72
3. Sidolaris	0,75	38.000,00	28.571,43
4. Starban	0,71	35.000,00	24.853,80
5. Fungisida	0,44	53.863,64	23.705,10
6. Sidametrin	0,19	35.000,00	6.578,95
7. Ally	-	-	-
TKLK	33,89	68.381,58	2.325.929,41
Biaya Karung	38,58	2.000,00	77.151,21
Biaya Angkut Panen	38,58	7.500,00	289.317,04
Biaya Bagi Hasil/Sakap	102,34	3.701,52	378.813,56
Biaya Angkut Pupuk			10.000,00
Biaya Sewa Alat Tani			
1. Traktor bajak			573.440,64
Biaya Irigasi			122.100,12
Pajak Lahan			17.742,27
Bunga Bank	-	-	-
Total Biaya Tunai			5.270.708,02
Biaya Diperhitungkan			
TKDK	9,25	68.381,58	649.753,07
Penyusutan			
6. Sprayer	1,00		73.073,31
7. Golok	1,00		3.842,59
8. Cangkul	1,00		27.751,84
9. Sabit	1,00		17.507,66
10. Gosrok	1,00		3.934,31
Sewa Lahan			3.046.679,20
Total Biaya Diperhitungkan			3.822.541,99
Total Biaya			9.093.250,01

Sumber: Data primer, diolah, 2016.

Pada Tabel 26 menunjukkan bahwa biaya tenaga kerja luar keluarga (TKLK) pada musim tanam ke dua merupakan biaya terbesar petani non SRG yaitu sebesar Rp 2.325.929,41 Biaya terbesar lainnya adalah biaya pupuk sebesar Rp 1.060.359,23.

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa biaya tenaga kerja luar keluarga merupakan komponen biaya terbesar dalam melakukan usahatani padi oleh petani SRG maupun non SRG. Komponen biaya tunai yang berbeda dari petani SRG adalah biaya bunga bank atas pinjaman yang diberikan petani. Hal ini menyebabkan total biaya rata – rata usahatani padi petani SRG lebih besar dari pada petani non SRG.

5. Analisis Penerimaan Usahatani Padi

Harga yang diterima petani atas penjualan padi berbeda – beda, hal tersebut dikarenakan perbedaan waktu panen, kualitas padi yang dijual dan metode penjualan hasil padi yang dilakukan. Penerimaan tunai adalah hasil perkalian antara jumlah hasil produksi yang dijual dengan harga yang berlaku saat itu. Pada penelitian ini, hasil usahatani padi petani responden dijual dalam bentuk Gabah Kering Panen (GKP). Berikut penerimaan penjualan padi petani SRG dan non SRG pada MT 1 dan MT 2 dapat dilihat di Tabel 27.

Tabel 27. Total penerimaan rata – rata petani usahatani padi petani SRG dan non SRG per hektar di Kecamatan Pulau Panggung

No	Uraian	MT 1		MT 2	
		Petani SRG	Petani Non SRG	Petani SRG	Petani Non SRG
1	Produksi (Kg)	3.880,00	3.836,68	3.640,00	3.857,56
2	Konsumsi (Kg)	106,67	236,01	106,67	221,39
3	Harga jual (Rp)	4.137,50	3.510,53	4.857,14	3.701,32
4	Total Penerimaan (Rp)	15.692.000,00	12.905.179,62	17.574.666,67	13.771.512,11

Sumber: Data primer, diolah, 2016.

Berdasarkan Tabel 27, terlihat bahwa pada musim tanam pertama jumlah padi yang dijual oleh petani SRG lebih tinggi dibandingkan petani non

SRG. Hal ini dikarenakan jumlah yang diproduksi dan dikonsumsi oleh petani non SRG lebih banyak dibandingkan petani SRG. Dari segi harga jual petani non SRG lebih murah dibandingkan petani SRG.

Pada musim tanam ke dua jumlah padi yang dijual oleh petani SRG dan petani non SRG tidak jauh berbeda. Namun, harga jual petani non SRG lebih murah dibandingkan petani SRG. Hal ini dikarenakan petani non SRG terpaksa harus menjual hasil panennya langsung kepada tengkulak setelah panen raya berlangsung dikarenakan petani tidak memiliki tempat untuk menyimpan hasil panennya dan membutuhkan uang tunai segera untuk memenuhi modal musim tanam selanjutnya serta memenuhi kebutuhan sehari – harinya. Berbeda dengan petani SRG yang memperoleh harga jual lebih tinggi dikarenakan petani SRG melakukan tunda jual dari SRG dan petani memperoleh informasi harga dari PT Bhanda Ghara Reksa selaku pengelola gudang.

6. Analisis Pendapatan Usahatani Padi

Analisis pendapatan usahatani padi menggunakan pendekatan perhitungan penerimaan dan biaya usahatani per hektar per musim tanam. Hal ini dilakukan karena tanaman padi di Kecamatan Pulau Pangung hanya diproduksi sebanyak dua kali dalam satu tahun. Berikut penerimaan dan pendapatan rata – rata usahatani padi per hektar petani SRG dan non SRG pada MT 1 dan MT 2 dapat dilihat pada Tabel 28.

Tabel 28. Perhitungan penerimaan dan pendapatan rata-rata usahatani padi petani per hektar di Kecamatan Pulau Pangung

Komponen	MT 1		MT 2	
	Nilai (Rp) Petani SRG	Nilai (Rp) Petani non SRG	Nilai (Rp) Petani SRG	Nilai (Rp) Petani non SRG
A. Penerimaan Tunai	15.716.000,00	13.317.669,17	17.574.666,67	14.123.224,73
B. Biaya Tunai	5.356.606,67	5.615.089,81	5.362.686,67	5.270.708,02
C. Biaya Diperhitungkan	5.210.905,56	3.820.729,60	5.091.172,22	3.822.541,99
D. Total Biaya (B+C)	10.567.512,22	9.435.819,41	10.453.858,89	9.093.250,01
Pendapatan atas Biaya Tunai (A-B)	10.359.393,33	7.702.579,37	12.211.980,00	8.852.516,71
Pendapatan atas Biaya Total (A-D)	5.148.487,78	3.881.849,76	7.120.807,78	5.029.974,72
R/C atas Biaya Tunai	2,93	2,37	3,28	2,68
R/C atas Biaya Total	1,49	1,41	1,68	1,55

Sumber: Data primer, diolah, 2016.

Berdasarkan Tabel 28, terlihat bahwa pada musim tanam pertama pendapatan atas biaya tunai dan pendapatan atas biaya total yang diterima oleh petani SRG lebih besar daripada pendapatan atas biaya tunai dan pendapatan atas biaya total yang diterima oleh petani non SRG. Rendahnya pendapatan atas biaya tunai dan biaya total yang diperoleh petani non SRG dikarenakan harga yang diterima lebih rendah dibandingkan dengan petani SRG.

Pada musim tanam ke dua terlihat bahwa pendapatan atas biaya tunai dan pendapatan atas biaya total yang diterima oleh petani SRG lebih besar daripada petani non SRG dikarenakan harga yang diterima petani non SRG lebih rendah dibandingkan dengan petani SRG. Dapat disimpulkan pula bahwa usahatani padi petani yang menerapkan SRG lebih menguntungkan dibandingkan dengan petani yang tidak menerapkan SRG.

7. Analisis R/C

Analisis R/C terdiri dari R/C atas biaya tunai dan R/C atas biaya total. R/C atas biaya tunai diperoleh dari rasio antara penerimaan total dengan pengeluaran tunai. R/C atas biaya total diperoleh dari rasio penerimaan total dengan pengeluaran total. Suatu usaha dapat dikatakan menguntungkan dan layak diusahakan apabila nilai R/C lebih besar dari satu ($R/C > 1$), semakin tinggi nilai R/C menunjukkan bahwa penerimaan yang diperoleh semakin besar. Namun apabila nilai R/C lebih kecil dari satu ($R/C < 1$), maka usaha ini tidak menguntungkan sehingga tidak layak diusahakan.

Pada Tabel 8, R/C usahatani padi dibedakan berdasarkan pada petani SRG dan non SRG. Pada musim tanam satu, hasil perhitungan nilai R/C atas biaya tunai pada petani SRG adalah sebesar 2,93 dan nilai R/C atas biaya tunai pada petani non SRG adalah 2,37. Nilai 2,93 untuk petani SRG memiliki arti bahwa setiap pengeluaran tunai sebesar Rp 1,00 akan menghasilkan penerimaan sebesar Rp 2,93. Nilai 2,37 untuk petani non SRG memiliki arti bahwa setiap pengeluaran tunai sebesar Rp 1,00 akan menghasilkan penerimaan sebesar Rp 2,37.

Hasil perhitungan nilai R/C atas biaya total pada petani SRG adalah sebesar 1,49 dan nilai R/C atas biaya total pada petani non SRG adalah 1,41. Nilai 1,49 untuk petani SRG memiliki arti bahwa setiap pengeluaran total sebesar Rp 1,00 akan menghasilkan penerimaan sebesar Rp 1,49. Nilai 1,41 untuk

petani non SRG memiliki arti bahwa setiap pengeluaran total sebesar Rp 1,00 akan menghasilkan penerimaan sebesar Rp 1,41.

Pada musim tanam dua, hasil perhitungan nilai R/C atas biaya tunai pada petani SRG adalah sebesar 3,28 dan nilai R/C atas biaya tunai pada petani non SRG adalah 2,68. Nilai 3,28 untuk petani SRG memiliki arti bahwa setiap pengeluaran tunai sebesar Rp 1,00 akan menghasilkan penerimaan sebesar Rp 3,28. Nilai 2,68 untuk petani non SRG memiliki arti bahwa setiap pengeluaran tunai sebesar Rp 1,00 akan menghasilkan penerimaan sebesar Rp 2,68.

Hasil perhitungan nilai R/C atas biaya total pada musim tanam dua untuk petani SRG adalah sebesar 1,68 dan nilai R/C atas biaya total pada petani non SRG adalah 1,55. Nilai 1,68 untuk petani SRG memiliki arti bahwa setiap pengeluaran total sebesar Rp 1,00 akan menghasilkan penerimaan sebesar Rp 1,68. Nilai 1,55 untuk petani non SRG memiliki arti bahwa setiap pengeluaran total sebesar Rp 1,00 akan menghasilkan penerimaan sebesar Rp 1,55.

Dapat disimpulkan bahwa R/C atas biaya tunai dan R/C atas biaya total petani SRG memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan R/C atas biaya tunai dan R/C atas biaya total petani non SRG. Hal ini disebabkan komponen penerimaan tunai dan penerimaan total petani non SRG lebih rendah dibandingkan petani SRG. Walaupun demikian, usahatani padi petani yang menerapkan SRG dan petani yang tidak menerapkan SRG sama-sama menguntungkan.

D. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Penerapan SRG

Survei pada penelitian ini dilakukan terhadap 83 petani padi di Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus. Responden terdiri dari 76 petani yang belum memanfaatkan Sistem Resi Gudang dan 6 petani yang sudah memanfaatkan Sistem Resi Gudang. Untuk petani padi yang sudah memanfaatkan SRG mayoritas adalah petani yang berlatar belakang pedagang dan mempunyai kepemilikan lahan yang luas dengan rata – rata 1,25 ha, sedangkan petani padi yang belum memanfaatkan SRG adalah mayoritas petani kecil dengan rata – rata kepemilikan lahan 0,63 ha.

Tabel 29. Hasil analisa faktor penentu (*Decision Matrix Analysis*) penerapan SRG Kabupaten Tanggamus

Pilihan		X1	X2	X3	X4	X5	TOTAL
SRG (6 petani)	Total	73,21	64,88	120,88	63,34	67,90	390,21
Non SRG (76 petani)	Total	449,34	798,00	1407,37	1615,21	1408,98	5678,89
Grand Total		522,55	862,88	1528,24	1678,55	1476,88	6069,10

Sumber: Data primer, diolah, 2016.

Berdasarkan Tabel 29, terlihat bahwa faktor utama yang mempengaruhi petani untuk menerapkan SRG adalah X3 yaitu biaya terkait Sistem Resi Gudang dengan nilai total 120,88. Menurut petani yang sudah menerapkan SRG yang menjadi alasan utama untuk menunda hasil panennya adalah biaya yang dikeluarkan untuk penggunaan gudang masih sangat ringan. Komponen biaya seperti biaya penyimpanan, biaya administrasi, biaya pengeringan, biaya penyusutan komoditi dan biaya lainnya masih mendapat subsidi dari pemerintah. Petani hanya perlu membayar biaya bunga saat petani

mengagunkan resi gudangnya di bank. Petani hanya dikenakan bunga 6% per tahun atau 0,5% per bulan dari biaya resi, sisanya ditanggung oleh pemerintah.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap penerapan SRG oleh petani padi di Kabupaten Tanggamus adalah faktor X1 yaitu harga komoditi dengan nilai total sebesar 73,21. Petani berpendapat bahwa penerapan resi gudang untuk gabah sangat dipengaruhi oleh harga pasar gabah yang berfluktuasi, sehingga mereka memilih untuk menyimpan komoditi ke gudang SRG, ketika harga gabah naik petani dapat menjualnya dan begitupun sebaliknya, ketika harga gabah menurun petani menahan untuk tidak menjualnya.

Bagi petani yang belum memanfaatkan SRG, alasan utamanya adalah faktor X4 yaitu dukungan pemerintah dengan nilai total 1615,21. Mayoritas petani padi di Kecamatan Pulau Panggung belum mengetahui mengenai Sistem Resi Gudang meskipun jarak tempat tinggal mereka sangat dekat dengan lokasi SRG. Petani berpendapat bahwa sosialisasi mengenai SRG sangat jarang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat. Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus yang bekerja sama dengan pengelola gudang PT Bhandha Ghara Reksa hanya diadakan sebanyak satu kali dalam setahun sejak SRG Kabupaten Tanggamus diresmikan. Sosialisasi dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2015 saat SRG Tanggamus diresmikan. Sosialisasi yang ditargetkan dan ditetapkan oleh PT Bhandha Ghara Reksa yaitu sebanyak enam kali dalam setahun.

Faktor lain yang cukup berpengaruh terhadap pertimbangan petani di Kecamatan Pulau Panggung untuk tidak menerapkan SRG adalah faktor X5,

yaitu pemanfaatan resi gudang. Petani lebih memilih menyimpan hasil panennya di rumah masing – masing meskipun dengan mengikuti SRG mereka dapat mengagunkan resi gudang ke bank untuk mendapatkan modal musim tanam selanjutnya. Mayoritas petani lebih memilih mengagunkan harta benda mereka untuk mendapatkan modal dibandingkan menggunakan resi gudang. Mereka berfikir prosedur untuk mendapatkan resi gudang sangat rumit dan sulit. Alasan lainnya juga petani lebih memilih menjual langsung hasil panen kepada tengkulak dibandingkan disimpan di gudang SRG dikarenakan mereka membutuhkan modal segera untuk musim tanam selanjutnya. Berikut hasil analisa faktor pendukung dan faktor penghambat petani menerapkan SRG diantaranya sebagai berikut:

1. Faktor pendukung petani dalam menerapkan SRG
 - a. X3, biaya terkait SRG masih sangat ringan
 - b. X1, harga pasar gabah yang berfluktuasi
 - c. X5, resi gudang dapat dijaminkan atau diagunkan ke bank
 - d. X2, sarana dan prasarana gudang
 - e. X4, dukungan atau kebijakan dari pemerintah

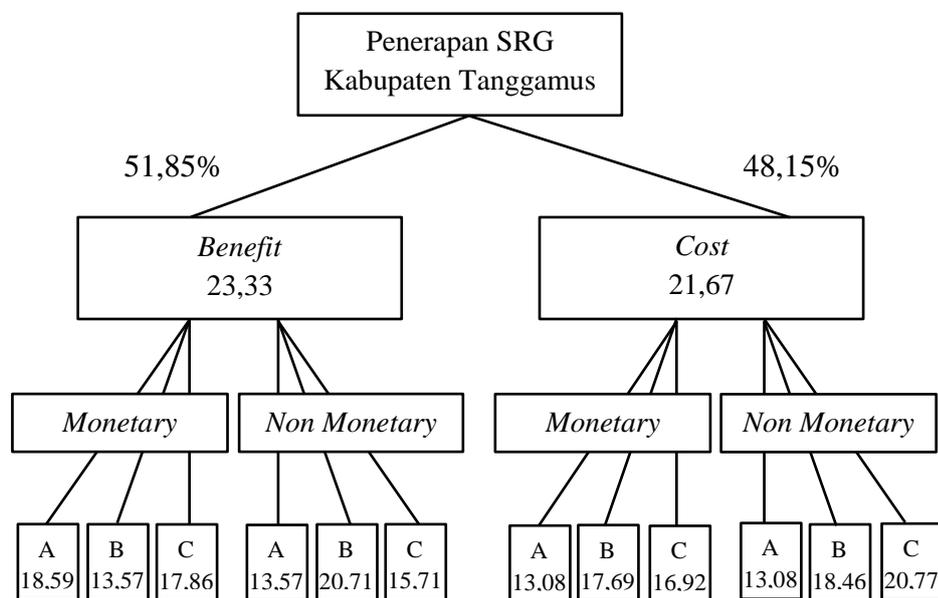
2. Faktor penghambat petani tidak menerapkan SRG
 - a. X4, dukungan pemerintah daerah masih sangat minim karena terbatasnya sosialisasi
 - b. X5, pemanfaatan resi gudang yang rendah, petani masih banyak yang menyimpan hasil panen di rumah
 - c. X3, biaya terkait sistem resi gudang

- d. X2, sarana dan prasarana gudang
- e. X1, harga pasar gabah yang berfluktuasi

Berdasarkan gambaran di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas petani padi di Kecamatan Pulau Pangung yang memanfaatkan SRG masih sangat terbatas dan mayoritas petani tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan SRG.

Seharusnya diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan kelembagaan SRG lainnya dalam mensosialisasikan SRG sehingga informasi SRG ini diketahui dan dipahami oleh petani, sehingga makin banyak petani yang memanfaatkan SRG sebagai sarana peningkatan kesejahteraan bagi petani itu sendiri.

E. Manfaat Ekonomi dan Non Ekonomi Penerapan SRG



Gambar 13. Value Tree Objective Benefit and Cost Persepsi Petani SRG
Sumber: Data primer, diolah, 2016.

Gambar 13 menggambarkan persentase manfaat dan biaya berdasarkan persepsi dari responden yang sudah memanfaatkan SRG. Pada umumnya, penerapan SRG di Kabupaten Tanggamus lebih menggambarkan persepsi manfaat dibandingkan persepsi biaya. Hal tersebut terlihat dari nilai persentase persepsi manfaat yang lebih tinggi yaitu 51,85 persen dibandingkan dengan persentase biaya 48,15 persen. Untuk persepsi manfaat ataupun biaya terbagi menjadi sisi ekonomi dan non ekonomi.

Pada persepsi manfaat dari sisi ekonomi terdapat 3 persepsi yaitu keuntungan petani, bentuk pembiayaan yang mudah dan cepat serta resi dapat diagunkan atau dijaminkan. Persepsi pertama memiliki nilai sebesar 18,57 persen. Hal ini berarti sebanyak 18,57 persen petani beranggapan bahwa penerapan SRG memberikan dampak positif berupa keuntungan petani (finansial) dengan cara menunda penjualan daripada menjualnya langsung pada saat panen raya, sambil menunggu harga membaik kembali. Menurut petani, dengan menunda jual hasil panennya, mereka mendapatkan margin keuntungan antara Rp100-200 per kg. Keuntungan tersebut didapatkan petani dengan menunda jual sekitar satu sampai tiga bulan di gudang SRG.

Persepsi yang ke dua yaitu resi gudang dapat dijaminkan atau diperjualbelikan memiliki nilai sebesar 17,86 persen. Berdasarkan nilai tersebut dapat diasumsikan bahwa terdapat 17,86 persen petani menganggap bahwa resi gudang dapat menjadi agunan sehingga memberikan keuntungan yang bersifat finansial bagi petani. Petani juga beranggapan bahwa dengan memiliki resi gudang maka petani akan merasa aman karena resi gudang dapat dijadikan

sebagai jaminan ke bank untuk memperoleh dana tunai yang digunakan untuk keperluan sehari – hari dan modal usaha di musim tanam selanjutnya.

Persepsi yang ke tiga yaitu SRG sebagai bentuk pembiayaan lainnya yang cepat dan mudah memiliki nilai sebesar 13,57 persen, di mana hal ini berarti sebanyak 13,57 persen petani memiliki persepsi bahwa SRG dapat prosedur dan mekanisme resi gudang bukanlah hal yang rumit. Petani memiliki persepsi bahwa SRG dapat menggantikan jaminan seperti surat – surat berharga dan barang yang selama ini dijadikan jaminan ke bank baik resmi maupun tidak resmi. Dalam pola SRG, petani membawa gabah ke gudang untuk dilakukan pengecekan apakah gabahnya layak atau tidak untuk disimpan di gudang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petani SRG, ketika ada petani yang akan menyimpan barangnya maka pihak pengelola gudang akan menghubungi LPK yaitu PT BPSMB untuk mengecek mutu barang seperti kadar air, butir rusak, gabah hampa, butir warna lain, butir pecah dan kotoran atau benda asing yang masuk ke gabah. Dari hasil uji mutu akan diketahui gabah tersebut berada pada mutu atau kualitas I, II atau III. Mutu atau kualitas gabah akan mempengaruhi penetapan besaran harga yang tertulis dalam resi gudang.

Apabila resi gudang dijaminkan atau diagunkan ke bank maka pihak bank akan melakukan survey ke gudang SRG dan melakukan pencairan dana. Jika dana belum juga cair, maka pihak pengelola gudang akan terus menanyakan hal tersebut kepada pihak perbankan. Petani mendapatkan dana sebanyak 70 persen dari total harga gabah yang disimpan di gudang SRG.

Selanjutnya manfaat yang didapatkan dengan memanfaatkan SRG dari sisi non ekonomi diantaranya kekuatan posisi tawar petani, kepastian kualitas dan kuantitas atas barang yang disimpan dan dapat dijadikan alat tukar barang. Persepsi pertama memiliki nilai sebesar 20,71 persen. Hal ini berarti sebanyak 20,71 persen petani beranggapan bahwa dengan memanfaatkan SRG, maka petani dapat memperkecil tingkat kerugian setelah panen karena sistem penyimpanan yang baik dan pasti. Selain karena adanya usaha yang keras dari petani agar menghasilkan hasil panen yang baik, juga dikarenakan hasil panen yang disimpan di gudang SRG akan terjamin mutunya. Terdapat tim pengujian mutu yang akan mengukur persentase butir rusak, gabah hampa, butir warna lain, butir pecah dan kotoran atau benda asing yang masuk ke gabah. Gudang penyimpanan yang telah memenuhi persyaratan juga akan menjamin kondisi barang yang disimpan baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Persepsi ke dua yaitu resi gudang dapat dijadikan sebagai alat tukar barang memiliki nilai sebesar 15,71 persen. Hal ini berarti sebanyak 15,71 persen petani menganggap resi gudang dapat ditukarkan menjadi barang yang dapat digunakan sebagai modal petani untuk melakukan usaha pertanian berikutnya, seperti bibit, pupuk, obat – obatan, pertanian dan lain sebagainya.

Persepsi ke tiga yaitu 13,57 persen petani menganggap dengan menerapkan SRG maka posisi tawar petani menjadi lebih kuat dibandingkan dengan tidak menggunakan SRG. Barang yang dimiliki petani memiliki kualitas yang telah memenuhi syarat mutu yang terjamin. Petani menyadari bahwa terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar hasil panennya dapat disimpan di

gudang SRG. Untuk menjaga hal tersebut maka petani berupaya untuk dapat memproduksi hasil panen yang berkualitas.

Sementara itu pada persepsi biaya dari sisi ekonomi terdapat 3 persepsi yaitu biaya administrasi dan penyimpanan, selisih margin yang kecil dan jaminan stok gudang tidak layak karena biaya suku bunga lebih tinggi. Persepsi pertama memiliki nilai sebesar 17,69 persen untuk selisih margin yang kecil. Hal ini berarti sebanyak 17,69 persen petani beranggapan bahwa petani dapat menahan komoditasnya saat panen dan menjualnya pada saat harga tinggi sehingga mendapatkan keuntungan. Namun, yang menjadi kendala saat ini adalah keuntungan yang didapatkan petani dapat tergerus oleh biaya yang dikeluarkan selama menahan barangnya seperti biaya bunga bank.

Persepsi yang ke dua yaitu jaminan stok gudang tidak layak karena biaya suku bunga lebih tinggi memiliki nilai sebesar 16,92 persen. Petani merasa bahwa suku bunga yang berlaku seringkali lebih tinggi sehingga meminjam uang dengan jaminan stok gudang menjadi tidak layak karena beban pinjaman tersebut. Untuk SRG Kabupaten Tanggamus, bank yang ditunjuk sebagai pelaksana penyalur kredit yaitu Bank Jawa Barat, Bank Lampung dan Bank BRI. Plafon kredit yang diberikan perbankan adalah maksimal 70 persen dari nilai resi gudang. Suku bunga yang diberikan adalah 10,50 persen, di mana 4,50 persen disubsidi pemerintah dan 6 persen menjadi beban petani.

Persepsi yang ke tiga yaitu biaya administrasi dan penyimpanan yang memiliki nilai sebesar 13,08 persen. Hal ini berarti sebanyak 13,08 persen petani beranggapan bahwa penerapan SRG di Kabupaten Tanggamus membutuhkan

biaya seperti biaya perbankan. Biaya yang dibebankan untuk biaya suku bunga bank yaitu 6 persen per tahun atau 0,5 persen per bulan.

Selanjutnya biaya yang dirasakan petani dengan memanfaatkan SRG dari sisi non ekonomi diantaranya waktu pengurusan dan prosedur yang berbelit, fasilitas gudang SRG belum memadai serta hasil produksi tidak memenuhi kualitas dan kuantitas yang dapat digudangkan. Persepsi pertama memiliki nilai sebesar 20,77 persen untuk hasil produksi yang tidak memenuhi kualitas dan kuantitas yang dapat digudangkan. Petani merasa hasil produksi petani terkadang tidak dapat memenuhi kualitas dan kuantitas yang disyaratkan oleh pengelola gudang. Mayoritas petani berpendapat bahwa terkadang persentase kadar air dan butir rusak belum mampu memenuhi batas kualitas yang baik. Hal ini dikarenakan proses pasca panen yang dilakukan petani tidak dilakukan secara baik.

Persepsi ke dua yaitu fasilitas gudang yang belum memadai memiliki nilai sebesar 18,46 persen. Beberapa petani ada yang merasa kesulitan dengan lokasi gudang yang cukup jauh dari tempat tinggal petani, seperti petani yang berada di Kecamatan Teluk Semaka. Selain itu, untuk fasilitas gudang yang belum memadai bukan menjadi suatu kendala yang cukup berarti dalam pelaksanaan SRG. Gudang sudah dilengkapi dengan alat pengering gabah (*dryer*). Kemudian, pihak pengelola gudang juga dapat membantu petani dalam memasarkan gabah yang disimpan di gudang SRG kepada pembeli. Biasanya pembeli langsung membeli gabah ke gudang dan menanyakan langsung kepada pengelola gudang apakah tersedia gabah yang dibutuhkan

atau tidak. Jika pembeli merasa cocok dengan harga dan barang yang ada, selanjutnya pihak pengelola gudang akan menghubungi pemilik barang untuk menanyakan apakah barang tersebut mau dijual atau tidak.

Persepsi ke tiga yaitu waktu pengurusan dan prosedur yang berbelit dalam menerapkan atau memanfaatkan SRG memiliki nilai yang paling rendah yaitu 13,08 persen. Dalam hal ini petani merasa pengurusan prosedur dan mekanisme SRG juga bukan menjadi suatu kendala yang sulit dalam pelaksanaannya. Dalam pola resi gudang, petani membawa gabahnya ke gudang untuk dilakukan pengecekan mutu gabah apakah layak atau tidak layak untuk disimpan di gudang SRG. Selanjutnya, pengelola gudang akan menghubungi LPK yaitu PT BPSMB untuk mengecek kadar air, gabah hampa, butir rusak, butir warna lain, butir pecah dan kotoran yang masuk ke gabah. Dari hasil pengujian maka akan diketahui gabah tersebut masuk ke kelas I, II atau III. Mutu gabah akan mempengaruhi harga yang tertulis di dalam resi gudang. Setelah uji mutu selesai, maka pihak pengelola gudang akan melakukan registrasi kepada Pusat Registrasi melalui sistem *online*.

Selanjutnya, apabila Pusat Registrasi menyetujui maka pengelola gudang akan mencetak dan menandatangani resi gudang untuk diberikan kepada petani. Hal ini tidak dirasakan sulit untuk petani karena terdapat pengelola gudang yang selalu membantu dan melayani petani dalam pengurusan prosedur resi gudang.

Berdasarkan perbandingan nilai persentase manfaat dan biaya petani yang telah menerapkan SRG, dapat diambil kesimpulan bahwa SRG telah dirasakan manfaatnya oleh petani meskipun perbandingan nilai yang didapat tidak terlalu

signifikan. Dengan perbandingan nilai manfaat sebesar 23,33 atau secara persentase sebesar 51,85 persen. Dibandingkan dengan nilai biaya sebesar 21,67 atau secara persentase sebesar 48,15 persen. Berikut hasil perbandingan persepsi manfaat dan biaya SRG Kabupaten Tanggamus diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat ekonomi
 - a. Keuntungan petani secara finansial
 - b. Resi gudang dapat dijaminkan atau diperjualbelikan
 - c. SRG sebagai bentuk pembiayaan yang cepat dan mudah

2. Manfaat non ekonomi
 - a. Kepastian kualitas dan kuantitas atas barang yang disimpan
 - b. Dapat dijadikan sebagai alat tukar barang
 - c. Posisi tawar petani menjadi lebih kuat

3. Biaya ekonomi
 - a. Selisih margin yang kecil
 - b. Jaminan stok gudang tidak layak karena biaya suku bunga lebih tinggi
 - c. Biaya administrasi dan biaya penyimpanan

4. Biaya non ekonomi
 1. Hasil produksi tidak memenuhi kualitas dan kuantitas
 2. Fasilitas gudang yang belum memadai
 3. Waktu pengurusan dan prosedur yang berbelit

SRG telah dirasakan oleh petani manfaatnya seperti terpenuhinya kebutuhan akan uang tunai serta keuntungan dari penjualan karena adanya tunda jual.

Selain itu, biaya yang dibebankan kepada petani masih subsidi dari pemerintah, hal ini merupakan salah satu faktor petani dalam menerapkan SRG. Namun, sebaiknya harus ada sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, perbankan serta lembaga–lembaga terkait SRG dalam pelaksanaan sosialisasi mengenai SRG kepada petani.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan:

1. Berdasarkan pelaksanaan SRG, adanya kelemahan pada sosialisasi SRG terhadap petani dan terdapat kekurangan pada spesifikasi gudang yang menyebabkan pelaksanaan SRG kurang maksimal.
2. Berdasarkan analisis pendapatan usahatani, petani yang menerapkan SRG mendapatkan harga jual yang lebih baik dibandingkan petani yang tidak menerapkan SRG, sehingga pendapatan petani SRG lebih tinggi dibandingkan petani non SRG.
3. Berdasarkan analisis DMA, faktor utama yang menjadikan pertimbangan petani dalam menerapkan SRG adalah biaya terkait SRG yang masih ringan. Komponen yang menjadi biaya SRG yaitu hanya biaya bunga bank. Sedangkan faktor utama petani tidak menerapkan SRG yaitu faktor dukungan pemerintah atau sosialisasi yang rendah. Mayoritas petani padi di Kecamatan Pulau Pangung belum mengetahui mengenai Sistem Resi Gudang.
4. Berdasarkan analisis manfaat dan biaya, terlihat bahwa manfaat ekonomi terbesar yang dirasakan oleh petani dari adanya SRG yaitu keuntungan

petani (finansial) dengan cara menunda penjualan daripada menjualnya langsung pada saat panen raya. Dari sisi manfaat non ekonomi yaitu petani dapat memperkecil tingkat kerugian setelah panen karena sistem penyimpanan yang baik dan pasti. Sedangkan persepsi biaya dari sisi ekonomi yaitu selisih margin yang kecil karena biaya yang dikeluarkan seperti biaya bunga bank. Dari sisi non ekonomi yaitu hasil produksi petani yang tidak memenuhi kualitas dan kuantitas yang disyaratkan oleh pengelola gudang.

B. Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Perlu adanya dukungan pemerintah, lembaga–lembaga terkait SRG dan akademisi melalui KKN tematik dalam hal sosialisasi dan edukasi, serta penyampaian bukti nyata mengenai keuntungan SRG agar lebih banyak petani yang dapat memanfaatkan SRG sebagai sumber pembiayaan. Serta perlu adanya perbaikan gudang dengan melengkapi perlengkapan gudang.
2. Perlu dilakukan pembangunan gudang penyimpanan lain di lokasi yang relatif dekat dengan lokasi petani, sehingga mempermudah akses petani untuk menjangkau gudang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Penyuluh Pertanian Kecamatan Pulau Panggung. 2015a. Kelembagaan petani, jumlah anggota dan jenis usahatani di Desa Gunung Meraksa. Badan Penyuluh Pertanian Kecamatan Pulau Panggung. Tanggamus
- Badan Penyuluh Pertanian Kecamatan Pulau Panggung. 2015b. Kelembagaan petani, jumlah anggota dan jenis usahatani di Desa Sri Menganten. Badan Penyuluh Pertanian Kecamatan Pulau Panggung. Tanggamus
- Badan Penyuluh Pertanian Kecamatan Pulau Panggung. 2015c. Luas panen, produksi, produktifitas tanaman pangan hortikultura dan perkebunan di Desa Gunung Meraksa pada Tahun 2015. Badan Penyuluh Pertanian Kecamatan Pulau Panggung. Tanggamus
- Badan Penyuluh Pertanian Kecamatan Pulau Panggung. 2015d. Luas panen, produksi dan produktifitas pada komoditas usahatani di Desa Sri Menganten pada Tahun 2015. Badan Penyuluh Pertanian Kecamatan Pulau Panggung. Tanggamus
- Badan Pusat Statistik. 2015a. Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi di Indonesia Tahun 2006-2015. Badan Pusat Statistik. Jakarta
- Badan Pusat Statistik. 2015b. Produksi Tanaman Padi Sawah Per Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2009-2013. Badan Pusat Statistik. Jakarta
- Badan Pusat Statistik. 2015c. Statistik tanaman pangan dan perkebunan Kabupaten Tanggamus Tahun 2012 – 2014. Badan Pusat Statistik. Jakarta
- Bank Rakyat Indonesia. 2008. Sistem Resi Gudang: Peluang, Tantangan dan Hambatan. Makalah Seminar Nasional Sistem Resi Gudang, Pengembangan Alternatif Pembiayaan melalui Sistem Resi Gudang. Jakarta
- Bank Rakyat Indonesia. 2011. Penjaminan Resi Gudang ke Bank sebagai Alternatif Pembiayaan. Makalah Penguatan Kelembagaan Sistem Resi Gudang dalam Mendukung Pembiayaan Sektor Pertanian. Jakarta

- Bappebti. 2011. Analisis Implementasi Sistem Resi Gudang Komoditi Lada. Bappebti, Kementerian Perdagangan RI. Jakarta
- Bappebti. 2015a. Daftar Pengelola Gudang SRG yang Mendapat Persetujuan Bappebti tahun 2015. Bappebti, Kementerian Perdagangan RI. Jakarta
- Bappebti. 2015b. Daftar Lembaga Penilaian Kesesuaian yang Mendapat Persetujuan Bappebti tahun 2015. Bappebti, Kementerian Perdagangan RI. Jakarta
- Bappebti. 2015c. Jumlah Gudang yang Mengimplementasikan Sistem Resi Gudang Tahun 2009 – 2014. Bappebti, Kementerian Perdagangan RI. Jakarta
- Bappebti. 2015d. <http://bappebti.go.id>. Dukung Stabilisasi Harga Pangan, Kemendag Perkuat Sistem Resi Gudang. Diakses tanggal 25 November 2015
- Bappebti. 2015e. <http://bappebti.go.id>. Manfaat Sistem Resi Gudang Bagi Petani dan Pelaku Usaha. Diakses tanggal 25 November 2015
- Bappebti. 2015f. <http://bappebti.go.id>. Pertumbuhan Transaksi Sistem Resi Gudang. Diakses tanggal 26 Desember 2015
- Bappebti. 2015g. <http://bappebti.go.id>. Penjelasan Tentang Sistem Resi Gudang. Diakses tanggal 25 November 2015
- Departemen Pertanian. 2007. <http://deptan.go.id>. Sektor Pertanian Kontributor Terbesar Pertumbuhan Ekonomi. Diakses tanggal 26 Desember 2015
- Dinas Perdagangan Provinsi Lampung. 2015. Kondisi Sistem Resi Gudang di Provinsi Lampung. Dinas Perdagangan Provinsi Lampung. Bandar Lampung
- Listiani, Nurlia., Haryotedjo, Bagas. 2013. *Implementasi Sistem Resi Gudang pada Komoditi Jagung: Studi Kasus di Kabupaten Tuban Jawa Timur*. Pusat Penelitian Ekonomi LIPI. Jakarta
- Mantra, Ida Bagoes. 2004. *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Nicholson, Walter. 1999. *Teori Mikroekonomi Prinsip Dasar dan Pengembangannya*. Rajawali Press. Jakarta

- Nugraha, 2014. Respon Petani terhadap Sistem Resi Gudang di Kabupaten Bantul. Skripsi Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta
- PT Bhandha Ghara Reksa. 2015a. Jumlah Resi Gudang yang Diterbitkan pada Gudang SRG Kabupaten Tanggamus tahun 2015. PT Bhandha Ghara Reksa Provinsi Lampung. Bandar Lampung
- PT Bhandha Ghara Reksa. 2015b. Responden petani yang menerapkan SRG di Kabupaten Tanggamus. PT Bhandha Ghara Reksa Provinsi Lampung. Bandar Lampung
- Purwono dan Purnawati, Heni. 2007. *Budidaya 8 Jenis Tanaman Pangan Unggul*. Penebar Swadaya. Jakarta
- Soekartawi. 1995. *Analisis Usahatani*. UI-Press. Jakarta
- Suratiyah, Ken. 2015. *Ilmu Usahatani Edisi Revisi*. Penebar Swadaya. Jakarta
- Sugiarto, Siagian D, Sunarto L.S, Oetomo D.S. 2003. *Teknik Sampling*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Sugiyono. 1999. *Statistika Untuk Penelitian*. Alfabeta. Bandung
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung
- Suhendra. 2008. <http://www.detikfinance.com/read/2008/11/04/115658/1030906/4/panetrasi-sistem-resi-gudang-masih-rendah>. Panetrasi Sistem Resi Gudang Masih Rendah. Diakses tanggal 29 November 2015.
- Suparmoko. 1990. *Pengantar Ekonomika Mikro, Edisi Pertama*. BPFE UGM. Yogyakarta
- Supranto. 2008. *Statistik: Teori dan Aplikasi. Edisi ke-7*. Penerbit Erlangga. Jakarta